

yang bermanfaat baginya, tetapi jangan buat ia sedih. Jangan terlalu baik padanya sebab dengan begitu ia akan menjadi malas. Didiklah ia dengan lemah lembut, tetapi kalau itu tidak cukup, engkau boleh memakai kekuatan dan kekerasan.¹⁵

Sepanjang masa Abbasiyah, di mana tumbuh berbagai lembaga pendidikan yang menggelar kajian-kajian tingkat tinggi, maka pertumbuhan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam menjadi makin pesat. Menyebut sekedar contoh, untuk dapat menangkap gambaran komposisi kajian sekaligus karakteristik transformasi bidang kajian pendidikan Islam pada masa klasik, disini disebut *Bayt al-Ḥikmah*. *Bayt al-Ḥikmah* yang didirikan oleh al-Makmun pada 830 (215 H.), sebagai wujud ketertarikannya pada rasionalitas dan pengakuannya atas kesejajaran antara rasionalitas dengan ajaran agama. *Bayt al-Ḥikmah* didirikan di Baghdad merupakan perpaduan bentuk kelembagaan/institusi akademi, perpustakaan dan biro penerjemahan.¹⁶

Bayt al-Ḥikmah yang didirikan al-Makmun di istananya, merupakan pengabungan fungsi perpustakaan, pusat pendidikan tinggi, sanggar sastra, lingkaran studi, serta observatorium sekaligus. Kesemuanya berada di bawah pengawasan khalifah. Berkat hubungan Khalifah al-Makmun yang luas, maka didatangkan bahan-bahan terjemahan berupa buku, manuskrip-menuskrip filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya dari karya bangsa Yunani, baik dari Byzantium atau Jundishapur.¹⁷ Untuk mengurus perbendaharaan yang demikian banyak maka diangkat Sahl Ibnu Harun sebagai sekretaris *Bayt al-Ḥikmah*.¹⁸ Sedangkan sebagai kepala *Bayt al-Ḥikmah* ditunjuk Yuhanna bin Musawaih pada tahun 830 M (215 H.). Berkat pengalamannya mengelola lembaga pendidikan di Jundishapur, Yuhanna berhasil menjadikan *Bayt al-Ḥikmah* sebagai lembaga yang multi fungsi.¹⁹

Dalam kedudukannya sebagai perpustakaan, *Bayt al-Hikmah* merupakan perpustakaan yang pertama sekali didirikan di dunia Islam untuk umum yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Buku-buku yang didatangkan dari Yunani, diatur di *Bayt al-Ḥikmah* menurut bidangnya masing-masing. Penyalin-penyalin ke dalam bahasa Arab dipilih di antara orang-orang yang mahir dalam masing-masing bidang itu, di samping menguasai bahasa Yunani dan Arab.²⁰

¹⁵Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, 51.

¹⁶Philip K.Hitti, *History of The Arab* (Mcmilland New York: St. Martin's Press, 1968), 310.

¹⁷Syalaby, *Sejarah Pendidikan...*, 171.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*,172.

PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM

Syalabi seperti halnya juga Hitti memandang *Bayt al-Hikmah* sebagai institusi multi fungsi. Selain sebagai perpustakaan yang pertama bahkan pembahasannya diletakkan dibawah judul Jenis Perpustakaan Umum. Syalabi juga memandang *Bayt al-Hikmah* sebagai institusi pendidikan, seperti dinyatakannya:

Bayt al-Hikmah adalah universitas yang pertama sekali tempat berkumpulnya ulama-ulama dan penyelidik-penyelidik ilmiah, pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswa. Dengan begitu, *Bayt al-Hikmah* adalah suatu “pusat ilmu pengetahuan” yang pertama sekali yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan yang teramat banyak kepada penuntut-penuntutnya, terutama sekali dalam bidang kedokteran, filsafat, hikmah dan lain-lain.²¹

Kondisinya sebagai lembaga pendidikan tinggi, hanya dapat ditangkap lewat keterangan atau komentar yang sifatnya umum, seperti yang dikemukakan Stanton sebagai contohnya bahwa:

Di bawah pimpinan Hunain dan anaknya, pusat penterjemahan itu (*Bayt al-Hikmah*) mengangkat sekelompok ilmuan yang brilian dengan diberikan hak untuk mengkaji dan mengajar manuskrip-manuskrip yang baru dan langka, bagitu juga laboratorium perbintangan (*observatorium*) dengan perlengkapan yang baik. Di *Bayt al-Hikmah* itu, al-Kindi mendirikan sekolah berbahasa Arab (yang mengajarkan) filsafat peripatetik yang kemudian dikembangkan oleh al-Farabi, Ibnu Sina dan Ibn Rusyd. Di tempat ini juga al-Khawarizmi tidak hanya memberikan sumbangan bagi filsafat, teologi dan matematika, tetapi juga melakukan penelitian laboratorium perbintangan.²²

Pada masa-masa tersebut, komposisi bidang kajian sangat luas sehingga secara umum menampakkan sifat pendidikan Islam yang “universal” mencakup ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum dan filsafat. Nakosteen mencatat kondisi pada masa-masa itu:

Bukan suatu yang luar biasa menemukan pelajaran matematika (aljabar, trigonometri, dan geometri); Sains (kimia, fisika dan astronomi); ilmu kedokteran (anatomi, pembedahan, farmasi); Filsafat (logika, etika dan metafisika); Kesusastaan (filologi, tata bahasa, puisi dan ilmu persajakan); Ilmu-ilmu sosial (sejarah, geografi, disiplin yang berhubungan dengan politik, hukum, sosiologi, psikologi dan jurisprudensi/ fiqh); teologi (perbandingan agama, sejarah agama-agama); Studi al-Qur'an Tradisi Religius (Hadits) dan topik-topik religius lain.²³

Berkat daya dorong dari sebuah model komposisi kajian keilmuan yang konprehensif seperti itu, pendidikan dan peradaban Islam mencapai titik puncak

²¹*Ibid.*,172.

²²Stanton, *Higher Learning in Islam...*,169.

²³Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, terj. Joko S.Kahar dan S. Abdullah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 71.

keemasannya pada akhir masa klasik itu. Terlepas dari berbagai sebab kemudian “lepasnya” ilmu pengetahuan dan filsafat dari tangan kaum muslim,²⁴ Nakosteen mengklaim bahwa bencana terbesar yang menimpa ilmu pengetahuan muslim adalah bencana penyerbuan bangsa Mongol pada abad 13. Tentara Mongol menghancurkan sangat banyak institusi-institusi ilmu pengetahuan terbesar di Khurasan dan Baghdad. Setelah itu universitas-universitas tidak pernah memperoleh kembali semangat dan keelokannya dahulu kala.²⁵ Suatu perkembangan besar yang efeknya sangat merugikan kualitas ilmu pengetahuan pada abad-abad pertengahan Islam adalah penggantian naskah-naskah mengenai teknologi, filsafat, yurisprudensi dan sebagainya, sebagai materi-materi pengajaran tinggi, dengan komentar-komentar dan super komentar (*syarḥ*). Dibarengi dengan tekanan metodologis pada hafalan daripada pemahaman dan penyelidikan bebas.²⁶

Adapun mengenai gambaran karakteristik transformasi intelektualisme Islam zaman pertengahan dikemukakan Stanton bahwa dengan pengawasan lembaga-lembaga pendidikan di tangan kaum tradisional, ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial tidak berkembang maju. Ilmu pengetahuan dan teknologi dicurigai dan dianggap tidak perlu untuk mengarahkan kehidupan yang utuh dalam peradaban Islam. Tanpa keseriusan dalam mempelajari fenomena alam dan sosial terus menerus, pendidikan Islam kehilangan rangsangan untuk melakukan usaha intelektual dan (kehilangan) momentum untuk mendapatkan ilmu baru. Buah dari filsafat dan keilmuan Islam yang brilian berpindah ke Eropa zaman pertengahan dan merangsang usaha pencarian ilmu pengetahuan. Disamping kehilangan nilai akademik untuk mempelajari ilmu pengetahuan pada semua bidang studi dan keilmuan, lembaga-lembaga pendidikan juga mengidap ciri-ciri kelembagaan yang menyebabkan hilangnya kreatifitas intelektual mereka. Madrasah dan mesjid kehilangan dukungan organisasi untuk melanjutkan independensi dan pembaruan struktur dan fungsinya.²⁷

Dari paparan di atas, dapat dianalisis bahwa intelektualisme dalam sejarah Islam mengalami transformasi yang sangat variatif dalam berbagai aspeknya, baik kelembagaan, metode maupun bidang kajian. Perubahan bidang kajian dalam masing-masing periode umpamanya mempunyai keterkaitan dengan berbagai hal, di

²⁴Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam...*, 118-120.

²⁵ Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual ...*, 72.

²⁶Azyumardi Azra, “Arah dan Kecenderungan Kajian Islam di Indonesia”, *PERTAI*, 1 (September, 1997).

²⁷Stanton, *Higher Learning in Islam...*, 232-233.

antaranya tekanan perhatian dari para ulama yang berbeda-beda pada masing-masing periode di samping bobot dan kapasitasnya yang juga variatif. Sehingga ada masanya para ulama, ada yang merasa ulama yang lebih dulu atau yang lebih “senior” memiliki kelebihan yang luar biasa, yang membuatnya diidolakan. Hal semacam itu tentunya dapat memicu sikap sekadar ikut-ikutan (*taqlīd*) dan dapat pula mematikan keberanian dan kreativitas untuk berinovasi secara intelektual. Kondisi seperti ini dalam sejarah Islam terkadang bertemu dengan sistem kekuasaan yang otoriter/diktator, yang bahkan cenderung memanfaatkan ulama dan kelembagaan Islam untuk maksud-maksud yang tidak sejalan dengan semangat intelektual itu sendiri. Hal hal yang semacam itu nampaknya turut mempengaruhi jalan dan warna proses transformasi intelektual dalam sejarah Islam.

3. Cakupan Pembaruan Pendidikan Islam

Pembaruan Islam yang bagaimanapun yang mau dilakukan sekarang ini mestilah dimulai dengan pendidikan, sebab pendidikan merupakan kunci yang membuka pintu ke arah modernisasi. Gagasan dan program pembaruan pendidikan Islam tak dapat dipungkiri memiliki akar keterkaitan dengan modernisasi pemikiran dan peradaban Islam secara keseluruhan. Ia memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan *tajdīd* dan *islāh*, dua kata yang mencerminkan suatu tradisi yang berlanjut yaitu tentang upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktek-prakteknya dalam sejarah komunitas-komunitas muslim. Ia merupakan dasar bagi keyakinan bahwa gerakan-gerakan pembaruan tetap merupakan bagian asli dan sah dari penjabaran Islam di panggung sejarah.²⁸ Keterkaitan pembaruan pendidikan dengan modernisasi dalam peradaban Islam secara umum terletak pada di satu sisi sebagai variabel modernisasi, tanpa pendidikan yang mandiri akan sulit suatu masyarakat untuk mencapai kemajuan atau kemodernan, dan di sisi lain, sejarah membuktikan bahwa pendidikan merupakan program yang menonjol dalam gerakan pembaruan yang membawa kemajuan bagi peradaban Islam, sehingga melalaikan pendidikan akan berakibat sebaliknya.

Dalam pengamatan para sejarawan, kesadaran akan keharusan modernisasi dalam dunia muslim muncul adalah setelah terjadinya kontak dengan dunia Barat, tepatnya ketika Napoleon pada tahun 1798 M menghancurkan kekuasaan Mamluk di Mesir, salah satu pusat Islam terpenting. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 M, membuka mata dunia Islam akan kelemahannya berhadapan

²⁸Nasution, *Pembaruan dalam Islam ...*, 11.

dengan dunia Barat yang telah mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kontak dengan dunia Barat selanjutnya membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi dan sebagainya. Semua ini menimbulkan persoalan-persoalan baru di mana pemimpin-pemimpin Islam pun mulai memikirkan cara mengatasi persoalan-persoalan baru itu.²⁹

Dari situ, muncul gagasan dan gerakan pembaruan di berbagai bidang kehidupan muslim, tak terkecuali bidang pendidikan, sebab pendidikan—seperti disinggung di atas—menduduki posisi strategis dalam suatu upaya pembaruan. Sejak awal abad ke-20 hingga saat ini upaya-upaya pembaruan pendidikan Islam terus berlanjut di berbagai kawasan dunia muslim, dengan berbagai model orientasi dan tekanan urgensi, antara penyelamatan intelektual dan spiritual atau penyelamatan manusia modern dari dirinya sendiri melalui agama.

Masalahnya, meskipun upaya-upaya pembaruan yang dilakukan selama ini tidak sama antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, namun secara garis besar pembaharuan pendidikan ini mencakup dua hal, yakni lembaga dan cita-cita. Setuju atau tidak setuju atas statemen tersebut, realitas historis nampaknya mengindikasikan hal itu. Tetapi untuk dapat memahaminya secara lebih terbuka, hemat penulis perlu didiskusikan lebih lanjut, khususnya menyangkut fungsi pendidikan Islam.

Menyangkut fungsi pendidikan, sangat tepat bila dikaitkan dengan maksud penciptaan manusia yang tersurat dalam landasan esensi pendidikan muslim (al-Qur'an dan al-Hadits) yaitu untuk menjadi hamba Allah (*'abd Allah*) sekaligus sebagai khalifah di muka bumi (*khalīfah fī al-arḍ*),³⁰ maka terlihat betapa luas kawasan yang perlu digarap oleh pendidikan Islam. Pandangan tersebut mengandaikan dua implikasi bagi Pendidikan Islam. *Pertama* untuk mengarahkan perkembangan manusia dengan segala potensinya untuk dapat menjalankan fungsi kehambaannya untuk dengan sebaik-baiknya mengabdikan kepada-Nya; *Kedua* membantu manusia untuk mencapai gambaran dirinya yang diharapkan dari suatu proses pendidikan menurut ajaran Islam, yakni untuk menjadi khalifah yang berakhlak mulia, berbuat kebajikan serta menguasai ilmu pengetahuan, berbagai keahlian dan keterampilan agar tugasnya dapat teremban secara baik.

Di sini terlihat mendesaknya pembaruan pendidikan Islam secara menyeluruh, tidak parsial seperti yang nampaknya berlangsung selama ini. Kasus yang paling awal dalam hal pembaruan pendidikan Islam seperti sudah banyak

²⁹*Ibid.*,13.

³⁰Lihat, antara lain: Q.S. al-Dzariyat/5: 56 dan Q.s. Yunus/10: 14.

PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM

dibicarakan adalah pembaruan di Turki dan di Mesir. Kasus di Turki terjadi dalam “tarik ulur” antara kepentingan penguasa dan rakyat yang dikuasai, di mana tahap paling awalnya justru pembenahan pendidikan militer yang justru memperlemah kelembagaan pendidikan keagamaan yang dikenal dengan *Medrese* (Madrasah). Selama kurang lebih dua dekade baru rakyat memperoleh kesempatan memperbaiki pendidikan keagamaannya, yakni setelah diperkenalkan demokrasi tahun 1946. Sementara di Mesir, model pembaruannya justru dimotori oleh penguasa, walaupun terjadi juga “tarik ulur” antara penguasa, para pemimpin al-Azhar yang terkesan “konservatif,” yang tidak terlalu terbuka atas ide-ide pembaruan, sehingga beberapa kali pemimpin al-Azhar berganti dalam rangka akomodasi atas ide pembaruan dimaksud.

Pembaruan di Al-Azhar Mesir yang dapat dipandang spektakuler adalah pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, di mana Universitas Al-Azhar yang sebelumnya lebih merupakan “pesantren tinggi” dikembangkan menjadi sebuah Universitas Islam Modern, dengan memasukkan berbagai ilmu-ilmu madani dan penguasaan bahasa-bahasa Eropa. Setelah sebelumnya banyak calon mahasiswa mengikuti pendidikan di Eropa di antaranya Rifa’ah Al-Thahawi dan tokoh Mesir lainnya.

C. Penutup

Pembaruan Islam bagaimanapun yang mau dilakukan sekarang ini, mestilah dimulai dengan pendidikan, sebab pendidikan merupakan kunci yang membuka pintu ke arah modernisasi. Karena itu, para pemikir pendidikan Islam, perlu menelaah kembali pendidikan Islam baik secara restrospektif maupun prospektif. Retrospektif yakni tentang proses perubahan-perubahan bentuk kependidikan pada masa lampau sedangkan prospektif yakni tentang proses perubahan-perubahan bentuk kependidikan pada masa yang akan datang.

Dari berbagai upaya pembaruan pendidikan Islam yang telah berlangsung di hampir seluruh kawasan dunia Muslim selama ini, kelihatannya memang belum sepenuhnya berjalan sesuai tuntutan perkembangan dan tuntutan pembaruan itu sendiri. Untuk sekedar menyebut contoh yang kurang tersentuh, selama ini nampaknya pada aspek metode. Selama ini, pendidikan Islam berlangsung dengan metode dalam penekanan yang dominan pada sisi memori dan kurang sekali

menyentuh pengembangan daya nalar rasional yang berkekuatan analitik argumentatif terhadap bahan dan sumber ajaran itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Arah dan Kecenderungan Kajian Islam di Indonesia*. PERTA 1, No. 1 (1997).
- Bin Nabi, Malik. *Suruṭ al-Nahḍah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1987, Edisi Indonesia terj. Afif Muhammad dan Abdullah Adhiem. *Membangun Dunia Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- Buchori, Mochtar. *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan & IKIP Nuhammadiyah Jakarta Press, 1995.
- Guralnik, David B. (ed), *Webster's New World Dictionary of the American Language*. New York: Warner Books, 1987.
- Hitti, Philip K. *History of The Arab*. Mcmilland New York: St. Martin's Press, 1968.
- Jaenuri, Achmad. "Landasan Teologis Gerakan Pembaruan dalam Islam". *Ulumul Qur'an* 4, No.3 (1995).
- Nakosteen, Mehdi. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, terj. Joko Kahar dan Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nasution, Harun. *Pembaruan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity: transformation of an Intellectual tradition*. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1992.
- Soejatmiko dkk. *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000*. Yogyakarta: Tiara Utama, 1986.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Mukhtar Yahya dan Sanusi Latif. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Zuhairini dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: bumi Aksara dan Ditbinpertaiss, 1984.

**IMPLEMENTASI PEMIKIRAN DAKWAH MOHAMMAD NATSIR
DI DEWAN DAKWAH ISLAMIAH INDONESIA PROVINSI ACEH**

Raihan

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
E-mail: raihan2000@gmail.com

Abstrak

Mohammad Natsir merupakan salah seorang tokoh dakwah yang pemikirannya meliputi berbagai bidang. Ia adalah pendiri DDII (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) yang dinilai konsisten melaksanakan aktifitas dakwah Islam sampai akhir hayatnya. Sebagai buah perjuangan Mohammad Natsir, maka berkaitan dengan visi dan misi yang dikembangkan oleh DDII Aceh seharusnya tidak banyak berbeda dengan yang ditetapkan oleh pusat. Namun kenyataannya, jika dilihat dari aspek aktifitas yang dilakukan belum sepenuhnya dapat diaplikasikan oleh DDII Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai buah perjuangan Mohammad Natsir serta perpanjangan kepengurusan dari pusat, maka berkaitan dengan visi dan misi yang dikembangkan oleh DDII Provinsi Aceh tidak berbeda dengan yang ditetapkan oleh pusat. Demikian pula dengan sebagian besar program yang ditetapkan DDII Aceh yang memiliki persamaan dengan aktifitas dakwah yang telah dilaksanakan oleh Mohammad Natsir ketika memimpin DDII, yaitu melakukan pengkaderan dan pengajian rutin, membangun masjid, menghambat upaya pendangkalan akidah serta program lain yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dakwah islamiyah. Hanya saja, kinerja DDII Provinsi Aceh masih terkesan kurang produktif disebabkan oleh keterlibatan sebahagian pengurus yang kurang fokus pada aktifitas dakwah yang dilaksanakan DDII. Di samping itu, DDII Aceh mengalami kekurangan dana operasional dalam melaksanakan berbagai kegiatan, sehingga sebahagian program organisasi tersebut mengalami penundaan, bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: *Strategi Dakwah; Akidah Islam; Dewan Dakwah Islam Indonesia*

Abstract

Mohammad Natsir was one of the da'wa figure where his thoughts covered various fields. He was the founder DDII (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) who was assessed consistently carried out the Islamic da'wa until the end of his life. As the result of his struggle, related to the vision and mission of the center of DDII, DDII Aceh should not be much different from that set by the center. But in reality, when it is seen through the aspect of the activities being carried out have not been fully applied by Aceh DDII. The result of this study shows that the struggle of Mohammad Natsir as well as the extension of the center management is related to the vision and the mission developed by the Aceh Provincial DDII is not different from that being set by the center. Similarly, the majority of programs are set by Aceh DDII has much in common with the da'wa activities that had been carried out by Mohammad Natsir when leading DDII, namely to conducted promoting and routine qur'anic recitation, building mosques, hampering the effort to silt the creed as well as other programs aimed at improving the Islamic da'wa quality. However, the performance of Aceh DDII is still seemed less productive due to the involvement of management which

some still focus on less da'wa activities. In addition, the Aceh DDII is lack of operational funds in carrying out various activities which bring about some programs have been delayed, or even failure in its implementation.

Keywords: *Da'wa Strategies; Creed Silt; Indonesia Da'wa Council*

ملخص

كان محمد ناتسير واحد من اقدم الدعاة باندونيسيا حيث انتشرت افكاره في مختلف المجالات. وكان مؤسس ديوان الدعوة الإسلامية إندونيسيا (DDII). وقد نفذ الدعوة الإسلامية باستمرار طول حياته. فينبغي لديوان الدعوة الإسلامية إندونيسيا بأتشيه ان تناسب رؤيته ورسالته بتلك التي وضعها المركز بجاكرتا. ولكن في الواقع، نظرة من جوانب الأنشطة التي أجريت كان DDII أتشيه لم يكمل هذا الرجاء. وأظهرت نتائج البحث أن رؤية ورسالة ديوان الدعوة الإسلامية إندونيسيا بأتشيه قد تعامل مع رؤية ورسالة وضعها مركز DDII بجاكرتا. وكذلك كان معظم برامج DDII أتشيه متساويا بكثير من القواسم التي نفذها محمد ناتسير عندما قاد DDII مثل التربية و التمرين للأعضاء الجدد، وبناء المساجد، وسد الذريعة لكل نشاطات إضعاف العقيدة الإسلامية، و البرنامج الأخرى التي تهدف إلى ترقية كمية الدعوة الإسلامية. فإن إقليم DDII أتشيه لا يزال يبدو أقل إنتاجية بسبب تورط إدارة إلى الأنشطة الدعائية التي نفذت DDII. وبالإضافة إلى ذلك، كان DDII أتشيه نقصانا من الأموال التشغيلية في تنفيذ الأنشطة الكثيرة و المختلفة. فمن الحصول كان بعض برنامجه لا يجري كاملا كما يرجى.

الكلمات الرئيسية: استراتيجية في الدعوة؛ العقيدة الإسلامية؛ مجلس الدعوة الإسلامية الأندونيسية

A. Pendahuluan

Mohammad Natsir adalah salah seorang putra Indonesia yang dikenal sebagai birokrat, politisi dan juga sebagai *dā'i* ternama. Sewaktu menjadi ketua Masyumi, ia dikenal dengan kegigihannya memperjuangkan aspirasi Islam melalui Konstituante. Namun sangat disayangkan, aspirasinya yang dikenal sebagai dakwah Islam melalui kekuatan politik tersebut gagal, bahkan partai Masyumi yang dipimpinnya dibubarkan oleh kekuasaan Soekarno pada bulan Desember 1960. Sebagai akibat pembubaran partai Islam tersebut, sebahagian dari tokoh-tokohnya berpencar mencari posisi pada ormas-ormas Islam lainnya. Ada yang bergabung dengan Muhammadiyah seperti Mohammmad Kasman Singodimedjo serta ada pula yang bergabung dengan NU seperti Idham Khalid dan Masykur. Mereka kemudian menjadi pemimpin puncak pada ormas tersebut pada periode berikutnya.¹

Mohammad Natsir tidak mengikuti jejak rekan-rekannya untuk bergabung dengan ormas lain. Menurutnya, berkecimpung di lapangan politik merupakan

¹Thohir Luth, M. Natsir *Dakwah Dan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani,1999), 10.

IMPLEMENTASI PEMIKIRAN DAKWAH MOHAMMAD NATSIR

bagian dari ibadah dan dakwah. Akan tetapi, bila ia tidak lagi mendapat kesempatan untuk berkiprah di lapangan politik, jalan ibadah dan dakwah dalam bentuk lain masih terbuka sangat lebar. Ia kemudian mengubah jalur dakwahnya. Dengan demikian sesuai dengan mottonya, yaitu bila dulu ia menjalani “dakwah lewat jalur politik,” maka sekarang ia “berpolitik lewat jalur dakwah.” Untuk mewujudkan tujuan dakwahnya, ia mendirikan organisasi dakwah yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).²

Selama hidupnya Mohammad Natsir benar-benar mencurahkan seluruh tenaganya demi dakwah islamiyah. Karena jasanya, ia tidak hanya dikenal di Indonesia saja tetapi juga sampai ke luar negeri. Namanya mulai dikenal di dunia internasional sejak ia menjabat Menteri Penerangan RI selama tiga periode serta menjadi Perdana Menteri pertama setelah Indonesia merdeka. Tahun 1952 ia mulai bersentuhan dengan dunia internasional. Saat itu ia mengunjungi Pakistan atas undangan Pakistan Institut of Pakistan Affair. Ia juga mendapat undangan untuk mengunjungi pemerintah Kashmir, Irak, Iran, Libanon, Mesir, Turki, Arab Saudi, India dan Burma.³

Sepeninggal Mohammad Natsir, DDII Pusat terus melakukan berbagai kegiatan dakwah, di antaranya melaksanakan berbagai pelatihan dan kursus dakwah, program bantuan sosial, pembangunan masjid di seluruh Indonesia dan sebagainya. DDII Pusat juga menaungi ribuan *dā'i* yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang berada di daerah perkotaan sampai ke pedalaman atau daerah terpencil. Saat ini, DDII Pusat telah menyelesaikan Gedung Menara Dakwah di Jalan Keramat Raya 45, Jakarta Pusat. Gedung yang dibangun setinggi delapan lantai tersebut difungsikan untuk perkantoran DDII Pusat, ruang kuliah SDIT Mohammad Natsir, perpustakaan, pusat multimedia dan sebagainya.⁴

DDII Provinsi Aceh pertama sekali dibentuk pada bulan Mei 1991 di rumah Abdur Rani Rasyidi (Kuta Alam) yang menetapkan Ali Sabi sebagai ketua perdana dan Muhammad Yus sebagai sekretarisnya. Penetapan pengurus DDII Provinsi Aceh itu dihadiri dan diprakarsai oleh Husein Umar sebagai utusan dari Jakarta.

²Wildan Hasan, *Berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, <http://www.dewandakwah.com>, diakses tanggal 20 September 2009.

³Ahmad Tirmidzi, “Asing di Negeri Sendiri Terkenal di Luar Negeri,” *Majalah Al-Mujtama Edisi Seabad M.Natsir* (Jakarta: 2008), 49.

⁴ Andy Hariyono, *Profil Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, [Http/www. mail-archive.com](http://www.mail-archive.com), diakses tanggal 11 Agustus 2011.

Penelitian ini mengkaji tentang aktifitas dakwah DDII Provinsi Aceh, karena sepeninggal Mohammad Natsir kinerja DDII Provinsi Aceh terlihat kurang produktif dan dinilai agak pasif sehingga terkesan cenderung untuk kurang mengikuti pola pemikiran dakwah Mohammad Natsir. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka penelitian ini mencoba mengkaji kiprah dakwah DDII Provinsi Aceh sebagai buah perjuangan Mohammad Natsir.

B. Pembahasan

Agar dapat memahami riwayat hidup dan pemikiran dakwah Mohammad Natsir diperlukan beberapa kajian yang meliputi biografi, pemikiran dakwah serta konsep kepemimpinan dakwah Mohammad Natsir yang akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Biografi Mohammad Natsir

Mohammad Natsir dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 1908 yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok Sumatera Barat. Kedua orang tuanya berasal dari Maninjau. Ibunya bernama Khadijah dan ayahnya bernama Mohammad Idris Sutan Sarapido, seorang pegawai pemerintah yang pernah menjadi Asisten Demang di Bonjol. Ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Mereka dibesarkan di tengah-tengah keluarga muslim yang taat beragama. Bila ditinjau dari asal-usulnya, ia berasal dari keturunan ulama. Kakeknya termasuk salah seorang ulama di Minangkabau.⁵ Di tempat kelahirannya, Mohammad Natsir melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama. Dia kemudian diangkat menjadi penghulu atau kepala suku Piliang dengan gelar Datuk Sinaro Panjang di Pasar Maninjau.⁶

Ketika berusia 8 tahun, Mohammad Natsir mulai sekolah di Holladsch Inlandsche School (HIS) Adabiyah Padang. HIS adalah sejenis Sekolah Dasar pada masa Belanda. Hanya beberapa bulan bersekolah di HIS Adabiyah, ia dipindahkan oleh ayahnya ke HIS Solok.⁷ Ketika di Solok, setiap pagi hari ia masuk sekolah umum (HIS), sore harinya ia mempelajari Al-Qur'an dan ilmu Islam lainnya di

⁵ST. Rais Alamsjah, *Sepuluh Orang Terbesar Sekarang* (Jakarta: Bintang Mas, 1952), 80.

⁶Shofwan Karim, *Mohammad Natsir 1908-1993*, <http://heriman.wordpress.com>, diakses tanggal 7 Maret 2010.

⁷M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia* (Bandung: Mizan, 2010), 19.

IMPLEMENTASI PEMIKIRAN DAKWAH MOHAMMAD NATSIR

sekolah agama (Madrasah Diniyah) yang dipimpin oleh Tuanku Mudo Amin. Di samping belajar, ia juga mengajar dan menjadi guru bantu kelas pada sekolah yang sama.⁸

Setelah tamat dari HIS, pada tahun 1923, Mohammad Natsir meneruskan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Ordewijs (MULO) Padang, yaitu sejenis Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler. Ia kemudian bergabung menjadi anggota Pandu Nationale Islamietische Pavinderij dari perkumpulan JIB (Jong Islamieten Bond) Padang yang diketuai oleh Sanusi Pane.⁹ Pada tahun 1927 ia meneruskan pendidikan formalnya ke Algemene Middelbare School (AMS) di Bandung dan memilih jurusan Kesusasteraan Barat Klasik. Namun, sesuatu yang tidak terlepas dari semangat jiwanya adalah keinginannya untuk mendalami Islam. Di Bandung, minatnya tentang agama berkembang. Ia kemudian bergabung dengan Persis (Persatuan Islam) Bandung dan mengikuti pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Ahmad Hasan, tokoh pendiri Persis tersebut.¹⁰ Dia juga belajar pada Ahmad Soorkati dan A.M. Sangaji yang merupakan tokoh-tokoh Islam terkemuka saat itu.¹¹

Satu tahun setelah bergabung dengan Persis, Mohammad Natsir kemudian bergabung dengan JIB (Jong Islamieten Bond) cabang Bandung yang didirikan oleh Agus Salim. Selama di JIB, ia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Hatta, Prawoto Mangunsasmito, Sjafruddin Prawiranegara, Jusuf Wibisono, Tjokroaminoto dan Mohammad Roem. Pada Tahun 1928 Mohammad Natsir terpilih menjadi ketua cabang JIB Bandung.¹²

Setelah belajar di AMS, Mohammad Natsir sebenarnya mempunyai kesempatan untuk meneruskan pendidikannya ke Rechts Hogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta atau ke Handels Hogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Akan tetapi ia memilih untuk tidak melanjutkan kuliah, melainkan mengikuti kursus guru.¹³ Ia kemudian mengajar pelajaran agama di beberapa sekolah menengah, seperti di sekolah MULO Javastraat Bandung dan sekolah guru di Gunung Sahari Lembang. Hal ini merupakan panggilan

⁸Yusuf A. Puar, dalam Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 23.

⁹Yusuf A. Puar, dalam Thohir Luth, *M. Natsir...*, 23.

¹⁰George Mc.T. Kahin, dalam Waluyo, *Dari 'Pemberontak' Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir Dan Perjuangan Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2009), 20.

¹¹Shofwan Karim, 2007, " Mohammad Natsir...", diakses tanggal 7 Maret 2010.

¹²Yusril Ihza Mahendra dalam Thohir Luth, *M. Natsir...*, 23-24.

¹³ST. Rais Alamsjah, *Sepuluh Orang...*, 80.

Raihan

jiwanya untuk mengajarkan agama yang pada masa itu dirasakan belum memadai. Ia lalu mendirikan Pendis (Pendidikan Islam), yaitu suatu bentuk pendidikan modern yang mengkombinasikan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan pesantren.¹⁴

Mohammad Natsir menikah dengan Noer Nahar pada tanggal 22 Oktober 1934 di Bandung. Dari pernikahan tersebut ia dikaruniai enam orang anak yaitu Siti Muchlisah (lahir tanggal 20 Maret 1936), Abu Hanifah (lahir tanggal 29 April 1937), Asma Farida (lahir tanggal 17 Maret 1939), Hasnah Faizah (lahir tanggal 5 Mei 1941), Asyatul Asyrah (lahir tanggal 20 Mei 1942) dan Ahmad Fauzi (lahir tanggal 26 April 1944).¹⁵

Pada tahun 1938 ia bergabung dengan PII (Partai Islam Indonesia) cabang Bandung. Ia menjadi ketua PII Bandung pada tahun 1940 dan bekerja di pemerintahan sebagai Kepala Biro Pendidikan Kotamadya Bandung serta merangkap sekretaris STI (Sekolah Tinggi Islam) di Jakarta.¹⁶ Kegiatan politiknya menonjol sesudah dibukanya kesempatan mendirikan partai Masyumi bersama tokoh-tokoh Islam lainnya seperti Sukiman dan Mohammad Roem pada bulan November 1945. Ia juga menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan anggota Badan Pekerja KNIP. Dalam kabinet Syahrir I dan II (1946-1947) serta dalam kabinet Hatta (1948), Mohammad Natsir ditunjuk sebagai Menteri Penerangan. Ketika terbentuknya negara RIS sebagai hasil perjanjian KMB pada akhir Desember 1949, ia mengajukan Mosi Integral kepada parlemen RIS. Mosi itulah yang memungkinkan Indonesia yang sebelumnya menjadi 17 negara bagian kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ide ini tercapai dengan dibentuknya Negara Kesatuan RI pada 17 Agustus 1950. Atas jasanya, ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama sejak Indonesia menjadi negara kesatuan oleh Soekarno.¹⁷

Saat menjabat sebagai Perdana Menteri di Indonesia, Mohammad Natsir menyatakan bahwa Islam sebagai dasar negara. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa “Pancasila tidak patut dijadikan ideologi negara, karena sila-sila itu relatif, baik sila-sila itu sendiri maupun hubungan satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan Pancasila, Islam mempunyai hukum-hukum yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan melalui wahyu yang memberikan ukuran mutlak untuk mengatur

¹⁴Thohir Luth, *M. Natsir...*, 23-24.

¹⁵Thohir Luth, *M. Natsir...*, 27.

¹⁶Thohir Luth, *M. Natsir...*, 23-24.

¹⁷ST. Rais Alamsjah, *Sepuluh Orang...*, 90.

persoalan-persoalan manusia.” Pernyataan tersebut ternyata ditentang oleh Soekarno.¹⁸ Sejak saat itu, ia dan Soekarno semakin sering berbeda pendapat. Soekarno semakin perkasa di puncak kekuasaan dan akrab dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), sementara Mohammad Natsir memimpin fraksi Masyumi di parlemen di samping menjadi anggota Konstituante (1956-1958). Perselisihan antara keduanya semakin memuncak ketika Soekarno secara sepihak menguburkan semua partai melalui Demokrasi Terpimpin. Kebijakan Soekarno tersebut mengakibatkan situasi politik pada masa itu menjadi semakin memanas. Di saat yang sama, PKI semakin berkembang dan berjaya. Kondisi tersebut memaksanya beserta rekan-rekan dan keluarga menyingkir ke Sungai Dereh, Padang dan bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Keputusan tersebut diambilnya sebagai tindakan agar Soekarno kembali ke konstitusional dalam rangka menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia.¹⁹

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Soekarno membubarkan Masyumi dan memaklumkan pengampunan kepadanya. Maklumat tersebut mendorong Mohammad Natsir dan rekan-rekannya untuk kembali ke Jakarta. Namun setibanya di Jakarta ia ditangkap kemudian diasingkan sebagai karantina politik di Batu Malang, Jawa Timur (1960-1962). Ia kemudian dipindahkan ke Rumah Tahanan Militer Jakarta (1962-1966). Mohammad Natsir dibebaskan oleh pemerintahan Soeharto pada Juli 1966, tanpa melalui proses pengadilan dan satu tuduhanpun kepadanya.²⁰ Harapannya menghidupkan kembali Masyumi tidak terwujud. Karena tidak mungkin lagi terjun ke politik, ia mengalihkan jalur dakwahnya dan mendirikan sebuah yayasan dakwah yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).²¹ Namun kebebasannya hilang kembali karena ia ikut bergabung dengan kelompok Petisi 50 yang mengkritik kepemimpinan Soeharto pada tahun 1980. Ia dicekal dalam semua kegiatan, termasuk bepergian ke luar negeri. Sejak itu ia hanya aktif memimpin kegiatan dakwah di kantor DDII Salemba Jakarta yang sekaligus berfungsi sebagai masjid dan pusat kegiatan diskusi. Perjuangannya yang “berpolitik

¹⁸Andy Sulistiyanto, “Mujahid Dakwah Yang Tak Kenal Lelah” dalam *Sabili Edisi Khusus 100 Tahun M. Natsir* (Jakarta: t.tp, 2008), 58.

¹⁹Abibullah Djaini, “Pengantar,” dalam Anwar Harjono. dkk, *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), xi.

²⁰Thohir Luth, *M. Natsir...*, 25.

²¹Wildan Hasan, *Sejarah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, <http://wildanhasan.blogspot.com>, diakses tanggal 20 Januari 2010.

lewat dakwah” melalui DDII ia lakukan sejak awal pemerintahan Soeharto (Orde Baru) sampai akhir hayatnya.²²

2. Pemikiran Dakwah Mohammad Natsir

Teori dakwah Mohammad Natsir diawali dengan penjelasan bahwa Islam adalah agama dakwah.²³ Islam mengakui adanya hak, nafsu, akal dan rasa dengan fungsinya masing-masing, mengarahkan panca indra, menggugah akal dan kalbu, menyambung jangkauan untuk hal-hal yang tidak tercapai oleh mereka sendiri, sehingga manusia tidak lagi meraba ke sana-sini dan terus salah meraba dalam mencari Tuhannya seperti yang tersebut dalam lelucon sedih tentang nasib lima orang buta yang meraba-raba dengan tangan untuk mengetahui bentuk gajah.²⁴

Berdasarkan konsep di atas dapat dipahami bahwa ia menempatkan posisi dakwah Islam sebagai hal yang penting karena hal tersebut akan ikut menentukan jatuh banggunya suatu masyarakat dalam suatu bangsa.

Yusril Ihza Mahendra yang pernah menjadi muridnya mengemukakan bahwa kiprah Mohammad Natsir sebagai tokoh intelektual, politikus, pemimpin negara, maupun tokoh dunia Islam yang terkemuka di abad ini merupakan pribadi yang penuh pesona. Padahal dari segi asal-usul dan fisiknya, ia hanyalah orang biasa dengan temperamen yang lemah lembut, namun teguh memegang prinsip-prinsip keislaman. Dalam hal ini, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan tentang kesannya terhadap Mohammad Natsir.

“Suatu hal yang kiranya patut menjadi teladan dari kehidupan Natsir adalah pribadinya yang sederhana dan jauh dari kecintaan terhadap harta benda. Kesederhanaan hidup memang telah dijalaninya semenjak kecil ketika ia masih tinggal di Tanah Minang. Kesederhanaan itu terus berlanjut hingga akhir hayatnya. Selama terlibat dalam dunia politik, Natsir memang tidak pernah terfikir untuk ‘memperkaya diri,’ apalagi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memang ada di tangannya. Ketika ia menjadi Menteri Penerangan, ia pergi ke kantor dengan menaiki sepeda dan memakai baju dengan tambalan karena tuanya umur baju itu hingga sobek disebabkan

²²Shofwan Karim, *Mohammad Natsir...*, diakses tanggal 7 Maret 2010.

²³Adapun yang dimaksud dengan agama dakwah adalah agama yang di dalamnya terdapat usaha menyebarluaskan kebenaran serta mengajak orang-orang yang belum mempercayainya dianggap sebagai tugas suci oleh pendirinya atau oleh para penggantinya. Semangat memperjuangkan kebenaran itulah yang tidak kunjung padam dari jiwa para penganutnya, sehingga kebenaran itu terwujud dalam fikiran, kata-kata dan perbuatan. Semangat itu juga yang membuat penganutnya merasa tidak puas sampai berhasil menanamkan nilai kebenaran itu ke dalam jiwa setiap orang hingga apa yang diyakininya sebagai kebenaran diterima oleh seluruh manusia. (Thomas W. Arnold, *Sejarah Dakwah Islam*, terj. Nawawi Rambe, Jakarta: Widjaya, 1979, 1).

²⁴M. Natsir, *Fiqhud Dakwah*, cet 10 (Jakarta: Capita Selecta, 1996), 26.

IMPLEMENTASI PEMIKIRAN DAKWAH MOHAMMAD NATSIR

benangnya yang telah rapuh...Di masa tua, Natsir tetap menempati rumah yang nampak sederhana dengan perabotan ala kadarnya. Tak ada yang menyangka kalau itu rumah seorang mantan Perdana Menteri...”²⁵

Dari ungkapan di atas dapat dinilai bahwa kesederhanaan dan kejujuran merupakan modal bagi Mohammad Natsir dalam memimpin. Ungkapan tentang kesahajaan tokoh ini tidak hanya diapresiasi oleh tokoh yang berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga diakui oleh George Mc. T. Kahin, salah seorang professor yang berasal dari Cornell University Amerika Serikat yang melakukan penelitian pada masa-masa awal revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948. Ia menilai bahwa Mohammad Natsir adalah seorang yang sederhana dan rendah hati. Kesan itu didapat ketika ia menyaksikan Mohammad Natsir saat menjabat sebagai Perdana Menteri memakai kemeja yang penuh dengan tambalan.²⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kesederhanaan, kejujuran, ketekunan dan keikhlasan merupakan karakter Mohammad Natsir sebagai pemimpin dakwah. Bila dikaitkan dengan teori kemunculan kepemimpinan²⁷ dapat dipahami bahwa kepemimpinan Mohammad Natsir timbul karena keimanan serta ketaqwaannya kepada Allah di samping adanya kemampuan dan bakat-bakat kepemimpinan yang dimilikinya. Kepemimpinannya juga muncul karena situasi dan kondisi dakwah Islam Indonesia pada masa Orde Lama yang tidak stabil sehingga menuntut diadakannya reformasi untuk memilih seorang pemimpin dakwah baru yang diharapkan dapat menjadi figur dalam mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan dakwah Indonesia yang tengah dihadapi. Sedangkan bila dilihat dari gaya kepemimpinannya yang bersahaja, ia cenderung bertipe kharismatik. Dalam kepemimpinan dakwah, tampaknya tipe ini lebih dibutuhkan mengingat pemimpin yang memiliki kharisma dan beriman, senantiasa menyadari dan mensyukuri kelebihan dalam kepribadiannya sebagai pemberian Allah. Anugerah yang dimilikinya menjadi “modal” yang dapat dipergunakannya untuk mengajak serta mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk berbuat sesuatu yang diridhai Allah dalam rangka memakmurkan bumi, sebagai tugas kekhalifahannya.

²⁵Yusril Ihza Mahendra, “Pendahuluan,” dalam Anwar Harjono. dkk, *Pemikiran dan...*, 6.

²⁶Kesaksian George Mc. T. Kahin ini ditulis dalam rangka menyambut 70 tahun Mohammad Natsir dalam Majalah Suara Mesjid sebagaimana yang dikutip kembali oleh Artawijaya, “M. Natsir Maestro Dakwah Yang Tak Pernah Lelah,” dalam *Majalah Al-Mujtama’*..., 21.

²⁷Lihat teori kemunculan kepemimpinan dalam buku karangan Hamzah Yaquub, *Publistik Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1981) serta dalam buku karangan RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2005).

Raihan

Mohammad Natsir mengemukakan bahwa kepemimpinan bukanlah milik pribadi yang harus dikuasai sendiri. Ia mengemukakan bahwa pada dasarnya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan yaitu:

- a. Pemimpin harus menyadari bahwa jabatan kepemimpinannya merupakan amanah yang suatu ketika akan diserahkan pada orang lain. Hal ini berarti bahwa seorang pemimpin harus memahami kekuatan dan kekurangan yang ada pada dirinya, kekuatan yang dihadapinya serta mampu membawa umat pada kesadaran tersebut.
- b. Mengatur usaha perjuangan secara sistematis dengan program yang baik dan sungguh-sungguh. Dengan demikian, sebagai seorang pemimpin, ia harus berusaha untuk mendidik kader-kader dengan serius agar dapat memangku amanah tersebut di masa yang akan datang.²⁸

Berdasarkan dua aspek di atas dapat disimpulkan bahwa kaderisasi dan program yang sistematis merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya. Dalam kesempatan lain ia juga mengungkapkan:

“Memimpin adalah memegang untuk dapat melepaskan. Bukan kemegahan yang hakiki bagi pemimpin, apabila selama ia ada, pimpinan berjalan dengan baik sehingga nama dan usaha yang dipimpinnya berjalani di hati rakyat. Tetapi tatkala pada suatu saat ia tidak ada lagi, segala sesuatunya menjadi berantakan dan kacau balau, umat yang dipimpinnya dihindangi penyakit bingung dan takut.”²⁹

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa upaya mempersiapkan kader pemimpin dibutuhkan karena seorang pimpinan pasti akan harus mengakhiri kepemimpinannya baik cepat ataupun lambat. Ketika seorang pemimpin mengakhiri kepemimpinannya, pada saat itulah diperlukan calon pemimpin pengganti yang sulit dipenuhi bila tidak pernah dilakukan kaderisasi sebelumnya.

Proses kaderisasi kepemimpinan dakwahnya dimulai dengan pembinaan akidah. Ia menegaskan bahwa sebagai pemimpin dakwah, para *dā'i* harus mencontoh jejak dakwah para Nabi dengan meletakkan tauhid sebagai batu pertama karena tauhid merupakan landasan dalam beragama dan beramal. Tauhid yang benar akan mampu membebaskan manusia dari berbagai ketergantungan kepada selain Allah. Tauhid juga akan memunculkan pengabdian atau penyembahan yang benar-benar murni dan ikhlas semata-mata kepada Allah. Dengan semua bentuk ibadah yang dilakukan secara benar; landasan, motivasi dan tata caranya, maka akan mampu

²⁸M. Natsir, *Capita Selecta* 2..., 333-334.

²⁹M. Natsir, *Capita Selecta* ..., 318.

memberikan kekuatan dalam jiwa seseorang untuk mengendalikan diri, sehingga tidak terbawa oleh pengaruh hawa nafsu dalam segala bentuknya.³⁰

Dalam kepemimpinan dakwah, ia juga mengumpamakan para *dā'i* sebagai seorang yang berjuang di medan perang, di mana ia harus mengetahui kekuatan musuh. Demikianlah dengan seorang *dā'i* yang “berjuang melawan kemunkaran” harus pula mengetahui tipe-tipe objek dakwah yang akan dihadapinya. Jika orang yang akan berangkat ke medan perang harus lengkap dengan perbekalan, maka *dā'i* yang berjuang melawan “musuh non fisik” juga memerlukan perbekalan yang cukup. Kedua-duanya merupakan prajurit *jihād fi sabīlillāh*, hanya saja bidangnya yang berlainan. Mohammad Natsir menyebutkan ada tiga persiapan *dā'i* dalam dakwahnya, yaitu persiapan mental, persiapan ilmiah dan persiapan kaifiat (cara) serta adab dakwah.³¹

Mohammad Natsir tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana mengaplikasikan ketiga persiapan tersebut. Dalam hal ini, Thohir Luth dalam bukunya yang berjudul *Mohammad Natsir, Dakwah dan Pemikirannya* menjelaskan bahwa persiapan mental menyangkut ketenangan batin, stabilitas emosi dan kemampuan mengendalikan diri dalam melaksanakan tugas. Persiapan ilmiah mengharuskan seorang *dā'i* membekali diri dengan ilmu dan teknologi. Sedangkan persiapan yang menyangkut cara dan adab dakwah adalah persiapan yang berhubungan dengan etika berdakwah, baik yang menyangkut dengan pribadi *dā'i* itu sendiri maupun yang menyangkut dengan interaksi *dā'i* dengan masyarakat.³²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Mohammad Natsir memandang bahwa dakwah adalah seruan yang sifatnya *farḍu 'īn*. Ia tidak hanya memahami dakwah hanya sebagai *tablīgh* dalam makna sempit, namun merupakan sebuah sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan meningkatkan seluruh aspek-aspek kehidupan manusia sebagai kelanjutan risalah Nabi Muhammad baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan serta bidang lainnya. Dalam hal ini, ia mempergunakan ‘kendaraan politik’ dalam pengembangan dakwahnya. Di sisi lain, menurutnya, keberhasilan dakwah juga terletak pada profesionalisme seorang *dā'i* dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itulah diperlukan beberapa persiapan bagi *dā'i* dalam dakwahnya, yaitu persiapan mental, persiapan ilmiah, persiapan metode serta

³⁰M. Natsir, *Fiqhud Dakwah* ..., 33-34.

³¹M. Natsir, *Fiqhud Dakwah* ..., 133.

³²Thohir Luth, *M. Natsir...*, 76.

adab dakwah. Ia mengemukakan bahwa dalam melaksanakan dakwah, tantangan dan hambatan akan selalu dihadapi dalam setiap aktifitas. Maka *dā'i* sebagai pemimpin dalam dakwah harus memberi pengertian kepada masyarakat bahwa tugas dakwah merupakan *farḍu 'm* (kewajiban individu) bagi setiap muslim. Oleh sebab itu, proses pengkaderan *dā'i* merupakan ujung tombak keberhasilan Islam. Untuk itulah, sebagai pemimpin dakwah, seorang *dā'i* harus dibina secara intensif agar dapat memahami Islam dengan baik serta memiliki akhlak yang mulia.

DDII merupakan buah perjuangan Mohammad Natsir yang telah menyebar ke sebahagian besar provinsi di Indonesia, termasuk di Aceh. Untuk dapat memahami implementasi pemikiran Mohammad Natsir di DDII Aceh diperlukan beberapa kajian yang meliputi sejarah dan perkembangan, program serta aktifitas dakwah DDII Aceh yang akan dijabarkan sebagai berikut.

A. Sejarah dan Perkembangan DDII Provinsi Aceh

DDII Aceh pertama sekali dibentuk pada bulan Mei 1991 di rumah Abdur Rani Rasyidi (Kuta Alam). Pembentukan cabang DDII di Provinsi Aceh merupakan inisiatif Mohammad Natsir, mengingat Provinsi Aceh merupakan daerah yang lekat dengan nuansa keislaman, sehingga dapat menunjang pelaksanaan dakwah Islam di Indonesia. Pembentukan DDII di Provinsi Aceh pada saat itu dihadiri dan diwakili oleh Husein Umar sebagai utusan dari DDII Pusat, di Jakarta. Saat itu Mohammad Natsir tidak dapat ke Provinsi Aceh karena dalam keadaan sakit dan kondisi fisiknya yang mulai melemah. Pertemuan tersebut menetapkan Ali Sabi sebagai ketua perdana dan Muhammad Yus sebagai sekretarisnya, yang kemudian dilantik oleh Mohammad Natsir di Jakarta.³³

Terhitung dari kelahiran pertamanya, DDII Provinsi Aceh berturut-turut dipimpin oleh Ali Sabi dalam masa dua periode (1991-1996) dan kemudian beralih ke tangan Muhammad Yus selama dua periode berikutnya (1997-2002). Estafet kepengurusan DDII Provinsi Aceh berikutnya dikendalikan oleh Muhammad AR pada periode 2003-2006. Saat ini (periode 2007-2011) kepemimpinan DDII Provinsi Aceh berada di tangan Hasanuddin Yusuf Adan.³⁴

Adapun dasar peraturan yang dilaksanakan oleh DDII Provinsi Aceh periode ini (2007-2011) merujuk kepada Anggaran Dasar Yayasan DDII Pusat. Oleh karena

³³Hasil wawancara dengan Ali Sabi, mantan ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia provinsi Aceh, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010 di Banda Aceh.

³⁴*Profil Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Aceh: Dewan Dakwah NAD, 2008), 1.

itu, berkaitan dengan visi, misi, program serta aktifitas yang dikembangkan oleh DDII Provinsi Aceh tidak jauh berbeda dengan yang ditetapkan pusat. Demikian pula dengan kebijakan yang ada di DDII tingkat kabupaten/kota yang merupakan perpanjangan tangan dari kepengurusan DDII Aceh tingkat provinsi. Hanya saja, ada penekanan dalam program DDII Aceh berupa percepatan pelaksanaan Islam secara kafah dengan membangun jaringan kemitraan bersama Dinas Syari'at Islam dan lembaga terkait lainnya.³⁵

DDII Provinsi Aceh mempunyai visi untuk “mewujudkan tatanan kehidupan yang Islami dengan menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah di Indonesia berasaskan Islam, taqwa dan keridhaan Allah.” Berdasarkan visi di atas, maka disusun misi DDII Provinsi Aceh yaitu sebagai berikut.

1. Menanamkan *aqḍah ṣaḥīḥah* (akidah yang benar).
2. Menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al Qur-'ān dan Sunnah dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang Islami.
3. Membendung pemurtadan, *ghazwu al-fikri* (perang pemikiran) dan *al-ḥarakah al-haddamah* (gerakan yang merusakkan).
4. Menyiapkan *du'āt* untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan.
5. Menyediakan dan meningkatkan sarana untuk peningkatan kualitas dakwah.
6. Membina dan meningkatkan kemandirian umat.
7. Menyadarkan umat akan kewajiban dakwah.
8. Mengembangkan jaringan kerjasama dakwah dan ekonomi serta koordinasi ke arah realisasi amal *jama'ī*.
9. Membangun solidaritas Islam Internasional dalam rangka turut serta mendukung terciptanya perdamaian dunia.³⁶

Berdasarkan visi dan misi DDII di atas dapat dipahami bahwa keberadaan DDII Aceh saat ini adalah dalam rangka mengupayakan percepatan pelaksanaan Islam secara kafah dengan cara meningkatkan mutu dakwah di Aceh. Di sisi lain, DDII Provinsi Aceh juga ingin memperluas ruang geraknya sehingga lebih maksimal dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang islami dengan membangun jaringan kemitraan bersama Dinas Syari'at Islam serta lembaga terkait lainnya.

Program yang ditetapkan oleh DDII Aceh saat ini ada pula yang agak berbeda dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Mohammad Natsir ketika memimpin DDII. Pada masa Mohammad Natsir, DDII lebih bersikap independen dari pemerintah. Sebaliknya, DDII Aceh pada saat ini cenderung membina 'keakraban' dengan pemerintah. Hal tersebut terlihat dengan adanya program 'memperkokoh

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

silaturahmi dengan pihak Pemda Provinsi Aceh.’ Namun demikian program yang ditetapkan oleh DDII Aceh tentulah dimaksudkan dalam rangka memajukan dakwah di Aceh. Dapat dipahami bahwa para penerus Mohammad Natsir di DDII, khususnya di Aceh tentunya memiliki alasan tersendiri dalam membuat setiap kebijakan yang dianggap strategis ketika berhadapan dengan pemerintah.

Program kerja tersebut di atas ada yang telah diaplikasikan dalam berbagai aktifitas oleh DDII Provinsi Aceh, tetapi ada pula yang sampai saat ini masih terkendala dalam pelaksanaannya. Di antara yang menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan program tersebut di atas adalah karena keterbatasan dana dan kurangnya komitmen sebagian besar pengurus DDII yang mau bekerja. Hal ini disebabkan oleh kesibukan pengurus dengan aktifitas pribadi mereka.³⁷ Namun demikian, pada periode 2007-2011 DDII Provinsi Aceh telah berhasil melaksanakan dua macam aktifitas utama DDII, yaitu dengan melaksanakan pembinaan dan pembelaan terhadap Islam.³⁸

Secara umum, metode dakwah yang dijalankan DDII Provinsi Aceh tidak hanya dengan lidah (*al-lisān*) atau tulisan-tulisan (*bi al-kitābah*) di berbagai media saja, tapi juga diaplikasikan dengan kepribadian mulia secara nyata (*bi al- ḥāl*). Adapun uraian tentang metode dan objek dakwah DDII Aceh adalah sebagai berikut.

Dakwah yang diaplikasikan oleh Mohammad Natsir mencakup berbagai bidang, yaitu politik, sosial, pendidikan dan ekonomi. Namun bila ditinjau dari aktifitas dan wacana dakwahnya, maka bentuk dakwah DDII Provinsi Aceh lebih cenderung mengarah ke politik dan pendidikan, walaupun dalam aplikasinya belum dapat dicapai secara nyata, misalnya dengan membangun lembaga pendidikan Islam. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki DDII Provinsi Aceh. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan bentuk dakwah yang diaplikasikan oleh DDII Aceh.

B. Hambatan dan strategi

Dalam berbagai bidang kehidupan, selalu ditemukan tantangan atau hambatan. Demikian pula halnya dalam aktifitas dakwah DDII Aceh. Secara umum

³⁷TOR (*Term Of Reference*) Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan DDII Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, <http://www.ddii.acehprov.go.id>, diakses tanggal 19 April 2010.

³⁸Hasil wawancara penulis dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Aceh, tanggal 28 Agustus 2010 di Banda Aceh.

hambatan dakwah DDII Aceh dapat dibagi kepada dua, yaitu hambatan yang berasal dari dalam (internal) dan hambatan yang berasal dari luar (eksternal) organisasi.

1. Hambatan internal

a. Kurangnya komitmen dan keaktifan pengurus

Kurangnya komitmen dan keaktifan pengurus merupakan persoalan yang dihadapi oleh DDII Aceh pada periode ini. Kepengurusan DDII Aceh yang telah dibentuk di tingkat provinsi serta di kabupaten/kota tidak semuanya aktif. Pada tataran individu kader, DDII Aceh juga menghadapi persoalan, di antaranya kesibukan pengurus akibat rangkap jabatan serta komitmen, kapasitas dan minat mereka bergabung dengan DDII yang masih menjadi tanda tanya.³⁹ Kondisi tersebut di atas disebabkan karena kesibukan masing-masing pengurus harian DDII Aceh, yang sebahagian besar dari mereka berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program yang telah disusun oleh Pengurus Wilayah DDII Aceh, sehingga sebahagian dari program DDII Aceh mengalami penundaan, bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya, baik yang berhubungan dengan program jangka pendek, program jangka menengah, program jangka panjang, program internal maupun program eksternal DDII. Kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh DDII tingkat provinsi, namun juga di kabupaten.⁴⁰

Berdasarkan masalah di atas, DDII Aceh mengharapkan kepada pengurus harian yang selama ini dinilai kurang aktif untuk lebih ikhlas, serius dan bersemangat agar berpartisipasi dalam setiap aktifitas yang dilaksanakan oleh DDII Aceh, karena walau bagaimanapun tidak mungkin hanya Ketua Umum dan Sekretaris Umum saja yang aktif bekerja untuk ‘menggarap’ seluruh wilayah dakwah di Provinsi Aceh.⁴¹

b. Keterbatasan dana

Keterbatasan dana juga merupakan penyebab tertundanya pelaksanaan program DDII Aceh. Akibat dari keterbatasan dana ini, banyak dari aktifitas DDII yang tidak dapat berjalan secara maksimal. Keterbatasan dana ini tidak hanya dirasakan oleh DDII tingkat provinsi saja, namun juga di tingkat kabupaten. Selama ini DDII Aceh memang telah menerima bantuan dana dari Pengurus DDII Pusat, sumbangan para donatur, infak pengurus serta dari bantuan Pemerintah Daerah

³⁹TOR (*Term Of Reference*) Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan DDII Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, <http://www.ddii.acehprov.go.id>, diakses tanggal 19 April 2010.

⁴⁰Hasil wawancara penulis dengan Abdullah AR, Ketua Umum ..., tanggal 26 Agustus 2010 di Banda Aceh.

⁴¹Hasil wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan, Ketua Umum ..., tanggal 23 Agustus 2010 di Banda Aceh.

Provinsi Aceh sebagai biaya operasional dakwah DDII, namun dana yang tersedia tetap saja belum cukup untuk seluruh wilayah dakwah yang dilaksanakan DDII.⁴²

Sebagai upaya menyelesaikan persoalan dana tersebut, DDII Provinsi Aceh berusaha untuk melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai penopang dakwah DDII. Upaya tersebut dilaksanakan dengan menyusun program untuk membuka lembaga-lembaga keuangan produktif seperti usaha toko buku, foto copy, biro jasa haji, percetakan spanduk/reklame dan sebagainya di DDII Aceh, yang sampai saat ini belum dapat direalisasikan karena kurangnya tenaga yang berkompeten di bidang bisnis. Di sisi lain, DDII Aceh juga pernah mengelola bantuan yang telah diberikan oleh KOMPAK (Komite Penanggulangan Krisis) Dewan Dakwah Pusat, yaitu berupa modal usaha untuk diaktifkan di beberapa tempat yang berlokasi di Banda Aceh dan Aceh Besar. Di antara modal usaha tersebut meliputi usaha peternakan di Limpok Darussalam, usaha perdagangan di Darussalam, usaha pertukangan di *Gampong* Lambhuk, usaha menjahit di *Gampong* Mibo dan berbagai *home* industri lainnya di beberapa daerah binaan DDII. Namun karena tenaga kader yang kurang memadai khususnya di bidang bisnis, peternakan dan industri, seluruh modal dan badan usaha yang telah dimiliki tersebut akhirnya habis dan mengalami kegagalan. Saat ini, badan usaha yang masih dikelola oleh DDII Provinsi Aceh adalah usaha kios pulsa yang merupakan bantuan dari lembaga Ashila, namun karena hasil keuntungannya sedikit, tetap saja tidak memadai untuk menopang perekonomian DDII Aceh.⁴³

2. Hambatan eksternal

a. Kurangnya dukungan pemerintah

Berdasarkan dialog yang telah dilakukan dengan pemerintah, DDII Provinsi Aceh menilai bahwa selama ini pemerintah terkesan kurang mendukung dan memperhatikan jalannya pelaksanaan syariat Islam yang diterapkan di Provinsi ini. Akibatnya, penerapan qanun syariat Islam yang telah ditetapkan sejak delapan tahun yang lalu pun tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, DDII Provinsi Aceh menghimbau untuk mencapai kelancaran pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh, penguasa perlu memperhatikan dan bekerjasama dengan para *dā'i*

⁴²Hasil wawancara penulis dengan Murdani Amiruddin, Ketua Biro..., tanggal 20 Agustus 2010 di Banda Aceh.

⁴³Hasil wawancara penulis dengan Said Azhar, Sekretaris Umum..., tanggal 28 Agustus 2010 di Banda Aceh.

dalam rangka memastikan syariat Islam berjalan dengan baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya kerjasama dan partisipasi yang serius dari pemerintah, pelaksanaan syariat Islam akan sulit dijalankan dan pada gilirannya, proses penerapan syariat Islam yang kini sedang gencar dilaksanakan di Provinsi Aceh akan terancam gagal. Dengan demikian, untuk memastikan agar syariat Islam berjalan lancar di Provinsi Aceh, maka DDII mengharapkan agar pemerintah lebih mengedepankan upaya-upaya pemantapan akidah dan akhlak sebagai langkah ‘pembumian’ syariat Islam di Aceh.⁴⁴

b. Kristenisasi

Masalah kristenisasi, pemurtadan, pedangkalan akidah umat adalah hambatan yang dihadapi oleh Pengurus Daerah DDII Aceh, khususnya bagi DDII Kabupaten Singkil, DDII Kabupaten Subulussalam dan DDII Kabupaten Kotacane. Menurut penjelasan ketua Umum DDII Kabupaten Singkil, pihak Nasrani mengembangkan misi kristenisasi tidak semata-mata melalui gereja, tetapi juga melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan masyarakat. Mereka mampu memasukkan dana dari sumber luar negeri dengan mengatasnamakan pembangunan sehingga tidak dilarang pemerintah. Di antara cara yang mereka lakukan adalah dengan menyusup ke lembaga pemerintahan di semua bidang, baik di tingkat daerah sampai ke tingkat desa, memberi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat, pengobatan gratis, modal usaha serta menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu sehingga menimbulkan ‘hutang budi’ antara mereka dan masyarakat yang menerima bantuan. Di samping itu, pihak Nasrani juga mulai ‘berani’ membuka tempat ibadah dan mendirikan gereja-gereja illegal.⁴⁵

C. Analisis Kritis

Setelah melakukan penelaahan, penulis menemukan perbandingan antara pemikiran dakwah Mohammad Natsir dengan praktek dakwah yang diaplikasikan DDII Aceh. Secara teoritis, pemikiran dakwah Mohammad Natsir telah berusaha diterapkan oleh DDII Aceh. Hal tersebut dapat dilihat dari semua aktifitas DDII Aceh yang sesuai dengan AD/ART, *Khittah Dakwah* dan *Shibghah Dakwah* yang telah ditetapkan oleh DDII Pusat sebagai buah perjuangan Mohammad Natsir. Di sisi

⁴⁴Tim redaksi, “Pemerintah Aceh Diminta Perhatikan Tugas Para *Da’i*,” dalam *Surat Kabar Serambi Indonesia* (Aceh: Rabu, 2 April 2008), 4.

⁴⁵Hasil wawancara penulis dengan Abdul Mukhri, Wakil Ketua ..., tanggal 29 Januari 2011 di Banda Aceh.

lain, implementasi pemikiran dakwah Mohammad Natsir di DDII Aceh juga dapat dilihat dari tujuan dakwah, bentuk dakwah, metode dakwah, objek dakwah, karakteristik kepemimpinan, sudut pandang serta penetapan program yang dijalankan DDII Aceh memiliki kesamaan dengan pemikiran dan aktifitas Mohammad Natsir di DDII semasa hidupnya, yaitu menjadikan dakwah sebagai idiologi dalam rangka memberlakukan syariat Islam dan peningkatan mutu dakwah. Namun demikian, terdapat pula perbedaan dalam kebijakan yang diterapkan oleh DDII Aceh pada periode ini, khususnya tentang sikap DDII Aceh dalam menghadapi pemerintah.

1. Kelebihan DDII Aceh

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang merupakan kelebihan DDII Aceh. Kelebihan tersebut dapat ditinjau dari:

- a. Konsolidasi DDII yang telah tersebar di Provinsi Aceh. Penyebaran ini telah meluas sampai ke seluruh kabupaten dan kota di Aceh.
- b. Sumber daya manusia yang berkualitas, di mana kader DDII Aceh terdiri dari orang-orang yang terpelajar dan berpendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam SK kepengurusan, di mana sebahagian besar para pengurus harian DDII Aceh adalah lulusan S1, S2 bahkan S3.
- c. Membina hubungan baik dengan segala pihak.
- d. Mengaplikasikan berbagai macam metode dakwah.
- e. Berupaya melakukan pembendungan kristenisasi di Aceh.
- f. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.

2. Kekurangan

- a. Keterlibatan kader yang dinilai kurang fokus pada aktifitas dakwah

Amrullah Ahmad mengemukakan bahwa terbentuknya lembaga dakwah berangkat dari kesadaran individual untuk melaksanakan *tablīgh* yang berkembang menjadi kesadaran kolektif untuk melaksanakan dakwah dalam suatu sistem tertentu dalam lembaga dakwah. Profesionalisme lembaga dakwah sangat tergantung pada keterlibatan para *dā'i* dalam mengelola sistem dakwah di lembaga tersebut bukan sebagai pekerjaan sampingan, namun sebagai aktifitas utama, sehingga seluruh keterampilan dan intelektualitas yang dimiliki dapat dikerahkan untuk untuk

memfungsikan sistem dakwah tersebut.⁴⁶ Berangkat dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kunci keberhasilan dakwah Mohammad Natsir terletak pada keseriusan dan ketekunannya dalam dakwah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan dakwah Mohammad Natsir yang dapat dicapai karena kesungguhan serta kesinambungan dalam melaksanakan dakwah Islam sampai akhir hayatnya.

Sebaliknya, dakwah belum bersifat profesional bila keterlibatan *dā'i* dalam mengelola organisasi dakwah adalah sebagai pekerjaan sampingan sehingga tidak ada konsistensi dalam mengamati permasalahan, menyusun program pemecahan, melaksanakan dalam kenyataan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Sehingga untuk mencari sistem informasi dalam lembaga-lembaga dakwah misalnya saja, peta dakwah belum dapat dijumpai karena memang tidak ada yang menggarap secara serius sistem informasi tersebut.⁴⁷

Hal inilah yang agaknya dihadapi oleh DDII Aceh, di mana sebahagian program tertunda bahkan mengalami kegagalan karena masing-masing pengurus harian memiliki kesibukan, tanggung jawab dan aktifitas pribadi, selain mengelola dakwah di DDII Aceh. Kesibukan pengurus akibat rangkap aktifitas ini menyebabkan kerja dakwah DDII Aceh menjadi kurang maksimal. Sementara itu, bila pelatihan dan evaluasi dakwah telah selesai dilakukan, itu tidak berarti bahwa seluruh kegiatan selesai. Sebab, penyelenggara pelatihan dakwah masih dituntut untuk 'mendampingi' kader sampai mereka berhasil menerapkan hal-hal yang diperoleh selama latihan ke tengah-tengah masyarakat dengan mengadakan *follow up*. Hal inilah yang agaknya kurang diaplikasikan oleh DDII Aceh. Kurangnya *follow up* ditandai dengan kurangnya pembinaan serta pengawasan yang intensif terhadap seluruh kader setelah *daurah* dilaksanakan. Di samping itu, DDII Aceh juga dinilai belum optimal dalam membuat *data base* kader pasca *daurah* secara lebih lengkap dan teratur. Padahal, upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah kader DDII Aceh secara keseluruhan, baik jumlah kader yang aktif maupun jumlah kader yang kurang aktif agar lebih mudah dalam memantau dan mendistribusikan *dā'i* ke depan.

Banyak teknik yang dapat dipakai untuk melakukan *follow up*. Aep Kusnawan dan Aep Sy Firdaus mengemukakan, di antara teknik yang dapat

⁴⁶Amrullah Achmad, "Dakwah Islam dan Perubahan Sosial Suatu Kerangka Pendekatan dan Permasalahan," dalam Amrullah Achmad (ed), *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial Seminar dan Diskusi* (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), 8.

⁴⁷Amrullah Achmad, "Dakwah Islam ..., 8.

dilaksanakan adalah dengan mengadakan pertemuan berkala alumni pelatihan, kunjungan antar alumni, surat-menyurat dan menerbitkan bahan bacaan tentang perkembangan alumni pelatihan.⁴⁸

b. Kurang memaksimalkan dakwah ekonomi

Pengembangan ekonomi diperlukan dalam sebuah organisasi karena dalam konteks lembaga dakwah, kemandirian lembaga merupakan hal yang penting karena dapat menopang aktifitas dakwah. Hal inilah yang dilaksanakan oleh Mohammad Natsir dalam DDII. Semasa hidupnya, ia melakukan berbagai inovasi dalam upaya pengembangan perekonomian DDII yang dipimpinnya ke depan. Di antara yang telah dilaksanakannya adalah dengan mendirikan berbagai instrument yang bersifat bisnis di DDII Pusat yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai pemenuhan biaya operasional dakwah DDII baik secara internal maupun eksternal. Adapun hasil yang dapat dicapai dari kerja keras tersebut adalah kemandirian DDII Pusat dari segi finansial, sehingga lebih mudah dalam melaksanakan segala kreativitas dakwah. Hal inilah yang perlu ditingkatkan oleh DDII Aceh mengingat DDII Aceh mengalami kekurangan dana operasional dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

Anwar sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Fauzi mengemukakan bahwa pendanaan dalam lembaga memiliki empat permasalahan yang dihadapi, yaitu: kemampuan manajemen, peningkatan kualitas, kesinambungan dan akuntabilitas.⁴⁹ Berkenaan dengan hal tersebut, Manfred Oepen menyebutkan bahwa permasalahan dana dalam lembaga dapat diatasi dengan cara:

- (1) mengadopsi manajemen modern;
- (2) membuat wirausaha;
- (3) melakukan pelatihan perusahaan;
- (4) membuat *network* ekonomi;
- (5) teknologi tepat guna, perkoperasian dan pengembangan industri kecil yang dapat meningkatkan pendapatan.⁵⁰

Berdasarkan pendapat di atas, upaya pengembangan perekonomian yang agaknya belum optimal dilaksanakan oleh DDII Aceh adalah :

⁴⁸Aep Kusnawan dan Aep Sy Firdaus, *Manajemen Pelatihan Dakwah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 220.

⁴⁹Anwar, dalam Ahmad Fauzi, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Mengembangkan Dana dan Sumber Dana di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo," dalam *Jurnal Pendidikan Islam Nizamia*, Volume 10, Nomor 1 (Surabaya: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2007), 3.

⁵⁰Manfred Oepen, dalam Ahmad Fauzi, "Penerapan Fungsi..., 3.

IMPLEMENTASI PEMIKIRAN DAKWAH MOHAMMAD NATSIR

- (1) Keseriusan dalam mengelola seluruh sumber daya organisasi yang ada, baik yang bersifat harta (lahan dan hewan ternak) maupun modal usaha (hibah dana).
- (2) Peningkatan keterampilan kader dalam mengelola bisnis praktis yang dapat menopang perekonomian organisasi.
- (3) Penguatan jaringan dan penguatan kesamaan wawasan/visi dan misi antara DDII Aceh dengan masyarakat serta lembaga-lembaga ekonomi terkait lain khususnya di bidang permodalan (*net working*) yang dinilai produktif, seperti bank, toko buku, operator seluler dan lain sebagainya. Kerjasama ini dapat berupa investasi atau permintaan tenaga instruktur untuk mengisi pelatihan yang diadakan oleh DDII Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi dan bisnis di DDII Aceh.
- (4) Pendampingan yang intensif terhadap badan usaha yang telah dikembangkan.

Sikap independen dan kemandirian inilah yang agaknya menjadikan DDII pada masa kepemimpinan Mohammad Natsir menjadi lembaga yang eksklusif dan disegani, sehingga menjadi salah satu dasar keberhasilan Mohammad Natsir dalam mengembangkan dakwahnya.

Bila dibandingkan dengan kondisi tersebut, DDII Aceh agaknya mengambil sikap yang berbeda dalam berhadapan dengan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari sikap DDII Aceh yang mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah dalam setiap program dan aktifitasnya, baik yang bersifat moril maupun materi (dana). Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dinilai bahwa kepemimpinan di DDII Provinsi Aceh saat ini agaknya telah mengambil sikap yang berbeda dari Mohammad Natsir, khususnya ketika lembaga ini berhadapan dengan pemerintah. Perubahan orientasi DDII yang awalnya independen menjadi 'bermitra' dengan pemerintah agaknya disebabkan oleh iklim perpolitikan Indonesia yang saat ini lebih terbuka dan 'bersahabat' dengan organisasi keislaman sehingga mempengaruhi perubahan orientasi politis DDII ketika berhadapan dengan pemerintah, dari sikap yang 'keras' pada masa Mohammad Natsir menjadi 'moderat' pada masa kepemimpinan setelahnya, khususnya di DDII Aceh.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sepeninggal Mohammad Natsir, DDII Aceh terus berkiprah dalam menyebarkan ajaran Islam, sebagai upaya meningkatkan mutu dakwah dalam rangka percepatan pelaksanaan syariat Islam

Raihan

secara kafah di Aceh melalui dua macam aktifitas utama DDII, yaitu dengan melaksanakan pembinaan dan pembelaan terhadap Islam. Walaupun timbul kesan adanya perubahan dalam kebijakan DDII Aceh ketika berhadapan dengan pemerintah yang awalnya ‘keras’ menjadi ‘lunak,’ sehingga dapat dikatakan bahwa penerusnya memang tidak ‘sehebat Natsir.’ Namun demikian, mereka telah berusaha keras dalam memajukan lembaga dakwah tersebut ke depan. Dapat dipahami bahwa para penerusnya di DDII Aceh tentunya memiliki alasan tersendiri dalam membuat setiap kebijakan yang dianggap strategis ketika berhadapan dengan pemerintah. Dengan demikian, di balik kelebihan dan kekurangannya, DDII Aceh telah berupaya keras untuk ‘mengeliat bangkit dari keterpurukan’ setelah peristiwa konflik yang berkepanjangan dan bencana tsunami yang melanda Aceh. DDII Aceh bekerjasama membangun jaringan kemitraan bersama Dinas Syari‘at Islam beserta segenap aktifitas dakwah dan lembaga terkait lainnya untuk memasyarakatkan dakwah sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing umat, khususnya di Aceh.

C. Penutup

Mohammad Natsir memahami dakwah tidak hanya bermakna *tablīgh*, namun merealisasikan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya; dengan menempatkan dakwah politik, dakwah pendidikan dan dakwah ekonomi sebagai prioritas.

Berangkat dari kinerja DDII Provinsi Aceh yang terkesan kurang produktif disebabkan karena keterlibatan sebahagian pengurus yang kurang fokus pada aktifitas dakwah, karena keterlibatan kader dalam mengelola DDII adalah sebagai ‘pekerjaan sambilan’ karena masing-masing pengurus harian memiliki kesibukan, tanggung jawab dan aktifitas pribadi, selain mengelola dakwah di DDII Aceh. Kesibukan pengurus akibat rangkap aktifitas ini ternyata menyebabkan kerja dakwah DDII Aceh menjadi kurang maksimal, sehingga kurang konsisten dalam mengamati permasalahan, menyusun program pemecahan, melaksanakan program dalam kenyataan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal inilah yang agaknya menyebabkan sebahagian program DDII Aceh tertunda bahkan mengalami kegagalan. Di samping itu, DDII Aceh mengalami kekurangan dana operasional dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi dari Buku dan Karya Ilmiah Lain

- Abdullah. *Wawasan Dakwah Kajian Epistemologi, Konsepsi Dan Aplikasi Dakwah*. Medan: IAIN Press, 2002.
- Aep Kusnawan dan Aep Sy Firdaus. *Manajemen Pelatihan Dakwah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ahmad Fauzi. "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Mengembangkan Dana dan Sumber Dana di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo," *Jurnal Pendidikan Islam Nizamia*. Volume 10, Nomor 1, Surabaya: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2007.
- Ahmad Tirmidzi. "Asing di Negeri Sendiri Terkenal di Luar Negeri," *Majalah Al-Mujtama Edisi Seabad Mohammad Natsir*. Jakarta: 2008.
- _____. "Membela Palestina," *Majalah Al-Mujtama' Edisi Seabad Mohammad Natsir*. Jakarta: 2008.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: t. tp, 1984.
- Al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.
- Alwahidi Iyas. *Manajemen Dakwah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Amien Rais, M. *Hubungan Antara Politik dan Dakwah, Berguru Kepada M. Natsir*. Bandung: Mujahid Press, 2004.
- Amrullah Achmad. (ed.). *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial Seminar dan Diskusi*. Yogyakarta: Prima Duta, 1983.
- _____. "Mohammad Natsir Muslim Teolog-Intelektual-Ideo-Praxis dalam Dakwah Islam," dalam Lukman Hakim (ed.). *100 Tahun Mohammad Natsir Berdamai Dengan Sejarah*. Jakarta: Republika, 2008.
- Andy Sulistiyanto. "Mujahid Dakwah Yang Tak Kenal Lelah," *Majalah Sabili Edisi Khusus 100 Tahun M. Natsir*, Jakarta: 2008.
- Anhar Gonggong. "M. Natsir dalam Sejarah NKRI: Pergulatan Mencari Demokrasi di Tengah Krisis (Sebuah Pengantar)," dalam Waluyo, *Dari 'Pemberontak' Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Anwar Harjono dkk. *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Raihan

- Arief Hisbullah Sualman. "Muhammad Natsir (1980-1993): His Role In The Development Of Islamic Dakwah In Indonesia," *Tesis*. Kuala Lumpur: Faculty of Islamic Revealed Knowledge And Human Science, IIUM, 1995.
- Arnold, Thomas W. *Sejarah Dakwah Islam*, terj. Nawawi Rambe. Jakarta: Widjaya, 1979
- Asna Husein. "Philosophical and Sociological Aspects of Dakwah : A Study of Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia," *Disertasi*. Amerika Serikat: Columbia University, 1998.
- Burhan Bungin (ed.). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Dzulfikriddin, M. *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia*. Bandung: Mizan, 2010.
- Ernita Dewi. *Menggagas Kriteria Pamimpin Ideal*. Yogyakarta: AK Group Bekerja Sama dengan Ar-Raniry Press, 2004.
- Hamzah Yaqub. *Publistik Islam*. Bandung: Diponegoro, 1981.
- Hadari Nawawi. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Iskandar, M. dkk. *Muatan Lokal Ensiklopedia Sejarah Dan Budaya Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Lentera Abadi, 2009.
- Lukman Hakiem. *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan Biografi DR. Anwar Harjono, S.H.* Jakarta: Media Dakwah , 1993.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Kartini Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mahmud Saleh. "Pemikiran Mohammad Natsir Dan Hasan Al Banna Tentang Negara," *Tesis*. Banda Aceh: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 1995.
- Masdar Hilmy. "Muslims' Approaches To Democracy: Islam And Democracy In Contemporary Indonesia," *Journal Of Indonesian Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007.
- Miftah Thoha. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Munir, M. dan Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006.

IMPLEMENTASI PEMIKIRAN DAKWAH MOHAMMAD NATSIR

- Nana Sujana dan Ibrahim. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Natsir, M. *Capita Selecta 1*. Bandung: Sumur Bandung, 1961.
- _____. *Capita Selecta 2*. Jakarta: Pustaka Pendis, t.t.
- _____. *Fiqhud Dakwah*. Jakarta: Yayasan Capita Selecta, 1996.
- _____. *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Girmukti Pasaka, 1988.
- _____. "Masjid adalah Sarana Pembinaan Umat," *Majalah Suara Masjid*. No. 199, Jakarta: 1991.
- _____. "Dakwah Ilallah," *Majalah Suara Masjid*. No. 202, Jakarta: 1991.
- Nina M. Armando dkk, (ed.). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Nur Syam. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Solo: Ramadhani, 1991.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Rais Alamsjah, ST. *Sepuluh Orang Terbesar Sekarang*. Jakarta: Bintang Mas, 1952.
- RB. Khatib Pahlawan Kayo. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Sulthon, M. "Polemik Soekarno Dan M. Natsir Analisis Terhadap Topik Hubungan Agama Dan Negara," *Tesis*. Banda Aceh: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 1996.
- Sulthon, M. *Desain Ilmu Dakwah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sondang P. Siagian. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Syuhada Bahri. "Dakwah Ilallah, Pesan Terakhir Natsir," *Majalah Al-Mujtama' Edisi Seabad M.Natsir*. Jakarta: 2008.
- Tim Penyunting. "Generator Lapangan Dakwah," dalam *Seri Buku Tempo Natsir: Politik Santun Diantara Dua Rezim*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Thoha Yahya Oemar. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Wijaya, 1971.
- Thohir Luth. *M. Natsir Dakwah Dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Raihan

Veithzal Rivai. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Waluyo. *Dari ‘Pemberontak’ Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir Dan Perjuangan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2009.

Wardi Bachtiar. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 1997.

Zaini Muhtarom. *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*. Jakarta: Al- Amin dan IKFA, 1996.

**WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SYĀFI'İYAH* DAN
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO.2 TAHUN 2002
TENTANG WAKAF UANG**

Mustafa Kamal

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: mustafa.kamal@gmail.com

Abstrak

Studi ini membahas tentang wakaf tunai menurut *Syāfi'iyah* dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fokus masalah yang ingin diteliti adalah terkait dengan pengertian wakaf menurut pandangan *Syāfi'iyah* dan fatwa MUI, hukum wakaf tunai dalam perspektif *Syāfi'iyah* dan dasar pertimbangan MUI dan serta pandangan *Syāfi'iyah* terhadap fatwa wakaf tunai dan pemahamannya terhadap dalil wakaf tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai fatwa MUI hukum wakaf uang adalah diperbolehkan atau sah, sedangkan menurut *Syāfi'iyah* berpendapat tidak boleh (tidak sah). MUI mendasari pertimbangannya pada pendapat ulama *mutaqaddimīn* dari madzhab *Ḥanafī* yang membolehkan wakaf *dirham* dan *dinar* atas dasar *istiṣān bi al-ʿurf*. Selanjutnya menurut *Syāfi'iyah* prinsip benda wakaf harus kekal pokok benda atau zatnya (*baqā' ʿaynih*), yang tidak musnah setelah pemanfaatannya, sementara uang dapat musnah seperti makanan.

Kata kunci: *Wakaf tunai; Madzhab Syāfi'i; Majelis Ulama Indonesia*

Abstract

This study discusses the cash *waqf* according to *Syāfi'iyah* school and the Fatwa according to the Indonesian Ulema Council (MUI). The problem questions that want to be answered through this research are related to the notion of *waqf* in the view *Syāfi'iyah* and MUI, cash *waqf* law in perspective and rationale *Syāfi'iyah* against fatwa MUI and the cash endowments, as well as the understanding of cash *waqf* arguments. From this study, it is found that the MUI fatwa stipulates that charitable money is permissible or legal, while *Syāfi'iyah* assumed that it is illegitimate. MUI underlying consideration in the opinion of *Ḥanafī* schools that allow endowments dirhams and dinars on the basis of *istiṣān bi al-ʿurf*. Furthermore, according to the principle *syāfi'iyah* *waqf* object is to be the principal eternal object or substance (*baqā' ʿaynih*), which is not destroyed after use. Whereas money can be destroyed like food.

Keywords: *Cash waqf; Syāfi'i school; Indonesian Ulema Council*

مستخلص

تتناول هذه الدراسة حول الوقف النقدي وفقا عند افكار العلماء الشافعية وفتاوى مجلس العلماء الإندونيسية (MUI). كانت المسائل التي تبحث هنا حول مفهوم الوقف عند الشافعية و فتاوى مجلس العلماء الإندونيسية ، و حكم الوقف النقدي عند الشافعية و فتاوى مجلس العلماء الإندونيسية وكذلك وجهات النظر و الدلائل المستخدمة

في حكم الوقف النقدي عند الشافعية و فتاوى مجلس العلماء الإندونيسية. وأظهرت النتائج أن فتاوى مجلس العلماء الإندونيسية تبيح الوقف النقدي و اما مذهب الشافعي كان يمنعه. فكان مجلس العلماء الإندونيسية يؤسس فتواه على ما ذهب اليه المذهب الحنفي الذي يسمح الدرهم والدينار للوقف بناء على استحسان بالعرف. وذهبت الشافعية بأن الوقف لا بد أن يكون بقاء عينه بعد الاستخدام ، و في حين أن المال قد تفقد كالطعام.

الكلمات الرئيسية : الوقف النقدي; المذهب الشافعي ; مجلس العلماء الإندونيسية

A. Pendahuluan

Menurut pandangan Islam, wakaf adalah salah satu amal kebaikan yang mempunyai dua dimensi tinjauan dalam bentuk aplikatifnya, yakni suatu perbuatan yang selain berdimensi ‘*ubūdiyyah ilāhiyah* artinya (ibadah kepada Allah) atau jalinan hubungan kehidupan spritualitas juga berfungsi sebagai sarana sosial kemasyarakatan (di bidang sosial ekonomi masyarakat muslim).¹ Keberadaan wakaf dalam hukum Islam termasuk ke dalam salah satu bagian yang sangat penting, karena wakaf adalah salah satu pekerjaan terpuji yang dianjurkan dalam Agama Islam.

Ketetapan dan peran hukum Islam (*fiqh*) dalam proses kelangsungan praktek wakaf, adalah wujud dari tingginya nilai apresiasi yang diberikan Islam terhadap ‘*ubūdiyyah ilāhiyah* yang sekaligus mempunyai nilai sosial tersebut. Lebih dari itu bahkan ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap, dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama, karena wakaf dapat memberdayakan perekonomian umat Islam demi terwujudnya kesejahteraan bersama dalam menjalani kelangsungan hidup sesama.

Sumber utama ajaran wakaf adalah al-Qur’an dan hadis. Walaupun al-Qur’an tidak menyebutkan wakaf secara tegas sebagaimana zakat, tetapi terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang mengandung isyarat tentang wakaf, seperti surat *al-Baqarah* ayat 215, 254, dan 267 serta *Āli ‘Imrān* ayat 92, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab dua dalam pembahasan dasar hukum wakaf.

Para ulama menginterpretasikan ayat-ayat di atas kepada pendermaan harta, yang mereka pahami dari kata “*anfiqū*” dan “*tunfiqūna*” yang merupakan derivasi (*musytaq*) dari kata *infāq* (pemberian atau penyaluran nafkah) yang terdapat pada keempat ayat tersebut yakni memiliki arti “nafkahkanlah” dan “kamu nafkahkan”. Pemaknaan kalimat “*anfiqū*” atau “*tunfiqūna*” kepada pendermaan harta memang

¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Ciputat Pres, 2005), 3-4.

sering dijumpai dalam kitab-kitab *tafsīr*, seperti: *Tafsīr al-Qur'an al-'Adhīm*, karangan Ibn Katsir *Tafsīr al-Manār* karangan Muhammad Rasyid Ridha, dan juga seperti *Tafsīr al-Jalālayn* karangan al-Suyūṭī yang menerangkan *asbāb al-nuzūl* bagi salah satu surat *al-Baqarah* ayat 267 seperti yang tersebut di atas.

Menurut riwayat Ḥākim, Turmudzi, dan Ibn Mājah, “diturunkannya surat *al-Baqarah* ayat 267 tersebut ketika penduduk (masyarakat) *Anshar* dijuluki dengan “*Asḥāb al-Nakhl*” (pemilik kebun kurma). Julukan itu disebutkan karena kebanyakan dari mereka itu sering menghasilkan panen kurma yang berlimpah, tetapi mereka termasuk orang-orang yang tidak suka berbuat kebaikan (bersewakah), maka turunlah ayat 267 tersebut².

Menurut Abdul Halim, kata “*infaq*” yang mengandung arti pendermaan harta itu dapat berupa sedekah atau ‘amal *jariyah*. Sedekah *jariyah* dijumpai dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah³

Keberadaan amalan wakaf sebagai salah satu perbuatan yang dianjurkan agama tidak menjadi permasalahan yang dipertentangkan, tetapi perbedaan pandangan para *fuqahā* terdapat pada nilai-nilai substansi wakaf. Salah satu substansi wakaf adalah terkait dengan jenis *mawqūf* (benda wakaf). Dalam sejumlah literatur kitab fikih ditemukan para *fuqaha* tidak sependapat dalam menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi sebuah *mawqūf* (benda wakaf).

Ulama *Syāfi'iyah* menetapkan salah satu syarat yang harus ada pada *mawqūf* (benda wakaf) adalah “*baqā' 'ayniha*”⁴ (kekal ‘ainnya, dapat terjamin keutuhan bendanya setelah dimanfaatkan). Di samping itu menurut ulama *Syāfi'iyah* juga benda wakaf harus “*dawām al-intifā'*”⁵ (tahan lama). Jadi *mawqūf* (benda wakaf) harus suatu benda yang ada unsur kekal atau keutuhan bendanya dapat terjamin setelah diambil manfaatnya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut ulama *Syāfi'iyah* benda-benda yang tidak terjamin keutuhannya setelah dimanfaatkan dan tidak tahan lama seperti uang, makanan dan lain-lainnya tidak memenuhi syarat benda yang boleh diwakafkan. Karena itu prinsip dasar aturan wakaf dalam konsep *Syāfi'iyah* adalah, keberadaan benda wakaf yang tidak boleh dihibah atau dijual belikan (*lā tuba' wa*

² Al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, juz I (Jakarta: al-Haramain, t.th), 173.

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 4.

⁴ Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtaj*, juz VI (Libanon: Dar al-Fukad, 1997), 271.

⁵ Muhammad Syarbayni, *Mughni al-Muhtaj*, juz III (Libanon: Maktabah Tawfiqiyyah, t.th),

lā tuhab).⁶

Pada sisi lain, terkait dengan ketentuan syarat *mawqūf* (benda wakaf) juga sering dijumpai pendapat Imam atau golongan madzhab yang diluar *Syāfi'iyah* yang berbeda dengan *Syāfi'iyah*. Bagi ulama Hanafiyah *dinar* atau *dirham* (uang) boleh diwakafkan walaupun keutuhannya tidak kekal setelah pemanfaatannya. Hal itu karena kebolehan wakaf uang di sini dipandang sebagai pengecualian atas dasar *istiḥsān bi al-'urf*.⁷ Jadi *dirham* atau uang tunai dapat dijadikan sebagai benda wakaf walaupun tidak kekal 'ain pokok bendanya, karena pertimbangan hal tersebut banyak dipraktekkan dalam masyarakat.

Mewakafkan uang tunai, yang dewasa ini diistilahkan dengan "*cash waqf*" atau dana abadi, yaitu dana-dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana tersebut diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi karena nilai pokok dana abadi tersebut terjamin keutuhannya dari penyusutan, dan dana tersebut diinvestasikan menjadi dana produktif melalui lembaga penjamin *Syari'ah*.⁸

Dari penjelasan gambaran praktek wakaf tunai di atas, ada dua hal yang esensial dalam praktek wakaf tunai tersebut, yaitu:

1. Pada aspek keamanan dari penyusutan, (keutuhan terhadap dana tersebut) menggambarkan kepada sebuah upaya mewujudkan adanya kekekalan pokok nilai uang yang dijadikan sebagai *mawqūf* (benda wakaf) yang diperuntukkan kepada *mawqūf 'alayh* (orang yang menerima wakaf).
2. Pada aspek penginvestasian dana abadi tersebut, (yakni harus produktif), menggambarkan keberadaan sasaran wakaf (*mawqūf 'alayh*) yang benar, jelas, atau tepat sasaran.

Terkait dengan paraktek wakaf tunai, di Asia praktek wakaf uang tunai (uang sebagai *mawqūf*), ide awalnya digagas oleh M.A. Mannan melalui pembentukan sebuah lembaga *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor rill dimobilisasi, dengan memberikan pembiayaan mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syari'ah yang dihimpun dalam Sertifikat Wakaf Tunai

⁶ Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtaj*..., juz V, 104.

⁷ Muhammad Amin al-Syahir, *Radd al-Mukhtār*, juz IV, cet. I (Dār al-fukad, 1979), 363-364.

⁸ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, edisi Revisi ke-4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 37.

kepada masyarakat yang membutuhkan.⁹

Wakaf tunai dalam perkembangannya di Negara Indonesia masih belum berkembang. Wacana tersebut dipicu oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan, dimana keuntungan dirasakan hanya oleh sebagian golongan orang yang menengah ke atas dalam hal perekonomiannya, serta hak-hak kaum miskin (*dhu'afā'*) yang terkesan diabaikan, padahal yang demikian dialami mayoritas masyarakat Indonesia yang kebetulan mayoritasnya beragama Islam.¹⁰ Faktor lainnya juga seperti permintaan sebagian masyarakat agar adanya fatwa resmi terkait dengan praktek wakaf tunai, dengan tujuan menyumbang hartanya dan dapat memperoleh imbalan kebajikan yang tak terbatas melalui aturan perwakafan. Dasar-dasar realitas sosial tersebut dirasaperlu dicarikan solusi. Akhirnya hal ini teratasi sesuai dengan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa: “wakaf tunai hukumnya *jawaz* (dipandang sah dalam Islam)”.¹¹

Selanjutnya terlepas dari implikasi manfaat kepada masyarakat dari aspek pembolehan atau larangan praktek wakaf tunai tersebut, ada sebuah fenomena terhadap praktek perwakafan di Indonesia. Bagi masyarakat yang menganut paham *Syāfi'iyah*, secara prinsipil diketahui bahwa hukum praktek wakaf uang menurut madzhab *Syāfi'iyah* adalah tidak boleh (tidak sah) sebagaimana penjelasan pada syarat benda wakaf di atas. Tetapi dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa hukum wakaf uang adalah *jawāz* (boleh atau dapat dipandang sah dalam Islam). Fatwa ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf dalam perspektif *Syāfi'iyah* (selaku madzhab yang diikuti mayoritas umat Islam di Indonesia).

Dari sejumlah literatur bacaan yang penulis telusuri, pembahasan terkait dengan wakaf tunai tidak menyentuh keberadaan fatwa MUI terhadap wakaf tunai. Karena itu fokus penelitian ini tidak tumpang tindih terhadap kajian atau penelitian yang telah ada sebelumnya.

⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, cet I (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), 150.

¹⁰ Achmad Djazuli, *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet. IV (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), 9-10.

¹¹ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, cet. I (Jakarta: Departemen Agama, 2003), 86.

B. Pembahasan

1. Pengertian Wakaf Tunai Menurut *Fiqh Syāfi'iyah* dan Fatwa MUI

Sebelum lebih jauh membahas banyak hal tentang wakaf tunai, penjelasan seputar pengertian wakaf tunai itu sendiri perlu dipahami. Hal demikian mengingat karena terdapat perbedaan (penambahan kalimat) dalam rumusan pengertian wakaf perspektif MUI, dari dasar rumusan pengertian wakaf perspektif *Syāfi'iyah* yang dipahami dalam masyarakat pada umumnya, lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. Pengertian wakaf menurut ulama *Syāfi'iyah* adalah sebagai berikut:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود¹²

Artinya: “Menahan harta yang memungkinkan diambil manfaat padanya, serta kekal zat-nya (tidak lenyap pokoknya) dengan tidak melakukan tindakan hukum padanya (tidak menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan manfaatnya pada tempat (sasaran) yang ada yang dibolehkan agama.

2. Sedangkan pengertian wakaf menurut fatwa MUI adalah:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، أو أصله بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود¹³

Artinya: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan ‘ain harta atau pokoknya tetap, tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu tempat (sasaran) yang ada yang mubah (tidak haram).”

Sehubungan dengan kedua definisi wakaf tersebut di atas, syarat *jāmi'*¹⁴nya terdapat pada *lafadh māl* (segala macam bentuk harta benda) yang memiliki nilai dalam pandangan agama. Sedangkan syarat *māni'*¹⁵nya terdapat pada *lafadh yumkinu al-intifā' 'ma'a baqā' 'aynih*, yakni walaupun jenis harta benda wakafnya dapat beragam bentuknya, namun harus memiliki sifat: *pertama* dapat bermanfaat dan *kedua* tetap pokoknya setelah dimanfaatkan. Maka dengan demikian secara teknis kedua definisi tersebut jelas terlihat memenuhi ketentuan syarat bagi pembentukan sebuah rumusan pendefinisian terhadap suatu permasalahan.

¹²Muhammad Syarbayni, *Mughni al-Muhtaj*..., 376.

¹³Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 85.

¹⁴*Jami'* artinya adalah sifat mengumumkan yang dapat terdapat dari sebuah pengertian (tidak boleh terbatas kepada sebahagian harta benda saja), jadi sifat *jami'* menjadi salah syarat yang harus ada pada sebuah definisi atau pengertian yang telah ditetapkan. Lihat Syaikh Hasan Darwisy al-Quwaysūniy, *Matan al-Sulam Fi al-Mantiq* (t.tp: Multazam al-Tiba'i wa al-Nasyr, t.th), 20.

¹⁵*Mani'* artinya adalah sifat khusus yang membatasi cakupannya, artinya sebuah pengertian juga harus terdapat padanya keterangan ruang lingkup cakupannya yang membatasi ruang lingkup pemakaian dari pengertian tersebut. Lihat Hasan Darwisy al-Quwaysūniy, *Matan al-Sulam Fi al-Mantiq* (Multazam al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), 20.

WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SYĀFI'İYAH*

Selanjutnya terdapat juga objek kajian lain (sebagian unsur pokok) yang dikandung oleh definisi wakaf tersebut, yang juga harus diteliti agar dapat menemukan substansi pembahasan wakaf yang memiliki hubungannya dengan pengkajian tentang wakaf tunai. Pada dasarnya bila diamati secara utuh pada keseluruhan pengertian tersebut, terdapat empat unsur pokok yang sering diistilahkan dengan rukun wakaf. Penjelasan ini penulis pahami dari penjelasan yang diterangkan oleh Jalaluddin al-Mahalli mengutip dalam kitab *Qalyūbi wa 'amīrah*:

Wakaf semestinya terdiri dari empat unsur pokok, yaitu: *wāqif* (orang yang mewakafkan), *mawqūf* (benda yang diwakafkan), *mawqūf 'alayh* (sasaran wakaf), dan *sighāt waqf* (redaksi wakaf).¹⁶ Di antara empat unsur tersebut, pada aspek *mawqūf* (kebendaan wakaf yang dalam definisi wakaf tersebut di atas diistilahkan dengan “*māl yumkinu al intifa'*”) adalah yang menjadi fokus kajian di sini, hal ini karena objek *mawqūf* tersebut erat hubungannya dengan kajian wakaf tunai (yang juga sebagai salah satu *mawqūf* -nya).

Pada kedua pengertian wakaf (menurut *Syāfi'iyah* dan fatwa MUI) terdapat perbedaan pada rangkaian susunan kalimatnya, yakni dalam definisi wakaf yang dijelaskan oleh MUI ada penambahan kalimat dari dasarnya “*ma'a baqāi' 'aynih*” ditambahkan menjadi “*ma'a baqā' 'aynih aw aslih*” (“*aw aslih*” menjadi keterangan tambahan bagi jenis harta wakaf yang diistilahkan dengan *māl*). Memang terkait dengan pengertian wakaf tersebut, dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa, “menurut pandangan dan pendapat komisi fatwa MUI perlu adanya peninjauan dan penyempurnaan (penambahan) terhadap pengertian wakaf yang telah umum diketahui oleh masyarakat”.¹⁷ Yakni seperti rumusan pengertian yang dijelaskan orang-orang *Syāfi'iyah*. Fenomena ini memang dapat dimaklumi, karena menurut M. Ali Hasan, di negara Indonesia walaupun berkembang bermacam ragam aliran yang memiliki pengaruhnya kepada hal-hal yang berkenaan dengan fikih, tetapi diakui walaupun ada keberagaman aliran tersebut, mayoritas umat Islam di Indonesia mengaku menganut atau bermadzhab kepada paham *Syāfi'iyah*.¹⁸

Jadi maksudnya di sini adalah, pengertian wakaf menurut *Syāfi'iyah* tersebut juga menjadi salah satu alasan atau sebab, lebih cenderungnya ajaran wakaf di Indonesia dipahami oleh masyarakat pada harta benda tetap seperti bangunan masjid,

¹⁶ Jalaluddin al-Mahally, *Qalyūby Wa 'Amirah*, Juz III, 97.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 85.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), VIII.

sekolah, pesantren dan lainnya. Sedangkan ajaran wakaf pada benda bergerak seperti uang tunai atau surat-surat berharga lainnya, dipandang tidak bisa kekal ketika dimanfaatkan.

Dalam keputusan fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang dijelaskan bahwa ketetapan hukum wakaf uang adalah boleh (*jawāz*). Di samping hukum itu dalam fatwa MUI tersebut juga ditegaskan beberapa hal yang berhubungan dengan praktek wakaf uang, yaitu:

1. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy* (*muṣarraf mubāh*)
2. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
3. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, atau termasuk juga surat-surat berharga.¹⁹

Keputusan hukum boleh (*jawāz*) terhadap wakaf uang yang difatwakan oleh MUI tersebut, karena alasan memperhatikan kepada beberapa hal di bawah ini:

1. Pendapat al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, dan hasilnya disalurkan kepada *mawqūf 'alayh* (penerima wakaf).
2. Ulama *mutaqaddimīn* dari madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang *dinar* dan *dirham* sebagai pengecualian atas dasar *istihsān bi al-'urf*, dengan mendasarkannya pada sunnah (*atsar*) Abdullah bin Mas'ud R.A:

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ²⁰

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Terkait dengan pernyataan MUI tentang pendapat ulama *mutaqaddimīn* dari madzhab Hanafi ini, pembolehan hukum praktek wakaf uang tunai karena dasar pertimbangan bahwa hal tersebut sudah umum berlaku dalam masyarakat muslim. Artinya, bahwa praktek wakaf uang telah menjadi bagian dari praktek yang sangat lumrah didapatkan dalam masyarakat (berlaku secara *al-'urf*). Jadi sejauh ini dapat dipahami bahwa, bila kita membandingkan tingkatan praktek wakaf uang dalam masyarakat di Indonesia barangkali belum mencapai pada tingkatan *'amalan al-'urf*. Hal demikian mungkin karena faktor kesadaran masyarakat yang belum dapat disamakan pandangannya sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dahulunya. Bahkan bila dilihat menurut penjelasan Wahbah al-Zuhayli, praktek

¹⁹ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, 86.

²⁰ *Aḥmad Ibn Ḥanbal, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Juz I (Dār Shādir, 1998), 379.

wakaf uang yang telah pernah berlaku secara '*urf*' itu tidak boleh dianggap sah pada suatu tempat, bila kegiatan wakaf uang tersebut tidak berlaku secara '*urf*' dalam masyarakat tersebut.²¹

3. Alasan ketiga yang diperhatikan MUI adalah bahwa pendapat sebagian ulama madzhab *Syāfi'iyah* yakni Abu Tsur yang meriwayatkan dari Imam *Syāfi'i* tentang kebolehan wakaf *dinar* dan *dirham* (uang).

Penjelasan Abu Tsur tentang hukum kebolehan wakaf *dirham* atau *dinar* (uang) tersebut, oleh MUI dikutip dari tulisan al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ḥawā' al-Kabīr*. Namun perlu juga diperhatikan lebih lanjut secara lebih komprehensif terhadap bagian penjelasan al-Mawardi yang lainnya yang berhubungan dengan riwayat Abu Tsur tersebut. Al-Mawardi menegaskan bahwa hukum kebolehan wakaf uang yang diriwayatkan Abu Tsur itu harus dipahami tidak dengan memusnahkan pokoknya ('*ain-nya*) dari *dirham* dan *dinar* tersebut. Lebih jelasnya penjelasan al-Mawardi dapat dilihat dalam rician berikut ini:

وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤجرها لمنافعها الإستهلاكها بأعيانها. فكأنه أراد وقف المنافع
وذلك لم يجوز²²

Artinya: "Riwayat Abu Tsur ini harus dipahami bahwa wakaf *dinar* dan *dirham* dengan cara menyewakannya (mengambil manfaat nya) dengan tidak memusnahkan pokoknya. Dengan demikian seakan yang diwakafkan adalah manfaat nya yang dalam pandangan *Syāfi'iyah* dipandang tidak sah."

Kutipan di atas menjelaskan bahwa wakaf *dirham* dan *dinar* dengan cara menyewakannya (mengambil manfaatnya) dengan tidak memusnahkan pokoknya, oleh sebagian ulama *Syāfi'iyah* tetap dipandang tidak sah, karena itu menurut mereka *dirham* dan *dinar* tidak bisa diwakafkan.

Adapun pandangan sebagian kelompok *Syāfi'iyah* yang mengatakan bahwa *dirham* dan *dinar* dapat disewakan untuk manfaat hiasan, (karena bila boleh disewakan maka mewakafkan juga boleh hukumnya). Pendapat ini dapat ditolak karena satu alasan yang konkrit, yakni karena bila dilihat dari dasar penciptaan *dirham* dan *dinar* tersebut adalah dengan satu tujuan dasar agar dapat dimanfaatkan sebagai alat tukar dalam transaksi masyarakat.²³ Jadi ketika *dirham* itu dimanfaatkan kepada hiasan maka itu dianggap menyalahgunakan manfaatnya.

4. Alasan keempat yang diperhatikan MUI adalah, pandangan dan pendapat

²¹Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VIII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), 162.

²²Al-Mawardi, *al-Hawī al-Kabīr*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 379.

²³Imam al-Nawawy, *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab Li al-Syayrazī*, 247.

Komisi Fatwa MUI kepada perlunya tinjauan ulang atau pengembangan terhadap definisi wakaf yang telah umum dipahami masyarakat.

Pengertian wakaf yang telah makruf dipahami masyarakat adalah sebagaimana yang banyak dijumpai dalam fikih *Syāfi'iyah*, yaitu:

حبس مال يمكن الانتفع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موقوف²⁴

Artinya: Menahan harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan 'ain harta atau pokoknya tetap tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu tempat (sasaran) yang ada yang mubah (tidak haram).

Perlunya kepada pengembangan itu karena dari substansi pengertian tersebut adalah keharusan adanya *ta'bīd* pada pokok zat *mawqūf* (*baqā'* 'aynih. Jadi unsur keabadiannya hanya menekankan pada aspek zat saja tidak termasuk dalamnya sifat benda seperti halnya kekekalan nilai intrinsik pada uang (*baqā' aṣlih*). Maka dengan adanya pengembangan pengertian wakaf ini, diharapkan dapat membuka peluang kepada reinterpretasi pengertian wakaf yang lebih relevan dalam perkembangan perekonomian masyarakat.²⁵

Oleh karena pertimbangan di atas, MUI menambahkan "*aw aṣlih*" (*baqā' aṣlih*) yang berarti pokok harta tetap tidak hilang, penambahan kalimat dalam definisi wakaf tersebut juga agar dapat memahami atau mengartikan keabadian pada aspek sifat barang wakaf. Dengan demikian mewakafkan uang dengan catatan tidak mengurangi nilai pokoknya, hukumnya boleh sesuai dengan pengertian wakaf di atas. Pandangan seperti ini menurut Farid Wadjdi lebih sesuai dengan pandangan sekarang atau mendasarkan kepada konsep wakaf dalam madzhab Mālikiyah, yang memperlebar pengertian wakaf kepada benda bergerak seperti mewakafkan susu sapi dan buah-buahan.²⁶

Sedangkan hukum wakaf uang dalam pandangan *Syāfi'iyah*, secara prinsipnya jelas menyatakan tidak boleh (tidak sah). Walaupun terdapat perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut di kalangan *Syāfi'iyah* terjadi ketika menempatkan *dirham* dan *dinar* pada hukum dapat dipersewakan atau tidak, artinya dalam hal ini terdapat sebagian ulama yang mengatakan *dirham* dan *dinar* boleh disewakan karena itu boleh juga diwakafkan. Jadi pada dasarnya uang dalam

²⁴ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 85.

²⁵ *Ibid.*, 85.

²⁶ Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat*, 88-89.

WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SYĀFI'İYAH*

pandangan *Syāfi'iyah* tidak boleh diwakafkan. Alasannya adalah karena “*mā lā yantafi‘u illā bi al-itlāf la yashih al-waqf*” (sesuatu yang musnah pokonya setelah dimanfaatkan tidak boleh diwakafkan) dan uang akan hilang atau musnah (zat ‘ain-nya) setelah dimanfaatkan seperti makanan.²⁷

Penjelasan di atas terdapat dalam kitab *Rawḍah al-Ṭalibīn* karya al-Nawāwī,²⁸ dan dalam Kitab *al-‘Azizi* karya al-Rāfi‘ī²⁹, bahkan al-Māwardī menegaskan dalam kitabnya *al-Ḥawī al-Kabīr* sebagai berikut:

وقف الدرهم والدنانير لا يجوز وقفها لإستهلاكها، فكان كالطعام.³⁰

Artinya: “Dirham dan dinar tidak boleh diwakafkan karena ia dapat musnah setelah dimanfaatkan seperti halnya pada makanan”

Muhammad Marsufi menjelaskan: “tidak boleh mewakafkan uang (pengganti harga benda wakaf yang hilang), tapi diharuskan kepadanya untuk menggantikan benda wakaf lain yang serupa dengan benda wakaf yang telah hilang, untuk menjaga dan memelihara maksud atau tujuan dasar seorang pewakaf yang mengharapkan pahala yang dihasilkan dapat berkesinambungan dan selama-lamanya, selama benda wakaf masih utuh dan dimanfaatkan *mawqūf ‘alayh*.”³¹

Muhammad al-Ramli membandingkan dengan contoh kasus pada pergadaian. “Apa bila suatu ketika barang gadaian hilang di tangan *murtahin* (orang yang menerima gadaian), maka si *murtahin* dapat menggantikan barang gadaian tersebut dengan mata uang, dan uang tersebut telah sah menjadi pengganti barang gadaian yang hilang tadi dengan tidak perlu mengulangi redaksi akad pergadaian.”³². Namun berbeda hukumnya dengan *mawqūf* (barang wakaf) yang apabila hilang, maka uang tidak dapat dijadikan sebagai pengganti benda wakaf yang hilang, dan harus ada redaksi wakaf yang baru untuk mewakafkan kembali setelah ada penggantinya yang memenuhi syarat.

Ibn Ḥajar al-Haytami juga menjelaskan: “Hanya saja diharuskan pada benda wakaf yang hilang agar digantikan dengan benda wakaf lain yang sejenisnya, karena uang tidak sah diwakafkan. Di samping itu wakaf baru dianggap sah harus mengadakan redaksi wakaf yang baru, ini semua karena alasan yang mendasar

²⁷ Al-Mawardi, *al-Hawī al-Kabīr*, Tahqīq: Mahmud Matraji, Juz IX, 379.

²⁸ Imam al-Nawawī, *Rawḍhah al-Ṭalibīn wa ‘Umdat al-Muḥtāj*, Juz V, 315

²⁹ Abdul Karim Bin Muhammad al-Rāfi‘ī, *al-‘Aziz*, Tahqīq Ali Muhammad Ma‘awwaz, Juz VI, 252.

³⁰ Al-Mawardi, *al-Hawī al-Kabīr*, Tahqīq: Mahmud Matraji, Juz IX, 379.

³¹ Muhammad Marsufi, *Ḥasyiah al-Bujairimī*, Juz III (Dar al- Fukad, t.th), 213.

³² Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, 287.

adalah wakaf mengandung hikmah (tujuan pemilikan pada manfaat) atau faedah dari suatu benda (pokok harta) yang kekal zatnya.³³ (tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan juga tidak boleh dipusakai).

Jadi dengan mendasarkan pada beberapa penjelasan ulama *Syāfi'iyah* di atas, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan wakaf uang, yakni ketika menempatkan *dirham* dan *dinar* pada hukum dapatkan dipersewakan atau tidak, tetapi secara dasar prinsipnya wakaf uang dalam pandangan *Syāfi'iyah* hukumnya tidak boleh. Hal demikian karena alasan yang pertama adalah, *dirham* atau *dinar* pada dasarnya diciptakan bukan untuk tujuan disewakan melainkan sebagai alat tukar dalam berbagai transaksi, maka bila *dirham* dan *dinar* tidak dapat disewakan begitu juga halnya dengan uang tunai. Alasan kedua “*mā lā yantafi‘u illā bi al-itlāf la yashih al-waqf*” (sesuatu yang musnah pokoknya setelah dimanfaatkan tidak boleh diwakafkan) dan uang akan hilang atau musnah (zat ‘*ain*-nya) setelah dimanfaatkan seperti makanan.

A. Dasar-Dasar Pertimbangan *Syāfi'iyah* dan MUI Serta Pemahamannya Terhadap Dalil Wakaf Tunai

1. Dasar-Dasar Pertimbangan *Syāfi'iyah* terhadap Konsekuensi Hukum Wakaf Tunai.

Sebagaimana disebutkan di atas hukum wakaf uang menurut *Syāfi'iyah* adalah tidak dibolehkan (tidak sah). Selanjutnya berapakah jumlah rincian atau apa saja yang menjadi dasar-dasar pertimbangan *Syāfi'iyah* terhadap hukum tersebut, maka dalam hal ini penjelasan yang secara tegas sejauh pengamatan penulis belum dapat dijumpai. Namun secara implisit dapat dipahami bahwa ulama *Syāfi'iyah* mendasarkan pertimbangannya kepada beberapa hal seperti rincian berikut ini:

- a. Prinsip wakaf menurut pandangan *Syāfi'iyah* adalah bahwa yang diserahkan kepada *mawqūf* ‘*alayh* harus berupa manfaat dari barang wakaf (*al-waqf tamlik al-manfa‘ah*).³⁴

Yang menjadi inti dasar pertimbangan *Syāfi'iyah* di sini, barang wakaf merupakan segala sesuatu yang menghasilkan faedah atau manfaat untuk dipergunakan oleh pihak *mawqūf* ‘*alayh*. Jadi dapat dipahami bahwa yang menjadi objek pemanfaatan adalah terdapat pada faedah dan manfaat tersebut, bukan pada

³³Ibnu Hajar AL-Haitamy, *Tuhfah al- Muhtaj*, 104.

³⁴ Imam al-Nawawy, *Kitāb al-Majmū‘ Syarah al-Muhazzab Li al-Syayrazī*, Juz XVI (Maktabah al-Irsyād, t.th), 255.

WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SYĀFI'İYAH*

barang wakafnya. Al-Nawāwī merumuskan prinsip tersebut dalam kitabnya *Rawḍah al-Thalibīn*, dengan ungkapan: “*kullu ‘ain yaḥṣul minhu al-fā'idah aw al-manfa'ah*”³⁵ (sesuatu yang dapat menghasilkan faedah atau manfaat).

Sehubungan dengan prinsip di atas, bentuk benda atau barang wakaf dalam pandangan *Syāfi'iyah* lebih menekankan pada zat (*kullu ‘ain yaḥṣul minhu al-fā'idah*). Artinya ulama *Syāfi'iyah* menganggap sifat dari barang wakaf (*nature*) seperti nilai mata uang, walaupun angka nominalnya dapat dijamin keutuhannya namun ketika dalam pemanfaatannya uang tersebut mesti harus melalui proses pertukaran atau jual beli yang menyebabkan pokok kebendaan uangnya musnah. Pandangan yang seperti ini dijelaskan al-Mawardi, yaitu:

الدرهم والدنانير لا يجوز وقفها لإستهلاكها، فكان كالطعام.³⁶

Artinya: “Dirham dan dinar tidak boleh diwakafkan karena ia dapat musnah setelah dimanfaatkan seperti halnya pada makanan”.

Jadi karena dasar pertimbangan tersebutlah uang dalam pandangan *Syāfi'iyah* tidak boleh diwakafkan.

- b. Dasar pertimbangan *Syāfi'iyah* yang kedua adalah, untuk menjaga dan memelihara maksud atau tujuan dasar si *wāqif*, yang mengharapkan pahala yang dihasilkan dapat berkesinambungan dan selama-lamanya selama benda wakaf masih utuh ketika dimanfaatkan *mawqūf ‘alayh*.³⁷

Keutuhan *mawqūf* adalah pada benda wakaf yang tidak seperti jenis makanan yang setelah pemanfaatannya dapat musnah, menurut pandangan *Syāfi'iyah* bahkan dapat dimaklumi dengan sebab hilangnya (musnahnya *mawqūf*) implikasinya dapat mempengaruhi kepada terhentinya pula pahala yang diharapkan *wāqif*. Jadi sebagaimana penjelasan di atas, status uang adalah dapat musnah melalui proses penukaran atau jual beli seperti halnya makanan.

Jadi sejauh ini dapat disimpulkan bahwa, dasar pertimbangan *Syāfi'iyah* terhadap konsekuensi hukum tidak bolehnya wakaf uang, menjurus kepada dua tinjauan, yaitu: *pertama* aspek *mawqūf* (benda wakaf) yang diserahkan kepada *mawqūf ‘alayh* harus berupa manfaat dari barang wakaf yang kekal zat nya setelah dimanfaatkan, (*al-waqf tamlik al-manfa'ah*). Kedua untuk memelihara maksud atau tujuan dasar si *wāqif*, yang mengharapkan pahala yang dihasilkan dapat berkesinambungan dan selama-lamanya selama benda wakaf masih utuh ketika dimanfaatkan *mawqūf ‘alayh*.

³⁵ Imam al-Nawawy, *Rawdhah al-Thalibin wa ‘Umdat al-Muftīn*, Juz V, 314.

³⁶ al-Mawardi, *al-Hawī al-Kabīr*, Tahqiq: Mahmud Matraji, Juz IX, 379.

³⁷ Muhammad Marsufi, *Hasyiah Al-Bujairimi*, Juz III (Dar al-Fukad, t.th), 213.

2. Dasar-Dasar Pertimbangan MUI Terhadap Konsekuensi Hukum Wakaf Tunai.

Adapun dasar-dasar pertimbangan MUI yang kemudian menjadi faktor atau sebab lahirnya kesimpulan untuk memfatwakan hukum wakaf uang *jawāz* (boleh), sebagaimana dijelaskan dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. MUI melihat bahwa bagi masyarakat umat Islam di Indonesia pada umumnya, terkait dengan pengertian wakaf (termasuk juga tentang benda wakaf) dimana pengetahuan mereka hanya terbatas kepada beberapa pengertian wakaf yang telah makruf.³⁸ Sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.

Adapun beberapa pengertian tersebut adalah:

- 1) Pengertian wakaf yang terdapat dalam fikih *Syāfi'iyah*, yaitu:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود³⁹

Artinya: “Menahan harta yang memungkinkan diambil manfaat padanya, serta kekal zatnya (tidak lenyap pokoknya) dengan tidak melakukan tindakan hukum padanya (tidak menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan manfaatnya pada tempat (sasaran) yang ada yang dibolehkan agama.

Menurut pertimbangan MUI agar pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf dapat berkembang sesuai dengan zaman, (tidak terbatas pemahamannya pada rumusan pengertian wakaf perspektif fiqh *Syāfi'iyah* saja), maka dipandang perlu adanya pengembangan atau tinjauan ulang terhadap definisi wakaf yang telah makruf tersebut. Dalam hal ini kemudian MUI merumuskan pengertian wakaf sebagaimana yang terlihat dalam pembahasan pengertian wakaf menurut fikih *Syāfi'iyah* dan MUI pada bab tiga, dengan mendasarkan kepada keterangan hadis Ibn Umar yang berbunyi *iḥbas aṣlahā wa sabbil tsamaratahā*”⁴⁰

- 2) Pengertian dan ciri benda wakaf yang dipedomani pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengartikan wakaf dengan “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya sesuai dengan ajaran Islam.”⁴¹ Selanjutnya dalam kompilasi itu juga dijelaskan tentang benda yang sah diwakafkan, yaitu: “segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak

³⁸Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 80-83.

³⁹*Ibid.*, 80.

⁴⁰*Ibid.*, 85.

⁴¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 209.

hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.⁴²

- b. Dasar pertimbangan MUI selanjutnya karena melihat bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

Keluwesan dan kemaslahatan besar tersebut adalah “lingkup sasaran pemberi wakaf tunai (*wāqif*) bisa sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa.”⁴³ Hal demikian karena sertifikat wakaf tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan sesuai dengan kemampuan *wāqif*, pecahannya berkisar mulai 10.000.-, 25.000.-, 50.000.- dan seterusnya. Jadi konsep yang seperti ini akan membuka peluang kesempatan untuk berwakaf tidak hanya untuk orang yang memiliki standar perekonomian menengah ke atas saja. Disamping itu uang juga memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam, dalam berbagai aspek pergerakan pembangunan seperti pada kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam.⁴⁴

Dari uraian dasar-dasar pertimbangan MUI tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, keputusan fatwa MUI terhadap kebolehan hukum (*jawāz*) wakaf uang tunai, disamping memiliki dasar pertimbangan dalil *nash*, juga didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang benda wakaf. Selanjutnya dasar pertimbangan MUI juga terdapat pada aspek kemaslahatan, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, di samping kemudahannya dalam menjaring *wāqif*.

Selanjutnya, bila diperhatikan dasar pertimbangan kedua-duanya (*Syāfi'iyah* dan MUI), walaupun sama-sama memiliki dasarnya namun terdapat perbedaan aspek penekanannya. *Syāfi'iyah* melarang wakaf tunai karena didorong oleh kehati-hatiannya dalam menjaga eksistensi *mawqūf* (harus kekal ‘*ain*-nya setelah dimanfaatkan), yang mempengaruhi implikasinya pada imbalan pahala akhirat bagi *wāqif*. Sedangkan MUI lebih melihat pada aspek kemaslahatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat Islam, yakni cita-cita kemapanan perekonomian masyarakat Islam melalui amal sosial wakaf uang.

⁴² *Ibid.*, 209.

⁴³ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Cet. IV (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 26.

⁴⁴ *Ibid.*, 3.

C. Penutup

Pengertian wakaf baik dilihat dalam perspektif *Syāfi'iyah* ataupun MUI, secara garis besar keduanya tetap memiliki kesamaan (ruang lingkup pembahasannya dapat merangkum kepada semua unsur wakaf). Namun demikian dari rumusan tersebut pada pemahaman substansinya terdapat perbedaan karena terdapat penambahan kalimat “*aw ma'a baqā' aṣliḥ*”, artinya kalimat tersebut menggambarkan prinsip kekal aspek *mawqūf* setelah dimanfaatkan tidak hanya menekankan pada zat benda wakaf saja (*baqā' 'ayniḥ*) sebagaimana dalam prinsip *Syāfi'iyah*, tetapi juga membenarkan adanya sifat kekal pada sifat barang wakaf seperti tetapnya terjaga angka nilai uang yang diwakafkan.

Hukum wakaf uang menurut fatwa MUI boleh (*jawaz*) atau sah. Penetapan hukum sah wakaf tunai tersebut karena memang terdapat beberapa dasar pertimbangan yang dianggap MUI sangat esensial, yaitu: *pertama* ulama *mutaqaddimīn* dari golongan Hanafiyah dan Imam al-Zuhri pernah membolehkan wakaf uang ketika kebanyakan masyarakat lumrah mempraktekkan wakaf uang tersebut. Kedua, wakaf uang dipandang memiliki potensi yang tinggi dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat, di samping itu juga memudahkan *wāqif* untuk melakukan wakaf dengan harapan akan banyak umat Islam yang ingin berwakaf, karena praktek wakaf uang dapat dilakukan walau dalam jumlah minimal 10.000 misalnya. Sedangkan golongan *Syāfi'iyah* memandang uang adalah benda yang hanya dapat dijadikan sebagai alat tukar saja yang dapat punah setelah pemanfaatannya.

MUI memahami dasar hadis Ibn Umar yang mengatakan: “*iḥbas aṣlahā wa sabbil tsamaratahā*” adalah dalil yang dapat dijadikan landasan hukum bolehnya mewakafkan uang, karena kata “*aṣlahā*” adalah dapat diartikan juga kepada pokok barang wakaf bergerak yang bisa juga dalam bentuk sifat barang wakaf yang kekal. Sementara *Syāfi'iyah* dalam rumusan pengertian wakafnya tidak terdapat kalimat “*aṣlahā*”, memahami kalimat “*aṣl*” tersebut adalah pokok benda yang tidak termasuk dalam bentuk sifat barang wakaf. Karena demikian, mereka menekankan pada “*baqā' 'ayniḥā*” (benda wakaf yang dapat kekal zat wujudnya).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Damanhuri, Aḥmad. *Īdāḥ al-Mubham min Ma'ānī al-Sulam*, Jeddah: al-Haramain: t.th.

WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SYĀFI'ĪYAH*

- Al-Asqalani, Ibn Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anwar, Desi. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, cet. 1. Surabaya: Amelia, 2002.
- Basri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, cet. I. Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, edisi revisi ke-4. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. IV. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Siasah (Implementasi kemeslahatan Umat)*, cet. I. Bogor: Kencana, 2003.
- Djazuli, Achmad & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet. IV. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Konferehensif*, cet. I, Jakarta: Zikra Hakim, 2004.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwaqafan di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Ciputat Pres, 2005.
- Al-Haytamī, Ibn Ḥajar. *Tuhfah al-Muḥṭāj*, Juz. VI. Libanon: Darul Fukad, 1997.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, juz I. T.tp: Dār Shādir, 1998.
- Ibn Katsīr, Al-Ḥāfiẓ, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, juz I. Beirut: t.p, 1997.
- Ibrahim Al-Bājūrī. *Ḥāsiyyah Al-Bājūrī*, jilid II. Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Putera, t.th.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*, cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Kasani, Abū Bakr Ibn Mas'ūd. *Badā'ī' al-Sanā'ī Fi Tartīb al-Syar'i*, jilid VI. Beirut: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1971.

- Koto, H. Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Al-Māwardī, Abū Ḥusayn Ibn Muḥammad. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, jilid VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Mujib, Ahmad & Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis -Hadis Muttafaq'alaih*, cet. I. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mujib, Ahmad, H. Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis -Hadis Muttafaq'alaih*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nazari, H.Rafi'i. "Illah dan Dinamika Hukum Islam", *tesis*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Rāfi'iy, 'Abd al-Karīm bin Muḥammad bin 'Abd al-Karīm. *Al-'Azḥ, Taḥqīq Ali Muhammad Ma'awwaz*, juz VI. Beirut libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1997.
- Al-Syarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, jilid 11-12. Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1993.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*, cet. II. Jakarta: P.T, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wadjdy, Farid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

**SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI
(ANALISIS USHUL FIKIH SYAFI'ĪYYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974)**

Riyandi. S

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
E-mail: riyandi@yahoo.co.id

Abstrak

Syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami yang terdapat dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), justru memberatkan bagi laki-laki (suami) yang ingin melakukan poligami. Akibat dari itu banyak laki-laki yang berpoligami secara rahasia tanpa meminta persetujuan dari isteri pertama. Penelitian berikut merupakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa syarat poligami dalam fikih Syafi'īyyah ialah kemampuan sang suami untuk menanggung nafkah para isteri dan keluarganya secara adil. Dalam fikih Syafi'īyyah tidak ada syarat persetujuan isteri untuk berpoligami. Adapun syarat persetujuan isteri dalam melakukan poligami sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa dipahami melalui metode *istiṣlāḥiyah*. Persetujuan isteri dapat dipertimbangkan sebagai alasan diperbolehkan poligami dengan alasan ini masuk dalam bagian *maqāṣid syar'iyyah* yakni memelihara agama, akal, keturunan, kehormatan dan harta.

Kata kunci: *Poligami; Madzhab Syafi'iyah; UU Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam*

Abstract

The agreement terms of polygamy in positive law, namely the Marriage Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, and Compilation of Islamic Law (KHI), is burdensome for men who wish to practice polygamy. Consequently, many men practice polygamy secretly without the approval of the first wife. This study uses qualitative approach. The research result shows that the terms of polygamy in Syafi'īyyah school is capable to bear a living wives and families. The husband is obliged to bear a living either wives or inner birth. According to Syafi'īyyah school no approval requirement for polygamous wives. According to Marriage Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, and Compilation of Islamic Law (KHI), polygamy should be done without having to seek prior approval to the wife before. If the requisite approvals wife approached with *istiṣlāḥiyah* method, it appears that the approval of the wife may be considered as a reason to permit polygamy on the grounds is included in a portion of *maqāṣid syar'iyyah* that maintain religion, intellect, lineage, honor and property.

Keywords: *Polygamy; Syafi'īyyah school, Marriage Law No. 1 of 1974, The Compilation of Islamic Law (KHI)*

مستخلص

شروط اتفاق الزوجة في تعدد الزوجات الواردة في القانون الوضعي أن قانون الزواج رقم 1 سنة 1974 ولائحته الحكومية رقم 9 سنة 1975 والقانون الإسلامي (KHI)، يشق للرجل (الزوج) يريد أن تعدد الزوجات. ونتيجة في الواقع، أكثر من الرجال الذين يمارسون تعدد الزوجات بالسراية دون موافقة الزوجة الأولى. هذا البحث هو الدراسة النوعية المعيارية. ونتائج هذه الدراسة أن شروط تعدد الزوجات في الفقهاء الشافعية قدرة الزوج على تحمل المعيشة للزوجات وأسر إلى حد ما. في الفقهاء الشافعية عدم شرط موافقة الزوجة الأولى في تعدد الزوجات. وأما شرط موافقة الزوجة الأولى كما في القانون رقم 1 سنة 1974 م ولائحته الحكومية رقم 9 سنة 1975 والقانون الإسلامي (KHI) من خلال استسلاحية. ويكون اعتبار موافقة الزوجة الأولى لسبب جواز تعدد الزوجات مطابق مع المقاصد الشريعة لحفاظ الدين والفكر، والنسب والشرف والعرض.

الكلمات الرئيسية: تعدد الزوجات، والمذهب الشافعي، قانون الزواج، القانون الإسلامي

A. Pendahuluan

Poligami masih merupakan topik yang hangat diperbincangkan dalam masyarakat. Berbagai seminar dan kajian dilakukan oleh para pakar, ilmuwan, dan akademisi untuk mencari hukum dan syarat-syarat poligami yang sesuai dengan konteks zaman modern. Setelah ditemukan jawaban mengenai hukum dan syarat poligami, masih banyak wanita yang menentang kebolehan poligami.

Syarat adanya persetujuan dari isteri tentang poligami terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Syarat ini justru memberatkan bagi laki-laki (suami) yang ingin melakukan poligami. Akibat dari itu banyak laki-laki yang berpoligami secara diam-diam tanpa mendapatkan persetujuan dari isterinya, karena mereka menganggap bahwa poligami boleh dalam hukum Islam asal sanggup berlaku adil. Poligami bukan hanya menjadi pembicaraan hangat umat Islam, malah poligami dalam Islam telah menimbulkan banyak kritikan.

Dalil poligami dalam Islam merujuk kepada al-Qur'an surat *al-Nisā'* ayat 3. Islam mempunyai referensi yang kuat terhadap keabsahan hukum poligami yang tidak dapat dirubah bagi umat yang anti terhadap poligami.

Islam sangat menekankan pentingnya memiliki tujuan yang benar dalam setiap amal yang dilakukan. Tujuan yang benar merupakan kunci kesuksesan yang paling mendasar diterimanya amal perbuatan seseorang. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.:

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلَا مَرِيءَ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)¹

Artinya: Dari Muhammad Bin Ibrahim al-Thaimy, dari 'Alqamah bin Waqqas al-alaysy berkata Umar bin Khathab R.A, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Beramal harus disertai dengan niat, sesuatu yang diniatkan harus menurut apa yang diniatkan, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya.

Pernikahan merupakan amal perbuatan yang penting dan mulia dalam kehidupan manusia. Islam memposisikan pernikahan sebagai sebuah amal perbuatan yang baik. Setiap orang yang memasuki mahligai perkawinan atau pernikahan mendapat pahala dari Allah Swt. Pernikahan bukan perbuatan yang sifatnya duniawi saja, akan tetapi ia juga merupakan sebuah langkah untuk memperbaiki individu dan juga masyarakat. Orang yang melaksanakan pernikahan dengan tujuan untuk memperbaiki individu dan masyarakat akan mendapat ganjaran yang luar biasa dari Allah Swt.

Perkawinan dapat meminimalisir perbuatan tercela, seperti keinginan untuk berzina di luar nikah, sedangkan bagi manusia yang sudah menikah dapat menentramkan jiwa, dan dipandang oleh masyarakat secara umum bahwa ia sudah sempurna dan terpelihara dari perbuatan mungkar.

Hal ini jelas tercantum dalam firman Allah Swt. dalam surah *al-Furqān* ayat 74 yang bunyinya:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.

Ayat di atas bermaksud memberikan dorongan kepada orang yang telah berkeluarga untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sejahtera di dunia dan di

¹Muhammad bin Ismā'il, *al-Bukhārī*, juz VIII (Software Maktabah al-Syāmilah, Versi 3,8. Tahun, 2009), 454.

akhirat, serta senantiasa menjadi pemimpin keluarga yang bertanggungjawab.

Namun demikian pada realitasnya ada pernikahan yang tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada pasangan suami isteri yang awalnya saling mencintai namun berakhir dengan perselisihan yang menyakitkan, bahkan ada suami yang mencintai perempuan lain atau ada laki-laki yang merasa tidak cukup dengan seorang isteri. Terlebih lagi jika isterinya memiliki menstruasi yang panjang, sakit-sakitan, memiliki masalah pribadi dan mandul sementara laki-laki menginginkan keturunan. Kenyataan-kenyataan seperti inilah membuat perkawinan sering bermuara pada poligami.

Apabila kebaikan seorang laki-laki terletak pada perkawinan dengan seorang wanita, tetapi ia kawin lagi dengan wanita lain demi menurut hawa nafsu dan tanpa memenuhi syaratnya, maka sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan nestapa, yang kadang-kadang menjadikannya tidak mampu mengurus pendidikan dan memenuhi kebutuhan keluarga serta menimbulkan mudharat yang sangat berat.²

Firman Allah Swt. mengenai dalil poligami terdapat dalam al-Qur'an Surat *al-Nisā'* ayat 3 yang bunyinya adalah:

وَأَنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَمْلُوكَتٍ إِمَّا نَكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ الْأَتَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah melebihi kepada tidak berbuat aniaya".*

Dalam ayat di atas jelas bahwa poligami (beristeri lebih dari satu orang) merupakan suatu hal yang legal dan dibolehkan. Namun hal ini memerlukan kepada pengkajian yang cukup mendalam, karena poligami mempunyai berbagai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukannya.

Selama ini semakin marak orang membicarakan tentang hak perempuan yang tertindas oleh salah satu penyebabnya suami kawin lebih dari seorang isteri (poligami)-yang dalam al-Qur'an dibolehkan suami kawin lebih dari satu orang isteri dan tidak lebih dari empat. Padahal kaum perempuan menilai, poligami adalah suatu masalah besar dalam kehidupan mereka dan mayoritas laki-laki tidak sanggup

²Abdul Halim Abu Syuqqah, *Al-Mar'ah fi al-'Ashr al-Risālah*, terj. As'ad Yasin, *Kebebasan Wanita*, Cet, III, jilid V (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 17.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

melakukan poligami karena syarat berlaku adil, menurut mereka tidak sanggup dilaksanakan oleh laki-laki.

Sedangkan dalam hukum positif ada beberapa syarat poligami di antaranya adanya persetujuan dari isteri. Syarat ini justru dapat menyulitkan kaum laki-laki yang ingin melakukan poligami padahal dalam hukum Islam yang telah dijabarkan dalam kitab fikih terutama fikih Syafi'iyah tidak diketemukan syarat persetujuan isteri tersebut.

Bukti nyata bahwa kitab yang dipedomani dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah termasuk kitab-kitab madzhab Syafi'iyah, sedangkan kandungan isi kitab yang disebutkan di bawah ini tentang persoalan persetujuan isteri untuk berpoligami tidak ditemukan.

Kitab yang digunakan sebagai pedoman oleh pakar hukum Islam dan ulama dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antaranya adalah; *Hāsyah al-Bājury*, *Fath al-Mu'in*, *Syarqawy 'Ala al-Tahrīr*, *Qawānīn Syar'iyah Li al-Sayyid Bin Yahya*, *Bughyah al-Mustarsyidin*, *Qalyuby wa Umayrah*, *Fath al-Wahab*, *Tuhfah dan al-Fiqh 'alā-Madzāhib al-Arba'ah*.³

Kitab-kitab di atas yang dijadikan pedoman dan rujukan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kitab-kitab fikih Syafi'iyah yang tidak pernah mensyaratkan adanya persetujuan isteri untuk berpoligami.

Umumnya literatur yang ada belum terfokus mengkaji syarat persetujuan isteri untuk berpoligami melalui pendekatan ushul fikih Syafi'iyah. Di sinilah letak signifikansi dan menariknya pembahasan ini untuk dikaji apalagi pengetahuan tentang masalah ini dalam masyarakat masih tergolong minim sehingga rentan terjadi kepincangan hukum dalam praktek poligami.

B. Pembahasan

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan bahasa asing yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yakni "poly" dan "gamos". *Poly* artinya banyak, sedangkan *gamos* artinya perkawinan. Secara etimologis poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam

³Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Sejarah Kompilasi Periode 1945-1985* (Bandung: Nuansa Aulia. 2009), 120.

perkembangannya poligami secara istilah dideskripsikan sebagai seorang lelaki yang menikahi perempuan lebih dari satu.⁴

Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih satu isteri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu orang isteri atau melakukan madu terhadap beberapa orang isteri. Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu.⁵

Istilah poligami dipakai dalam pembahasan ini karena istilah tersebut lebih umum. Hukum poligami menurut para ulama dan ahli fikih Syafi'iyah adalah boleh, dengan syarat tidak melebihi dari empat orang, jika melebihi dari empat orang, maka hukumnya haram. Adapun poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilaksanakan melebihi dari satu orang dalam waktu yang sama dan tidak lebih pula dari empat orang isteri.

Dalam menjaga keseimbangan dalam rumah tangga untuk proses poligami perlu kepada syarat-syarat poligami yang sudah diatur oleh syarak agar poligami tetap pada koridor *syarak* dan Undang-Undang Perkawinan.

Tujuan menikah baik dengan satu orang isteri maupun dengan memperisteri lebih dari seorang tidak lain adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁶ Tujuan perkawinan baik monogami maupun poligami adalah sama. Di kalangan umat Islam sendiri terdapat banyak orang mempraktekkan poligami. Namun poligami yang dilakukan menuai banyak masalah apalagi poligami yang dilakukan karena dorongan hawa nafsu semata. Karena itu Islam menetapkan beberapa syarat poligami dan juga beberapa syarat lain yang terdapat dalam hukum positif.

Poligami adalah terjemahan dari *ta'addud al-zawjat* (beristeri lebih dari satu). Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah untuk perkawinan dengan

⁴Ahmad Tsar Blezinki, Politik dan Poligami” dalam www.kompasiana.com, diakses tanggal 20 Januari 2011.

⁵Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami Atau Poligami*, cet. 1. (Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007), 20.

⁶Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet. II (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 103.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

isteri/suami lebih dari seorang, sebagai berikut:

1. Poliandri yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
2. Poligami yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai isteri dalam waktu yang bersamaan.

Kontroversial soal poligami bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1973, saat Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pro dan kontra masalah ini sudah mencuat ke permukaan. RUU Perkawinan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman pada saat itu, Marseno Aji, telah memicu kontroversi keras terutama dari masyarakat yang beragama Islam. Tidak hanya sampai di situ larangan berpoligami telah berefek kepada banyaknya anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pernikahan secara sembunyi-bunyi, akibat sulitnya memperoleh izin dari pengadilan agama dan memperoleh persetujuan isteri. Terlepas dari polemik yang muncul banyak juga kalangan yang menyatakan poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan, karena tidak ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu, sebagaimana halnya laki-laki.⁷

Pada masa Rasulullah Saw., poligami dilakukan untuk melindungi wanita yang telah ditinggal suaminya yang syahid dalam berjihad di jalan Allah Swt. Poligami yang dilakukan Rasulullah Saw. sendiri, juga termasuk salah satu usaha untuk menghindari fitnah bagi kaum wanita, bukan disebabkan dominasi pelampiasan nafsu birahi.⁸ Apabila melihat dalil berpoligami dari surat *al-Nisā'* ayat 3, sebenarnya poligami memiliki referensi yang kuat terkait keabsahan hukumnya yang tidak dapat dirubah oleh umat yang anti terhadapnya.

Islam sangat menekankan pentingnya memiliki tujuan yang benar dalam setiap amal yang dilakukan. Tujuan yang benar merupakan kunci kesuksesan yang paling mendasar diterima amal perbuatan seseorang, seperti dapat dipahami dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari 'Umar bin Khattab RA sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam melakukan poligami perlu kepada dasar hukum tentang poligami itu,

⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 135.

⁸Nuraini Ishak, *Poligami (Mengapa Rasulullah Berbilang Isteri)* (Kuala Lumpur: Pustaka al-Mizan, 1988), 14.

supaya amal yang umat Islam lakukan tidak terkesan mengada-ada, di bawah ini akan dijelaskan dasar hukum tentang poligami.

2. Dasar Hukum Poligami

Setiap amal ibadah yang dilakukan seseorang, tentu tidak bisa terlepas dari dasar hukum, artinya kegiatan tersebut mempunyai dalil yang kuat. Dasar hukum yang dimaksudkan di sini ialah pegangan dalam melakukan poligami. Hal ini tidak bisa terlepas dari dalil utama poligami yaitu surat *al-Nisā'* ayat 3, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Pada masa Jahiliyah terdapat kesenjangan dalam kehidupan berkeluarga, khusus mengenai poligami, di mana pada saat itu masyarakat melakukan poligami tanpa batasan jumlahnya, bergantung kepada keinginan masing-masing kaum pria. Hal ini tentu saja merugikan kaum wanita, dan cenderung semena-mena dalam memperlakukan mereka. Ketika Islam datang ada sebahagian orang dari Bani Tsaqif yang mereka mempunyai isteri sampai sepuluh orang, lalu Islam membatasi kepada empat orang saja tidak boleh lebih.⁹

Adapun yang menjadi dasar hukum poligami adalah al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw., dan *Ijma'* para ulama. Berikut dijelaskan satu per satu:

a. Dasar hukum dari al-Qur'an

Dalil yang bersumber dari al-Qur'an ialah Surah *al-Nisā'* ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (Hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah melebihi kepada tidak berbuat aniaya".*

Mengenai *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Urwah bin Al-Zubir, ia menuturkan bahwa "Aku bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Swt. , yaitu Surah *al-Nisā'* ayat 3. Lalu ia menjawab: Wahai

⁹Maisarah, dkk, *Wanita dan Islam (Kumpulan Tulisan Santriwati Dayah)*, cet. I (Banda Aceh: Lapena, 2006), 115.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Rupanya harta dan kecantikannya mengagumkan walinya, sehingga berhasrat untuk menikahnya dengan tanpa berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana yang ia berikan kepada isteri yang lainnya. Karena demikian mereka dilarang menikahi perempuan tersebut, kecuali bila dia mau berlaku adil dan memberikan mahar yang layak, serta diperintahkan supaya kawin dengan perempuan yang mereka senangi selain mereka (perempuan yatim yang berada dalam perwaliannya).

Menurut Hamka "Pemaknaan ayat ini perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang anak yatim. Dalam pangkal ayat ketiga surat *al-Nisā'* ditemukan lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristeri lebih dari satu hingga empat. Hasil dari kesimpulan pemikiran Hamka tentang surat *al-Nisā'* ayat 3 yaitu adanya hubungan antara perintah memelihara anak yatim dengan kebolehan beristeri lebih dari satu hingga empat.¹⁰

Penjelasan Hamka tentang ayat tersebut masih seputar bolehnya bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk berpoligami tetapi hanya sampai empat orang saja. Beda dengan seorang hamba sahaya, yang hanya dibolehkan memperisterikan wanita sampai dua orang.

Dari kandungan ayat al-Qur'an di atas nampak dengan jelas bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam tetapi hanya terbatas hingga empat orang isteri. Mengenai hukum poligami dalam Islam, menurut Imam Syafi'i berdasarkan sunnah Rasulullah Saw., tidaklah diperbolehkan seorang beristeri lebih dari empat. Pendapat itu telah menjadi *ijma'* para ulama, terkecuali golongan *Syi'ah* yang berpendapat bahwa orang boleh beristeri lebih dari empat orang wanita sampai sembilan, bahkan ada di antara mereka yang tidak membatasi dengan suatu bilangan. Kaum Syiah ini bersandar kepada perbuatan Rasulullah Saw. yang beristeri lebih dari empat orang sampai sembilan bahkan sebelas isteri. Akan tetapi alasan itu ditolak oleh mayoritas ulama Islam, dengan argumentasi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. itu adalah kekhususan bagi beliau sebagai Rasul.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut Hamka, Islam memberi

¹⁰Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), 234.

¹¹Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, terj. Salim Bahreisy, cet. III (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 303.

peluang bagi umat Muhammad Saw. untuk berpoligami, sedangkan menurut Quraish Shihab, surat *al-Nisā'* ayat 3 tidak membuat peraturan tentang poligami dan ayat ini tidak mewajibkan kita berpoligami atau menganjurkannya, ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidaklah ringan.

Quraish Shihab mengatakan apabila perlu, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat, tetapi jangan lebih lalu jika kamu takut tidak akan berbuat adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah,--bukan dalam hal cinta--, jika menghimpun lebih dari seorang isteri, maka kawini seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupi satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka'.¹²

Sesuatu yang menarik dari penafsiran Quraish Shihab adalah penjelasan kata "adil" dan penyebutan dua, tiga atau empat, untuk kata adil, menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur'an digunakan dalam dua bentuk kata yaitu *tuqsithū* dan *ta'dilū*. *Tuqsithū* berarti berlaku adil antara dua orang atau lebih. *Ta'dilū*, berarti berlaku adil bagi diri sendiri atau orang lain. Penyebutan dua tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Dalam ayat sebelumnya, seorang lelaki tidak dibenarkan melakukan poligami lebih dari empat orang, karena huruf *waw* (و) pada ayat ini berfungsi sebagai *badal*, artinya nikahilah tiga orang isteri jika tidak dua orang dan empat orang jika bukan tiga orang.¹³

Adapun pendapat minoritas yang dikemukakan oleh Imam al-Qurtubi yaitu seorang muslim boleh menikah dengan sembilan wanita sekaligus, mereka juga mengambil dalil kepada firman Allah Swt. di atas dengan persepsi bahwa huruf *waw* (و) dalam ayat ini berfungsi membolehkan penjumlahan di antara bilangan-bilangan tersebut (sembilan).¹⁴

Sebahagian Madzhab al-Zhahiri membolehkan seorang laki-laki beristeri sampai delapan belas orang. Adapun yang menjadi argumentasi mereka ialah kata-kata jamak, *mastnā* berarti dua-dua, maka sama dengan empat, *tsulātsa* yang artinya tiga-tiga sama dengan enam, dan *rubā'* yang berarti empat-empat sama dengan

¹²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 322.

¹³*Ibid.*, 323.

¹⁴Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Tafsir Āyāt al-Akām*., 302-304.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

jumlahnya delapan, dan bila keseluruhannya dijumlahkan maka menjadi delapan belas.¹⁵

Kedua pendapat di atas tidak berdasarkan kepada kaidah ilmiah dan bertentangan dengan hadis yang membatasi hanya empat orang isteri saja, seperti hadis Nabi terhadap seorang sahabat yang baru masuk Islam dan sahabat tersebut mempunyai isteri lebih dari empat orang, maka sahabat tersebut harus memilih empat orang isteri dari keseluruhan yang ia miliki.¹⁶

Pernikahan yang melebihi empat orang isteri dalam Islam tidak dibenarkan, tetapi hanya kepada Rasulullah Saw. saja yang dibenarkan melakukannya, sehingga beliau mempunyai sembilan orang isteri selama hidupnya. Alasan dibolehkan karena beliau adalah *ma'mūn* (tepercaya) dan diyakini dapat berlaku adil kepada semua isterinya walaupun jumlahnya banyak.¹⁷

Rifat Hassan mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia mengatakan bahwa dari *nash* al-Qur'an Surat *al-Nisā'* ayat 3, dapat dipahami bahwa, poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja. Bahkan ayat tersebut merupakan dalil bahwa poligami hanya bisa dilakukan dengan wanita yang ditinggal mati suaminya dan mempunyai anak yatim dan bukan untuk dalil poligami saat sekarang ini. "Ia menuding bahwa ulama yang menafsirkan surat *al-Nisā'* ayat 3 adalah "keliru", jika ayat ini dijadikan dalil untuk poligami dalam suasana kondusif.¹⁸

Pernyataan dua pemikir kontemporer Islam di atas terasa kurang logis, jika ayat al-Qur'an surat *al-Nisa'* ayat 3 dan 129 tidak bisa menjadi dalil poligami dalam Islam, berdasarkan dugaan Rifat Hasan bahwa poligami dapat menimbulkan keretakan keluarga, rumah tangga dan kerusakan masyarakat. Pendapat Rifat Hasan ini diikuti sebagian negara Islam yang mengadopsi hukum di Negara Barat seperti Turki. Rifat Hasan dan Madzhab al-Zhahiri berargumentasi bahwa di antara hak penguasa adalah melarang sebagian hukum yang boleh (*mubah*), guna mengambil *mashlahat* dan menolak adanya *mafsadah*.¹⁹

Menurut al-Jaziry, dalam surat *al-Nisā'* ayat 3, ada suatu prinsip yang sangat tegas disebutkan oleh Allah Swt. yaitu membenarkan bagi seorang laki-laki

¹⁵Al-Qur'ānubi, *Al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub, 1993), 12

¹⁶*Ibid.*, 13.

¹⁷Zakariya al-Anshary, *Syarqawi 'alā al-Taḥrīr*, Jilid, II (Semarang: Bungkul Indah, t.th), 222.

¹⁸Abdul Mustaqim, *Fazlur Rahman, Studi al-Qur'ān Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, cet. I. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 87.

¹⁹Rohardi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Edisi II, Cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 184.

melakukan poligami mulai dari dua, tiga sampai empat orang isteri, selama ia dapat berlaku adil kepada semuanya. Bila tidak, maka tidak dibenarkan berpoligami dan hanya cukup dengan seorang isteri saja, karena demikian itu lebih mudah baginya dalam berlaku adil. Dalam ayat ini cukup jelas tentang bagaimana ketentuan poligami, yaitu dengan menitik beratkan kepada nilai keadilan yang harus mampu diciptakan oleh seorang suami terhadap semua isterinya, dan ini menjadi suatu hal yang paling utama. Hukum berlaku adil terhadap para isteri adalah wajib.²⁰

Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya, agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam ayat di atas mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya untuk berpoligami, akan tetapi hanya merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.

b. Dasar hukum dari *hadīts*

Adapun Sunnah yang menjadi dalil kebolehan berpoligami adalah hadis dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, sedang dia mempunyai sepuluh orang isteri pada zaman *Jahiliyah*, lalu kesemuanya masuk Islam bersamanya, maka Nabi Muhammad SAW. bersabda.

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه أبو داود).²¹

Artinya: “Tahanlah yang empat orang, dan ceraikan yang lainnya”

Hadīts ini mengandung hukum tentang poligami, di dalamnya terdapat suatu pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, akan tetapi tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang mempunyai isteri sepuluh orang harus memilih empat saja dari keseluruhan mereka.²²

Maksud dari kandungan hadis di atas adalah bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam, tetapi dibatasi dengan empat orang isteri dan tidak boleh lebih dari empat.

²⁰Abd al-Raḥmān Al-Jazīry, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Madzhāb al-Arba‘ah* (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikri 2003), 212.

²¹Sunan Abi Daud, Jilid VII (*Software Maktabah al-Syāmilah*, Versi 3,8. Tahun, 2009), 34.

²²Abdul Halim Abu Syuqqah..., 393.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

c. Dasar hukum dari *ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat tentang boleh atau halalnya berpoligami, hal ini mereka ungkapkan melalui lisan maupun sikap atau praktek mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kehalalan poligami telah ada semenjak masa Rasulullah Saw. sampai saat ini. Sehingga terlihat bahwa Nabi sendiri dan para sahabat dekatnya melakukan poligami, contohnya Umar bin Khatab, 'Ali bin 'Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal (semoga Allah memberkahi kehidupan mereka). Praktek poligami ini juga dilakukan oleh generasi selanjutnya setelah generasi sahabat yaitu di masa *tabi'in*, dan juga masyarakat lain sesudah itu yang juga melakukan praktek poligami. Karena itu dapat disimpulkan bahwa poligami telah dilakukan oleh berbagai kalangan umat Islam baik dulu maupun sekarang, karena mereka menganut pendapat bahwa poligami merupakan suatu hal yang halal dilakukan.²³

Menurut Jalaluddin al-Mahally, al-Nawawi mengatakan "Dibolehkan bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk memiliki empat orang isteri sedangkan hamba sahaya hanya diizinkan dua orang saja."²⁴

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas jelas bahwa poligami, dibolehkan dalam Islam, namun yang perlu diperhatikan bahwa kebolehan berpoligami bukanlah secara mudah akan tetapi membutuhkan persyaratan-persyaratan yang ketat yang mesti dipenuhi terlebih dahulu, setelah itu baru poligami ini dapat dilakukan.

3. Pendapat Ulama Tentang Poligami

Dalam menjalankan hukum Islam di berbagai penjuru, ulamalah tempat umat berpegang, karena ulamalah yang merupakan pewaris para Nabi yang mengerti tentang masalah agama dan ketentuan hukum Islam, begitupun ulama mempunyai pendapat masing-masing tentang hukum berpoligami. Di sini akan dikemukakan beberapa pendapat ulama tentang poligami.

1. Rasyid Ridha berpendapat bahwa poligami diperbolehkan, bila suami tidak mungkin menahan *mudharat* (menahan hawa nafsu) dan bila ternyata isterinya mandul.²⁵ Salah satu ajaran Islam, jika seseorang tidak sanggup menahan hawa nafsu, maka ia boleh berpuasa, karena dengan puasa dapat meredamkan dorongan nafsu yang tinggi.

²³Maisarah, ddk, *Wanita dan Islam...*, 118.

²⁴Jalāluddin Al-Mahally, *Qalyuby wa Umayrah* (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikri, t.th), 245.

²⁵Muhammad Rāsyid Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Juz IV (Mesir: Dār al-Manār, 1373 H), 364.

2. Khurshid Ahmad menyatakan bahwa, berpoligami secara terbatas diperkenankan dengan ketentuan adil terhadap tanggung jawab yang dipikul. Alasan lain yang dikemukakan adalah bahwa seorang laki-laki bila ada masalah dalam keluarganya, mereka mempunyai dua pilihan yaitu kawin lagi atau berbuat dosa. Di sinilah poligami dibolehkan.²⁶ Alasan yang dikemukakan oleh Khurshid Ahmad terasa kurang tepat, jika seorang suami mempunyai masalah dalam keluarga yang mana masalah tersebut ditemukan dari pihak isteri, maka suami boleh berpoligami atau menceraikannya, jadi bukan berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Swt.
3. Al-Jashshash berpendapat bahwa melakukan poligami hanya bersifat boleh (*mubah*), tetapi dengan syarat mampu berbuat adil di antara para isteri. Menurutnya ukuran adil di sini termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Sedangkan keadilan dalam rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacam itu sangat berat.²⁷
4. Yusuf Qaradhawi, menyatakan dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang isteri, tapi dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua isterinya, baik tentang masalah makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tidur dan nafkahnya. Bila tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka tidak dibolehkan kawin lebih dari seorang isteri.²⁸
5. Al-Qasimi berpendapat bahwa, untuk bisa menikahi wanita lebih dari satu bergantung kepada keluasan cara berpikir suami yakni kemampuan mengendalikan rumah tangga dan kematangan dalam segala hal dalam bermasyarakat (*mu'āmalah*).²⁹

Berdasarkan beberapa pendapat ulama yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa poligami dibolehkan dalam agama, dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua isteri baik lahiriah maupun bathiniyah, dan juga berbuat adil untuk anak-anaknya dalam segala kebutuhan rumah tangga. Intinya para ulama sependapat dalam masalah poligami, hanya saja ungkapan atau cara penafsirannya yang berbeda.

Allah Swt. membenarkan bagi seorang laki-laki melakukan poligami mulai dari dua, tiga, sampai empat orang isteri, selama ia dapat berlaku adil kepada semua isterinya, namun bila tidak, maka tidak dibenarkan berpoligami dan hanya cukup dengan seorang isteri saja, karena demikian itu lebih mudah baginya dalam berlaku adil.

Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap

²⁶Khursid Ahmad, *Keluarga Muslim* (Jakarta: Risalah Bandung, 1977), 27.

²⁷Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 86.

²⁸Muhammad Yūsuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Offset, 1993), 2.

²⁹Kharuddin Nasution, *Riba dan Poligami*., 89.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

keadilan suaminya. Berbagai hak seorang isteri harus dipenuhi oleh suami agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam ayat di atas mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya poligami, akan tetapi merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.

Persyaratan untuk dapat melakukan poligami secara global sama di antara perspektif fikih Syafi'iyah dan hukum positif tetapi ada penambahan syarat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, salah satunya adanya persetujuan isteri, dan ini dijadikan sebagai syarat bagi dibolehkan melakukan poligami, dalam hukum positif.

Dalam Pasal 59 disebutkan, bahwa dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³⁰

Dari penjelasan di atas tentang syarat poligami dalam perspektif fikih Syafi'iyah dan hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami, bahwa kebolehan poligami bukanlah suatu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan ataupun penindasan kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Akan tetapi, semua ini bukan merupakan *'illat (alasan)* ataupun syarat bagi kebolehan berpoligami. Semua hal di atas hanya merupakan penjelasan atas fakta yang terjadi. Hukum poligami sendiri adalah hak Allah Swt. semata, yakni bahwa Allah Swt. telah menjelaskan tentang kebolehan berpoligami. Sedangkan beristeri seorang saja adalah suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Swt. , dalam suatu keadaan di mana ketika seorang suami khawatir tidak dapat berlaku adil. Selain keadaan ini, Allah Swt. tidak pernah mensyari'atkan seorang suami menikahi hanya seorang wanita saja.

Dalam fikih Syafi'iyah maupun hukum positif, poligami dibolehkan dengan ketentuan yang sama, dan yang paling utama persyaratannya adalah sanggup berlaku adil, di samping itu kedua hukum ini juga mensyaratkan ketentuan yang lain bagi

³⁰Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang...*, 386-387.

bolehnya poligami.

Tetapi dalam perspektifnya jelas terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu dalam hukum positif bagi seseorang yang melakukan poligami harus terlebih dahulu melapor ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum baginya, dan wajib mendapatkan persetujuan isteri baik tertulis maupun lisan, dan bila tidak maka akan berpengaruh kepada nikah yang ia lakukan tersebut, artinya ia akan mendapatkan kesulitan jika pernikahannya digugat nantinya. Sedangkan dalam fikih Syafi'iyah tidak ada ketentuan tersebut.

Mengenai batasan jumlah isteri yang boleh dipoligami dalam waktu yang sama menurut fikih Syafi'iyah adalah empat orang, dan tidak boleh lebih dari jumlah tersebut. Bila suami ingin memiliki lebih dari empat isteri maka ia harus terlebih dahulu menceraikan isteri-isteri sebelumnya. Mengenai batasan jumlah ini juga sama antara ketentuan hukum dalam fikih Syafi'iyah dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun sebab yang berasal dari perempuan (isteri) adalah seperti menderita penyakit kronis yang jauh harapan untuk sembuh atau ada hal lain yang dapat meresahkan suami dan mengganggu ketentraman jiwanya seperti isteri yang sukar dididik dan diarahkan dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi ketentraman suami dalam keluarga.

Alasan-alasan poligami yang telah diuraikan di atas bukan berarti bahwa laki-laki paling dominan dibandingkan wanita, setiap hak laki-laki mesti dipenuhi sedangkan perempuan tidak demikian. Tetapi dengan penentuan syarat adil kepada isteri dapat menciptakan keseimbangan, karena persoalan adil merupakan hal yang mudah diucapkan namun sukar sekali untuk merealisasikannya. Jarang sekali orang yang dapat melakukannya, tetapi tetap saja realitas di lapangan terdapat kecederaan dan kepincangan penerapannya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa bahtera kehidupan pernikahan seseorang tidak selalu berjalan dengan mulus; kadang-kadang ditimpa oleh cobaan atau ujian. Pada umumnya, sepasang lelaki dan perempuan yang telah menikah tentu saja sangat ingin segera diberikan momongan oleh Allah Swt. Akan tetapi, kadang-kadang ada suatu keadaan ketika sang isteri tidak dapat melahirkan anak, sementara sang suami sangat menginginkannya.

Pada saat yang sama, suami begitu menyayangi isterinya dan tidak ingin menceraikannya. Ada pula keadaan ketika seorang isteri sakit keras sehingga

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

menghalanginya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dan isteri, sedangkan sang suami sangat menyayangnya; ia tetap ingin merawat isterinya dan tidak ingin menceraikannya. Akan tetapi, di sisi lain ia membutuhkan wanita lain yang dapat melayaninya. Ada juga kenyataan lain yang tidak dapat dipungkiri, bahwa di dunia ini ada sebagian lelaki yang tidak cukup hanya dengan satu isteri (maksudnya, ia memiliki syahwat lebih besar dibandingkan dengan lelaki pada umumnya), Jika ia hanya menikahi satu wanita, hal itu justru dapat menyakiti atau menyebabkan kesulitan bagi sang isteri. Lebih dari itu, fakta lain yang dihadapi sekarang adalah jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan; baik karena terjadinya banyak peperangan ataupun karena angka kelahiran perempuan memang lebih banyak daripada lelaki.

Dari berbagai fakta yang tidak dapat dipungkiri di atas, yang merupakan bagian dari permasalahan umat manusia, dapat dibayangkan, seandainya pintu poligami ini ditutup maka justru kerusakanlah yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dari sini dapat dipahami, bahwa poligami sebetulnya dapat dijadikan sebagai salah satu solusi atas sejumlah problema di atas.

Namun demikian, fakta-fakta di atas tidak dapat dijadikan dalil yang benar bagi kebolehan poligami. Fakta-fakta tersebut sekadar mendukung pemahaman, bahwa poligami merupakan salah satu solusi bagi sebagian permasalahan yang tengah dihadapi umat Islam. Sementara itu, dalil tentang kebolehan poligami tetap bertumpu pada *nash-nash syari'at*, yakni al-Qur'an dan *hadīst* Rasullulah Saw. dan *ijma'* ulama.

4. Penalaran Ushul Fikih Terhadap Syarat Persetujuan Poligami

Kata syarat berasal dari bahasa Arab, yaitu (شَرْطٌ) *syarth* yang berarti pertanda, indikasi atau memastikan sesuatu. Syarat adalah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum *syari'at* dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum *syar'i* itu sendiri dan keberadaannya itu tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum.³¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang bergantung kepadanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum tidak ada.

³¹Abd Latif al-Khatib al-Madrīs Aḥmad, *Nufaṣāt 'Ala Syarḥ al-Waraqāt* (Singapura: al Haramayn, t.th), 54.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa syarat persetujuan isteri untuk bisa berpoligami tidak termasuk dalam syarat *syar'i*, melainkan ia termasuk ke dalam syarat *wadh'i*.

Syarat *wadh'i* dibolehkan untuk pengistimbatan hukum dengan ketentuan selama tidak melanggar ketentuan hukum *syar'i* sebagaimana nabi bersabda dalam satu *hadīts*, “Orang Islam boleh membuat syarat selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal”.³²

Maksud dari *hadits* di atas bahwa umat Islam dibolehkan membuat syarat-syarat yang mendukung kemaslahatan umat selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syar'i*, jadi maksud dengan syarat dalam penjabaran hadis di atas adalah syarat *wadh'i* bukan syarat *syar'i*, jadi boleh saja membuat syarat atau ketentuan-ketentuan yang mengikat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan umat.

Jadi dapat di pahami bahwa syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah syarat Administratif., artinya satu ketentuan yang sudah dibakukan dengan tujuan untuk memelihara ketentraman dalam rumah tangga demi terciptanya keadilan yang harmonis.

Asbāb al-wurūd hadis di atas bahwa seorang budak yang bernama *al-Barirah* mendapat perjanjian *kitabah* dengan tuannya yang mana ia akan di merdekakan oleh tuannya, tetapi tuannya membuat berbagai syarat-syarat untuk kelepaan hamba sahayanya, lantas *al-Barirah* mengadu kepada Aisyah tentang kasus tersebut, lalu Aisyah mengadu pula kepada Nabi Muhammad Saw., maka Nabi membolehkan hal tersebut dilakukan.

Poligami dalam Islam dibolehkan (*mubah*) bukan wajib, bukan haram dan bukan pula disunnahkan, Jika dikaitkan dengan *asbāb al-nuzūl* ayat poligami, terdapat beberapa riwayat tentang diturunkannya ayat ini di antaranya, yang paling kuat adalah apa yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubir ketika ia bertanya kepada Aisyah RA, tentang sebab turun ayat tersebut:

Aisyah R.A berkata: “wahai anak saudara (keponakanku), ayat ini diturunkan kepada anak perempuan yatim, yang hidup di rumah walinya, dia ikut makan harta walinya itu dan kebetulan walinya juga mengincar harta anak yatim tersebut dan terpesona dengan kecantikannya, wali tersebut ingin menikahnya tetapi berencana

³²Baihaqy, *Maktabah al-Syāmilah, Al-Sunan al-Kubra, Bab Syar' Fī al-Nikāh*, Juz VII, 248.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

tidak mau berbuat adil di dalam memberikan maharnya, dia ingin memberikan mahar sama dengan mahar-mahar wanita lainnya, maka Allah Swt. melarang menikahinya kecuali kalau mau dan sanggup berbuat adil di dalam memberikan mahar yang sederajat dengannya serta walinya diperintahkan menikahi wanita lain. Berkata Urwah, telah berkata Aisyah: “Sesungguhnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. setelah ayat ini (turun), sehingga Allah Swt. menurunkan surat *al-Nisā*’ ayat 126.

ويستفتونك في النساء

Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita

Aisyah RA. melanjutkan dalam ayat lain surat *al-Nisā*’ ayat 127.

ويرغبون ان تنكحوهن

Artinya: Sedang kamu ingin mengawini mereka”.

Sebab seorang dari kamu tidak mau menikahi anak yatim asuhannya, karena sedikit hartanya dan tidak cantik. Lalu berkata Aisyah RA: “maka mereka dilarang menikahi anak yatim jika hanya mengejar kecantikan dan hartanya, kecuali kalau berbuat adil. Hal itu dikarenakan mereka tidak mau menikahinya jika mereka jelek dan sedikit hartanya.³³

Beranjak dari *asbāb al-nuzūl* di atas para ulama memiliki beberapa pandangan yang berbeda dalam memahami masalah ini. Syekh Muhammad Thahir Asyur di dalam tafsirnya menguatkan apa yang dikatakan Aisyah RA.³⁴ Imam Ibnu Katsir walaupun dengan cara spontan, juga mengarah untuk membenarkan riwayat Aisyah ini, dibuktikan dengan bahwa hanya riwayat ini saja yang diungkapkan dalam tafsirnya dan ia menganggap inilah riwayat yang paling sahih, padahal di sana ada riwayat-riwayat yang lain.³⁵

Ayat di atas diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. pada tahun ke-8 Hijrah untuk membatasi jumlah isteri dalam batas maksimal empat orang saja. Sebelumnya sudah menjadi hal biasa jika seorang pria Arab mempunyai isteri banyak tanpa ada batasan. Dengan diturunkannya ayat ini, seorang muslim dibatasi hanya boleh beristeri maksimal empat orang saja. Sejak pada masa itulah tidak dibolehkan seorang lelaki menikahi lebih dari empat orang isteri yang merdeka beranjak dari

³³Ibn ʿajr al-ʿAsqalānī, *Fatḥ al-Bārī*, juz VIII (Beirut: Maktabah al-Miṣriyyah, 2001), 124.

³⁴Muḥammad al-Tahīr bin ʿAsyūr, *Uṣul al-Qawāʿid al-Khamsah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), 222.

³⁵Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qurʾān al ʿAṣim*, cet. VIII, Juz. I (Beirut: Dār al-Maʿrifat, 1997), 460.

hadis Nabi Saw. yang membatasi jumlah isteri kepada Ghilan (salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dengan memiliki sepuluh orang isteri).

Pendapat Qiel (zhaef) menyatakan, pada hadis tersebut kata *amsik* (menahan) empat orang isteri adalah wajib dan menceraikan sisa isteri adalah *ibahah* (dibolehkan). Pendapat Qiel Zhaef yang lain menyatakan sebaliknya, yaitu menahan (tidak menceraikan) empat orang isteri hukumnya wajib sedangkan menceraikan yang lebih dari empat orang hukumnya adalah wajib. Walaupun demikian pendapat yang kuat bahwa tiap-tiap perbuatan baik menahan atau menceraikan hukumnya wajib. Faedah *khilaf* menunjukkan bahwa berdosa seseorang menahan isteri-isterinya di bawah empat orang berdasarkan pendapat yang menyatakan wajib, maka wajib atasnya untuk menahan empat orang isteri karena dengan menahan empat orang isteri, maka yang berlebih harus diceraikan. Walaupun nantinya boleh menceraikan empat orang isteri tersebut dengan talak dan tiadalah sah menceraikan sekalian dengan tiada memilih. Pendapat yang kuat adalah yang kedua, yaitu menahan empat orang berefek kepada tertalak yang lain secara paksa (otomatis) atau perbuatan menceraikan berimbas kepada terkhusus empat orang secara paksa (otomatis) pula.³⁶

Hadīts tentang Ghilan menjelaskan firman Allah Swt. dalam surat *al-Nisā'* ayat 3 yang masih umum yang dapat memberikan pengertian boleh bagi seseorang menikahi sembilan atau delapan belas orang isteri melalui pemahaman kata-kata *matsnā*, *tsulātsa'*, dan *rubā'*. Posisi hadis tersebut adalah *mubāyin* (menjelaskan), yaitu, mengeluarkan sesuatu dari posisi yang samar-samar (tidak jelas) kepada pengertian yang terang (jelas).³⁷ Sedangkan sesuatu yang dijelaskan yaitu surat *al-Nisā'* ayat 3 yang masih global (umum) mempunyai pengertian sesuatu yang perlu kepada *bayān* (penjelasan).³⁸

Kata *matsnā*, *tsulātsa'*, dan *rubā'* merupakan kalimat *muntahā al-jumū'*, yaitu lafadh yang di dalamnya terdapat satu '*ilat* (sebab) dari '*ilat* sembilan yang bertempat pada tempat dua '*ilat*, yaitu '*ūdul* (dipalingkan) dari bentuk aslinya. Sehingga lafadh tersebut tidak menerima *tashrif* (perubahan baris akhir) dengan sebab masuknya '*āmil*. Dengan demikian arti lafadh *matsnā* adalah pemalingan dari kata *itsnāni-itsnāni* (dua dua), lafadh *tsulātsa* merupakan pemalingan dari kata *tsulātsa-tsulātsa* (tiga tiga), dan lafadh *rubā'* adalah pemalingan dari kalimat *rubā'*-

³⁶Zakariya al-Ansari, *Tuhfah al-ullāb, Syarh al-Ta'rīr...*, 209.

³⁷Abdul Latif al-Khathib al-Madris, Ahmad, *Nufahāt 'Alā Syarh al-Warqāt...*, 89.

³⁸*Ibid.*, 87.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

rubā (empat empat).³⁹

Selanjutnya dalam teks *al-Qur‘ān* surat *al-Nisā*’ ayat 3 tersebut *tsulātsa* dan *rubā*’ di’ataf dengan waw (و) yang memberi faidah *mutlak jama*’ (berhimpun), yaitu delapan belas orang isteri, karena seseorang boleh menghimpun isteri sebanyak dua dua (empat), tiga tiga (enam) dan empat empat (delapan). Ataupun jika kata *matsnā*, *tsulātsa* dan *rubā*’ diartikan dua, tiga, dan empat dapat dipahami bahwa ayat tersebut membolehkan menikah hingga sembilan orang dengan cara penjumlahan yang dipahami dari و (waw) *mutlak jama*’ (menghimpunkan).

Adapun jika و (waw) tersebut dijadikan berfaidah و و و atau *takhayyur* (boleh memilih) maka terpahami bahwa seseorang yang telah menikahi dua orang isteri tidak boleh berpindah menikahi tiga orang isteri dan orang yang telah menikahi tiga orang isteri, tidak boleh berpindah menikahi empat orang isteri.⁴⁰

Hadīts Nabi tentang Ghilan di atas menjadi *mubāyyin* bagi surat *al-Nisā*’ ayat 3 yang masih umum, artinya و (waw) yang terdapat dalam kata *matsnā*, *tsulātsa* dan *rubā*’ adalah و *ibāḥah* takhayyur (boleh memilih) yaitu seseorang boleh memilih menikahi dua, tiga, dan empat orang isteri. Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, hal ini dapat dipahami dari ayat di atas jika dibaca secara berulang-ulang, yaitu nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat.⁴¹

Dilihat dari pemahaman *dilalah* ayat bahwa kebolehan poligami pada ayat di atas tidaklah harus selalu dikaitkan dengan konteks pengasuhan anak yatim, sebagaimana pendapat kaum liberal yang keliru. Sebab sebagaimana sudah dipahami dalam ilmu ushul fikih, bahwa yang menjadi pegangan (*al-‘ibrah*) adalah bunyi redaksional surat *al-Nisā*’ ayat 3 yang bersifat umum, bukan sebab turunnya ayat yang bersifat khusus (pengasuhan anak yatim). Mayoritas ahli tafsir sepakat bahwa dalam hal ini berlaku kaidah.

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.⁴²

Artinya: Ibarat itu dengan keumuman lafadh bukan dengan kekhususan sebab

Poligami boleh dilakukan baik oleh orang yang mengasuh anak yatim maupun yang tidak mengasuh anak yatim. Kaidah ushul fikih menyebutkan:

³⁹Muḥammad bin Aḥmad ‘Abd al-Bāri al-Aḥdali, *Al-Kawātib al-Durriyyah*, Juz 1 (Semarang: Toha Putra, t.th), 40.

⁴⁰Jalālu al-Dīn al-Suyuti dan Jalāluddīn, ḥāsyiyah *al-Shāwī ‘Ala Tafsīr al-Jalālayn*, Juz. I (Lebanon: Dār al-Kutub, t.th), 269.

⁴¹*Ibid*, 270.

⁴²Ibn Katsir, Jilid IV, *Maktabah al-Syamilah*, t.th, 41.

إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط العمومه.⁴³

Artinya: " Jika terdapat bunyi redaksional yang umum karena sebab yang khusus, maka sebab yang khusus itu tidaklah menggugurkan keumumannya."

Beberapa hadis menunjukkan, bahwa Rasulullah Saw. telah mengamalkan bolehnya poligami berdasarkan umumnya ayat tersebut, tanpa memandang apakah kasusnya berkaitan dengan pengasuhan anak yatim atau tidak. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqafi yang telah masuk Islam, sedang ia punya sepuluh isteri, "*Pilihlah empat orang dari mereka, dan ceraikanlah yang lainnya!*" (HR Malik, al-Nasa'i, dan al-Dar al-quthni).⁴⁴ Diriwayatkan Harits bin Qais berkata kepada Nabi Saw., "Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan isteri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi Saw. maka beliau bersabda, "*Pilihlah dari mereka empat orang.*" (HR Abu Dawud).⁴⁵

Dengan demikian kebolehan poligami ini tidaklah tepat kalau dikatakan "syaratnya harus adil." Dapat dianalisa bahwa, adil bukanlah syarat poligami, melainkan kewajiban dalam berpoligami. Syarat adalah sesuatu sifat atau keadaan yang harus terwujud sebelum adanya sesuatu yang disyaratkan (*masyrūth*). *Wudhuk*, misalnya, adalah syarat sah shalat. Jadi wudhuk harus terwujud dulu sebelum shalat, maka kalau dikatakan "adil" adalah syarat poligami, berarti "adil" harus terwujud lebih dulu sebelum orang berpoligami. Tentu ini tidak tepat. Karena yang mungkin terwujud sebelum orang berpoligami bukanlah "adil" itu sendiri, tapi "perasaan" seseorang apakah dia akan bisa berlaku adil atau tidak. Jika "perasaan" itu adalah berupa kekhawatiran tidak akan dapat berlaku adil, maka di sinilah *Syarak* mendorong dia untuk menikah dengan satu isteri saja.

Aliran liberal menolak poligami berdasarkan dalil al-Qur'an surat *al-Nisā'* ayat (4), ayat 129 yang dikaitkan dengan kewajiban berlaku adil dalam poligami. Mereka beralasan, di satu sisi Allah Swt. mewajibkan adil tapi di sisi lain keadilan dimaksud adalah mustahil. Dari kaitan ini mereka memahami bahwa poligami itu dilarang dan hukumnya haram. Mereka menganggap keadilan pada dua ayat tersebut adalah keadilan yang sama, bukan keadilan yang berbeda.

Keadilan yang dimaksud al-*Qurān* Surat *al-Nisā'* ayat 3 berbeda dengan

⁴³Abdul Qadir al-Dumi Tsumma al-Dimasyqi, *Nuzhat al-Khathir Syarh Rawdhah al-Nazhīr wa Junat al-Munazhīr*, Juz II (Beirut: Dār al-Ibn Hazm, 1995), 123.

⁴⁴Muhammad bin Ismā'il, *al-Bukhārī*..., 139.

⁴⁵*Ibid.*, 123.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

keadilan yang dimaksud dalam surat *al-Nisā'* ayat 129. Keadilan dalam ayat 3 menyangkut nafkah, tempat tinggal dan bermalam secara bergiliran, sedangkan adil dalam ayat 129 menyangkut cinta kasih, dan sayang. Untuk bisa adil dalam hal ini sangat sukar, sebab tidak bisa diukur. Pemahaman aliran liberal tersebut kurang tepat, karena jika demikian implikasinya adalah dua ayat di atas akan saling bertentangan (kontradiksi) satu sama lain, di mana yang satu meniadakan yang lain. Allah Swt. telah menyatakan tidak ada kontradiksi dalam al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam surat *al-Nisā'* ayat 82:

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

Artinya: "Kalau sekiranya al-Qur'ān itu dari sisi selain Allah, niscaya akan mereka dapati pertentangan yang banyak di dalamnya."

Menolak poligami dengan ungkapan bahwa poligami adalah "*emergency exit door*" (pintu keluar darurat), tidak sesuai dengan pengertian darurat dalam fikih dan ushul fikih. Darurat menurut Imam Suyuthi adalah:

وصوله حد ان لم يتناول الممنوع هلك او قرحا.⁴⁶

Artinya: "Sampainya seseorang pada suatu batas (kondisi) yang jika dia tidak mengerjakan yang haram, maka dia akan mati atau hampir mati".

Ini artinya, seorang laki-laki baru boleh berpoligami kalau sudah parah sekali keadaannya, yakni hampir mati kalau tidak berpoligami. Ini tentu mengherankan dan tidak benar. Pendapat yang membolehkan poligami dalam kondisi darurat berarti menganggap poligami itu hukum asalnya haram (seperti daging babi) dan baru dibolehkan (sebagai hukum *rukshah*) jika tidak ada jalan keluar selain poligami. Padahal hukum asal poligami bukan haram, tapi *mubāh*. Inilah yang benar.

Penolakan poligami dengan alasan Rasulullah Saw. pernah melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami, ketika Ali yang sudah beristerikan Fatimah meminta izin kepada beliau Rasulullah Saw. untuk menikah lagi dengan puteri Abu Jahal, Rasulullah tidak memberi izin kepada Ali menikahi puteri Abu Jahal, kecuali setelah menceraikan puterinya Fatimah.

Kesan yang muncul, seolah-olah Rasulullah Saw. menolak poligami. Aliran liberal biasanya hanya menyampaikan hadis di atas tanpa melihat hadis yang sama dari jalur periwayatan yang lain. Dalam jalur riwayat lain ada pernyataan Nabi Saw. yang terkait dengan status hukum poligami. yakni: "*Sungguh aku tidaklah*

⁴⁶Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa al-Naza'ir Fī al-Furū'* (Beirut: Dār Ibn ʿazm, t.th), 67.

mengharamkan sesuatu yang halal, dan tidak pula menghalalkan sesuatu yang haram. Akan tetapi, demi Allah, tidak akan putri Rasulullah berkumpul dengan putri musuh Allah dalam suatu tempat selama-lamanya" (H.R Bukhari).⁴⁷

Sabda Rasul tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa poligami hukumnya boleh, larangan Rasul kepada Ali yang ingin memadu Fatimah dengan putri Abu Jahal bukanlah karena Rasulullah Saw. menolak poligami, melainkan karena Rasulullah tidak senang Ali mengumpulkan puteri beliau dengan puteri musuh Allah Swt. di bawah lindungan seorang lelaki. Ali sendiri sebenarnya berpoligami, setelah meninggalnya Fatimah. Ibnu Uyainah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mempunyai empat isteri dan 19 budak perempuan, setelah wafatnya Fatimah RA.⁴⁸

Kelompok yang menolak poligami juga berpedoman pada survei data-data empiris yang menjelaskan berbagai bahaya (*dharar*) dari poligami, misalnya percekocokan antar isteri, kerawanan penyakit seksual, dan sebagainya. Secara metodologis (ushul fikih), cara berpikir demikian perlu diluruskan, sebab tindakan itu berarti menjadikan akal sebagai satu-satunya alat untuk menjustifikasi status hukum syara'. Akal tidak dapat secara independen memutuskan boleh tidaknya sesuatu hukum syara' hanya berangkat dari fakta-fakta empiris semata. Akal tugasnya adalah memahami teks wahyu, bukan untuk menyimpulkan status hukum secara mandiri dan terlepas dari teks. Di sinilah tepat sekali Imam Ghazali mengatakan:

الاحكام الشرعية لا تدرك بالعقل.⁴⁹

Artinya: "Hukum-hukum syar'i tidaklah dapat dijangkau dengan akal semata".

Kelompok tersebut di atas mempergunakan hasil survei untuk menolak poligami, dengan argumen berupa kaidah fikih:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح⁵⁰

Artinya: "Menolak kerusakan, lebih utama dari pada memperoleh kemaslahatan"

Pendapat itu menyatakan poligami harus dilarang, karena melarang poligami artinya adalah menolak kerusakan, yang harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan, yaitu melakukan poligami. Pendapat itu bathil. Sebab pengamalan

⁴⁷ Muḥammad bin Ismā'il, *al-Bukhārī...*, 124.

⁴⁸ Sayuthy, *Nuzhat al-Muta'amil wa Mursyid al-Muta'ahil Fi al-Khathib Wa al Mutazawijah* (Beirut: Dār al-amwaj, 1989), 17.

⁴⁹ Imam Ghazali, *al-Musytasyfa Min 'Ilm al-Uḥūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikri, t.th), 12.

⁵⁰ Abdi Arrahman bin Abi Bakar al-Sayuthy, *Al-Asybah Wa al-Nazha'ir...*, 87.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

kaidah fikih dapat dimaknakan sebagai ijtihad. Ijtihad tidak berlaku jika ada *nash* yang *qath'ī* (pasti) dalam suatu masalah. Dalam hal ini telah ada *nash* yang *qath'ī* yaitu surat *al-Nisa'* ayat 3 yang membolehkan poligami. Jika ada *nash* yang *qath'ī*, tidak boleh lagi berijtihad pada *nash* yang *qath'ī* itu, apalagi jika hasil ijtihadnya membatalkan hukum dalam *nash qath'ī* itu.

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa boleh melakukan poligami bila suami bisa berlaku adil di antara isteri-isterinya tanpa menganggap beda di antara isterinya yang muda dengan yang tua. Poligami boleh dilakukan tanpa lebih dahulu meminta izin kepada isteri sebelumnya. Dalam hal ini suami akan berdosa bila membedakan jumlah giliran bermalam di antara isteri-isterinya dengan melebihkan hak bagi salah satu dan mengurangi bagi yang lain. Terdapat pengecualian pada isterinya yang baru saja ia kawini, di mana suami diharuskan untuk bermalam sampai tujuh malam bila isterinya perawan dan jika bukan perawan (janda) diharuskan bermalam sampai tiga malam. Syafi'ī, al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan berlaku adil kepada para isteri. Menurut mereka berlaku adil ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari.⁵¹ Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. *Kedua*, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lainnya.⁵²

Persyaratan demikian, memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'ī dan ulama-ulama Syafi'īyyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Setelah dikaji sumber hukum poligami baik al-Qur'an maupun dari *hadīts*, masih belum ditemukan syarat poligami yang mengharuskan adanya persetujuan/izin isteri sebelumnya terlebih dahulu jika seseorang mau berpoligami.

Setelah ditelusuri bahwa poligami di samping memiliki hikmah dan manfaat

⁵¹Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 103-105.

⁵²Abd. Rahman Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 192.

namun terdapat juga sisi kemudharatannya, maka syarat izin poligami dari isteri mulai diwacanakan dan dipertimbangkan menjadi salah satu syarat untuk sahnya berpoligami. Umumnya jika seorang laki-laki berpoligami secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan awal dari pihak laki-laki kepada pihak isteri jelas hal semacam ini akan menimbulkan kemudharatan dan akhirnya bermuara kepada kerusakan rumah tangga.

Tujuan pokok hukum Islam adalah merealisasikan kemashlahatan. Tidak semua persoalan umat disebutkan secara tegas hukumnya atau dalilnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, hal-hal yang tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah dapat diselesaikan melalui *qiyas*. Banyak persoalan baru yang tidak ada dalilnya dalam *al-Qur'an* dan sunnah, sehingga harus diselesaikan dengan metode lain seperti *mashlahah al-mursalah*.

Imam Al-Ghazali menyatakan: *Mashlahah itu berintikan menarik manfa'at dan menolak mudharat. Sinonimnya adalah "munasabah (relevansi suatu sifat dengan hukum) yang bersubstansikan memelihara tujuan hukum Islam. Tujuan itu ada yang berdimensi keagamaan dan keduniaan. Ia terbagi kepada mewujudkan yang searti dengan menarik manfaat dan melestarikan yang searti dengan menolak mudharat"*.⁵³

Dari sini lahir *mashlahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (keburukan), berangkat dari tujuan *syara'* menciptakan kedamaian di alam semesta ini. Tujuan pokok hukum Islam jelas merealisasikan kemashlahatan. Tidak semua persoalan umat telah ditegaskan atau ada dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah, sehingga dapat diselesaikan melalui *qiyās*. Akan tetapi sangat banyak persoalan baru yang tidak ada sumber hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah, sehingga harus diselesaikan dengan metode lain seperti *mashlahah al-mursalah*.

Al-Ghazali menyatakan sebagai berikut:

فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

Artinya: "Tiap-tiap sesuatu yang mengandung tujuan untuk memelihara *ashal al-khamsah* (lima hal pokok) (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), maka sesuatu tersebut termasuk *mashlahah*. Dan tiap-tiap sesuatu yang tidak

⁵³Abu ʿamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Syifa' Al-Ghalīl Bayan al-Syabḥ al-mukhīl wa Masālik al-Ta'ālīl* (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), 159.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

*mengandung ashal yang lima tersebut, maka sesuatu tersebut termasuk dalam mafsadah dan menolak mafsadah tersebut adalah mashlahah”.*⁵⁴

Menurut Al-Ghazali *mashlahah* adalah memelihara tujuan *syara`*, dengan memelihara *ushul al-khamsah* (lima hal pokok) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka jika suatu penetapan hukum mengandung tujuan memelihara *ashal* yang lima maka hukum tersebut termasuk dalam *mashlahah*. Apabila sebaliknya suatu penetapan hukum tidak memelihara *ashal* yang lima maka hukum yang ditetapkan tersebut termasuk dalam *mafsadah* dan menolak *mafsadah* tersebut adalah termasuk dalam *mashlahah*. Dengan demikian tujuan meminta persetujuan dari isteri sebelumnya terlebih dahulu untuk menikahi perempuan lain adalah untuk memelihara agama, akal, keturunan, dan harta, karena jika tidak ada persetujuan isteri untuk berpoligami besar kemungkinan akan terjadi kerusakan agama, keturunan pemeliharaan rumah tangga, serta menimbulkan kemudharatan.

Al-Ghazali menyatakan, setiap *mashlahah* kembali kepada pemeliharaan maksud *syara`* yang diketahui melalui al-Qur'an, maupun *sunnah*, *ijma`*, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak pula melalui metode *qiyās*.⁵⁵ maka dipergunakan *mashlahah al-mursalah*, karena jika memakai *qiyās* maka harus ada dalil dasar (*maqis` alayhnya*). Cara mengetahui *mashlahah* yang sesuai dengan tujuan *syara`* itu adalah dengan beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari *al-Qur`ān*, maupun *sunnah*. Oleh sebab itu cara pengambilan *mashlahah* seperti itu disebut *mashlahah al-mursalah*, artinya terlepas dari dalil-dalil secara khusus, tetapi termasuk dalam petunjuk umum dari maksud *syara`* yang lima.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.⁵⁶

Artinya: “Tujuan (maksud) *syara`* menciptakan suatu hukum untuk makhluk ada

⁵⁴Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Mushtashfa Min ‘Ilm al-Ushul*, Cet, II (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub, 1971), 217.

⁵⁵Yang dimaksud dengan Qiyas ialah: Menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nash *syara`* tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nash hukumnya, karena adanya persamaan dari segi ‘ilat hukum. Terdapat empat unsur *qiyas* yang harus ada: a. *ashal* (dasar pokok). b. *furu`* (cabang). c. hukum *ashal*. c. ‘*illah*. Keempat unsur ini harus ada di saat memutuskan hukum *syara`*. Metode *qiyas* jika dikaitkan dengan metode *Istislahiyah* atau masalah *mursalah* tentu sama dari segi pengistimbatan hukum dan cara kerjanya. Misalnya al-Qur'an memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan tidak mengatakan “ah” kepada keduanya. Hukum memukul kedua orang tua diqiyaskan kepada larangan tersebut karena adanya kesamaan ‘*illat* yaitu sama-sama menyakiti, bahkan memukul lebih utama (*awlā*) untuk dilarang dari pada menyatakan “ah”. Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 161 dan 162.

⁵⁶Abū Ḥamid al-Ghazālī, *al-Mustashfa...*, 221.

lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Dari pernyataan Al-Ghazali tersebut dapat dipahami bahwa, *mashlahah* (*istishlah*) menurut pandangannya adalah suatu metode *istidlal* (mencari dalil) dari *nash syara`* yang bukan dalil tambahan terhadap *nash syara`*, melainkan *mashlahah* tersebut dijadikan sebagai salah satu dalil *syara`*. Dan menurut pandangan al-Ghazali, *mashlahah* itu merupakan *hujjah qath'iyah*.<sup>57</sup> (dalil yang kuat) selama mengandung arti memelihara maksud *syara`* walaupun dalam penetapannya masih bersifat *zhanni*.⁵⁸

Lebih jauh lagi Imam al-Ghazali menegaskan apabila mujtahid menafsirkan *mashlahah* dengan pemeliharaan maksud *syara`*, maka tidak ada jalan untuk diperselisihkan dalam mengikutinya, bahkan wajib diyakini bahwa *mashlahah* seperti itu adalah *hujjah* agama. Sekiranya di dalam suatu masalah itu ada perselisihan atau pertentangan, maka perselisihan tersebut hanyalah perselisihan antara satu *mashlahah* dengan *mashlahah* yang lainnya, Dalam hal ini bisa dilakukan *pentarjihan* yakni memilih yang lebih kuat terhadap salah satunya. Dalam hal ini Imam al-Ghazali menjelaskan sebagai berikut:

... لأن هذه المصلحة تعارضها آخر.⁵⁹

Artinya: "...karena *mashlahah* tersebut bertentangan dengan *mashlahah* lainnya".

Mashlahah al-mursalah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang imam dalam kekuasaannya, seperti kekuasaan imam untuk memerdekakan hamba sahayanya, membebaninya dengan pekerjaan atau dengan menebus dirinya untuk merdeka. Tetapi *mashlahah* tersebut sudah dicantumkan dalam al-Qur'an dan sunnah, yaitu dengan tujuan memelihara maksud *syara`*.

Persetujuan isteri terhadap suami yang ingin berpoligami secara metode *istishlahiyyah* dapat diterima karena melihat banyak 'illat yang terdapat dalam

⁵⁷Yang dimaksud dengan. *Qath'iyah* ialah: ayat-ayat yang *dilalah* maknanya bersifat pasti, dalam arti, hanya mengandung satu makna saja. Misalnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang pokok-pokok keimanan, keesaan Allah, keberadaan Rasul, tentang kitab-kitab suci yang diturunkan, tentang malaikat, hari kiamat dan tentang tujuan-tujuan utama pensyari'atan hukum Islam (*maqhasid al-syari'ah*), yaitu meraih manfaat dan kemaslahatan, serta menolak bahaya dan kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *Zhanni* ialah: Ayat-ayat yang *dilalah* maknanya mengandung lebih dari satu makna. Meskipun keberadaan teks/redaksi/nash/ semua ayat-ayat al-Qur'an bersifat pasti namun dari segi makna yang terkandung di dalam ayat-ayatnya, terdapat banyak makna ayat yang bersifat *zhanni al-dalalah*. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 122 dan 162.

⁵⁹Abu ʿāmid al-Ghazāly, *al-Mustashfa...*, 219.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

poligami terutama pada sang isteri. Dengan alasan bahwa poligami dapat menimbulkan kemudharatan kemaslahatan bagi suami dan isteri juga keluarga.

Suami yang berpoligami tanpa memberitahu isteri sebelumnya, pernikahan semacam ini jelas akan menuai masalah besar dalam rumah tangga, dengan alasan isteri tersakiti hatinya. Efek atau kemudharatannya menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaktentraman dalam rumah tangga, akhirnya isteri mencari cara-cara yang negatif agar hubungan antara isteri baru dengan suaminya terputus.

Dengan demikian tampak bahwa syarat adanya persetujuan isteri terhadap suami yang ingin melakukan poligami merupakan sesuatu yang sangat diperlukan demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Menjaga keharmonisan rumah tangga adalah bagian dari *maqhasid al-syari'ah*, karena tujuan syara` dalam menetapkan suatu hukum untuk makhluk itu ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Nabi Muhammad Saw. sangat senang jika umatnya dapat menjalankan perintah Allah Swt. dan mensyiarkan sunnah Rasulullah Saw. dengan baik dan tekun, karena salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat.

C. Penutup

Syarat poligami dalam fikih Syafi'iyah yakni berkemampuan untuk menanggung nafkah isteri-isteri dan keluarganya, karena suami berkewajiban menanggung nafkah isteri-isterinya baik lahir maupun bathin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini ialah berupa makanan dan minuman, pakaian, kediaman dan perobatan. Nafkah bathin adalah pelayanan atau pemenuhan nafsu biologis sang isteri.

Termasuk syarat poligami dalam fikih Syafi'iyah adalah memiliki kemampuan berlaku adil terhadap para isteri dan keluarga, adil di sini meliputi adil dalam menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan dan adil dalam giliran bermalam. Dalam fikih Syafi'iyah tidak didapati syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami, akan tetapi dibolehkan menambah syarat *wadh'i* dalam hal memelihara maksud syarak selama syarat tersebut tidak merubah ketentuan-ketentuan syarak. Syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami hanya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi hukum Islam.

Syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam hukum positif menurut metodologi ushul fikih Syafi'iyah sama sekali tidak memberi pengaruh apapun terhadap hukum bolehnya berpoligami, maka poligami boleh dilakukan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada isteri sebelumnya.

Secara Metode *Istislahiyyah* (*Mashlahah al-Mursalah*), syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami dapat diterima, dengan alasan bahwa poligami jika tidak mendapat persetujuan dari isteri sebelumnya akan mengundang kemudharatan bahkan berakhir kepada rusaknya rumah tangga. Sedangkan di dalam Islam diwajibkan memelihara agama, akal, harta, keturunan dan kehormatan, upaya memelihara ke lima hal ini metodenya terdapat dalam *mashlahah al-mursalah* dengan melihat berbagai pertimbangan baik tentang 'illat, sebab, hikmah dan mudharat poligami, demi untuk terciptanya keluarga yang *sakīnah mawāddah, wa rahmah* dan mendapat keridhaan dari Allah Swt. di dunia dan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Damanhuri, Ahmad. *Īdāh al-Mubham min Ma'ānī al-Sulam*, Jeddah: al-Haramain: t.th.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fatḥ al-Bārī* . Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anwar, Desi. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, cet. 1. Surabaya: Amelia, 2002.
- Basri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, cet. I. Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, edisi revisi ke-4. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI

- , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. IV. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Siasah (Implementasi kemeslahatan Umat)*, cet. I. Bogor: Kencana, 2003.
- Djazuli, Achmad & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet. IV. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Konferehensif*, cet. I, Jakarta: Zikra Hakim, 2004.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwaqafan di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Ciputat Pres, 2005.
- Al-Haytamī, Ibn Ḥajar. *Tuhfah al-Muḥṭāḥ*, Juz. VI. Libanon: Darul Fukad, 1997.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, juz I. T.tp: Dār Shādir, 1998.
- Ibn Katsīr, Al-Ḥāfiẓ, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, juz I. Beirut: t.p, 1997.
- Ibrahim Al-Bājūrī. *Ḥāsiyyah Al-Bājūrī*, jilid II. Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Putera, t.th.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu’amalah*, cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Kasanī, Abū Bakr Ibn Mas’ūd. *Badā’i’ al-Sanā’i’ Fi Tartīb al-Syar’i*, jilid VI. Beirut: Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Koto, H. Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Al-Māwardī, Abū Ḥusayn Ibn Muḥammad. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, jilid VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Mujib, Ahmad & Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis -Hadis Muttafaq’alaih*, cet. I. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mujib, Ahmad, H. Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis -Hadis Muttafaq’alaih*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nazari, H.Rafi’i. “Illah dan Dinamika Hukum Islam”, *tesis*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Rāfi’iy, ‘Abd al-Karīm bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm. *Al-‘Az̄z*, Taḥqīq Ali

Muhammad Ma'awwaz, juz VI. Beirut libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1997.

Al-Syarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, jilid 11-12. Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1993.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*, cet. II. Jakarta: P.T, Raja Grafindo Persada, 2002.

Wadjdy, Farid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

**METODE PEMBELAJARAN SAINS
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

Suardi Ishak

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
E-mail: suardi_ishak@yahoo.co.id

Abstrak

Sekularisasi sains dan teknologi dengan nilai-nilai agama sudah dibungkus sangat rapi oleh alam pemikiran Barat yang kemudian ditularkan ke berbagai sisi kehidupan universal termasuk pendidikan. Ilmu sekuler mengaku diri sebagai objektif, bebas nilai, dan bebas dari kepentingan lainnya termasuk agama. Bahkan ilmu sudah diposisikan sebagai pengganti kedudukan wahyu Tuhan (Al-Qur'an) sebagai petunjuk kehidupan modern. Islam memandang ilmu-ilmu rasional adalah penunjang pelaksanaan ibadah yang bersifat *mahdah*. Islam memandang bahwa sumber ilmu adalah wahyu, selanjutnya wahyu menuntut manusia menggunakan rasio untuk pengembangan ayat-ayat *kauniyah* dan *'am*. Hasil penelitian menunjukkan Al-Attas berpandangan bahwa ilmu sains adalah hasil rekayasa dan pengembangan rasio. Sumber dasar (*nas*) tidak memandang dualisme antara ilmu duniawi dengan ilmu ukhrawi, namun hasil ijtihad manusialah yang melahirkan berbagai aliran dan paham ilmu sehingga memunculkan perspektif yang bervariasi. Paham sekulerisme, ateisme dan lain-lainnya menyebabkan ilmu yang dikembangkannya disesuaikan dengan pola pikir pengembang. Al-Attas berpandangan bahwa ilmu yang berfungsi untuk menjalankan kewajiban baik kepada Tuhan maupun kepada manusia adalah wajib dituntut dan dimiliki pula, demikian juga sebaliknya. Berbagai pengembangan ilmu dan sains harus menjadi jalan atau sarana untuk melaksanakan ibadah.

Kata Kunci: *Sekularisasi sains; Islamisasi ilmu pengetahuan; Ijtihād*

Abstract

Secularization of science and technology with religious values have been wrapped so neatly by the nature of Western thoughts which is then transmitted to the various facets of life including general education. Secular science claim to be objective, value-free, and free of other interests, including religion. Even science has been positioned as a replacement for the position of Allah's revelation (Qur'an) as a hint of modern life. Islam considers rational sciences are supporting the implementation of worship that are *mahdah*. Islam considers that the source of knowledge is a revelation, a revelation further demands that humans use ratio for the development of the verses *kauniyah* and *'am*. The results show that Al-Attas view that science is the result of engineering and development ratio. Basic resource (*nas*) does not see the dualism between secular science with hereafter science, but the results of ijtihad is man who produce various schools and understand the science that led to varying perspectives. Secularism, atheism and others led to the development of science adapted to the mindset of developers. Al-Attas view that science serves to carry out the obligations both to Allah and to mankind is mandatory required and held as well, and vice versa. Various development science and science must be in a way or means to carry out worship.

Keywords: *Science secularization; Knowledge islamization; Ijtihād*

مستخلص

وقد اختتم علمنة العلوم والتكنولوجيا مع قيم الدين بدقة جدا وفقا لطبيعة الفكر الغربي ثم تنتقل إلى مختلف جوانب الحياة لا سيما في مجال التعليم. أن العلوم العلمانية تقر موضوعية وخالية من القيمة، وخالية من المصالح الأخرى، وكذلك في الدين. وقد تم وضعه حتى العلم كبديل عن مكانة وحي الله تعالى (القرآن الكريم)، وتلميحا من الحياة العصرية. يعتبر الإسلام العلوم العقلية تدعم تنفيذ العبادة التي هي محضة. يعتبر الإسلام أن العلم هو مصدر الوحي، والوحي يطلب البشر باستخدام العقل لتطوير الآيات الكونية والعامة. أظهرت النتائج العطاس يعتقد أن العلوم هي نتيجة التنمية الفكرية. القاعدة الأساسية (ناس) لا يرى الثنائية بين العلم الدنيوي مع الآخروي، ولكن النتائج الاجتهادية تولد وتحدد المدارس المختلفة وفهم العلم الذي أدى إلى وجهات نظر متنوعة؛ منها العلمانية، الإلحادية وغيرها، لتطوير العلوم تكييفها وفقا لعقلية المطورين. رأى العطاس أن العلم الذي يعمل على تنفيذ الالتزامات إلى الله للبشرية على حد سواء. وكذلك، بالعكس. ويجدر أن تكون التنمية المختلفة في العلم والعلوم وسيلة من وسائل لتنفيذ العبادة.

الكلمات الرئيسية : علمنة العلوم؛ أسلمة العلم؛ اجتهاد

A. Pendahuluan

Fenomena perkembangan ilmu pengetahuan (*science*)¹ tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi (*technology*),² karena kedua istilah tersebut sudah sangat padu dan terkait satu sama lain. sains dan teknologi sudah merambah dan menjiwai semua lini kehidupan manusia dalam era modern ini, tidak terkecuali dunia pendidikan dan alam berpikir umat manusia. Seperti sains yang sekuler³ mengaku diri sebagai objektif, bebas nilai (*value free*), dan menjadi aliran pemikiran serta ingin menggantikan keyakinan agama.⁴

Tetapi ternyata bahwa ilmu pengetahuan non agama kategori (*farā kifāyah*) terkadang telah melampaui dirinya sendiri. sains dan teknologi, misalnya yang semula adalah ciptaan manusia ternyata telah menjadi penguasa atas manusia itu sendiri. Paham sekularisme dan modernisasi dalam sains di era modern ini yang

¹Suatu sistem ilmu pengetahuan yang mempunyai bidang pengalaman tertentu dan disusun sedemikian rupa menurut azaz-azas tertentu sehingga menjadi suatu kesatuan. Masing-masing sistem diperoleh sebagai hasil pengkajian yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu (induksi dan deduksi). Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk mencapai objektivitas. Dunia hidup manusia terbagi atas berbagai lapangan pengalaman yang masing-masing diliputi oleh ilmu pengetahuan tersendiri: Ilmu pasti, ilmu-ilmu Alam, ilmu sosial (*humaniora*) dsb.

²Jess Stein, *The American Everyday Dictionary* (Published in New York, Random House, 1955), 481.

³ Sekuler adalah: Menetapkan kondisi pendidikan kepada hal-hal duniawi saja terlepas hubungannya dengan Agama (bukan keagamaan). Lihat John M.Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1976), 509.

⁴Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), 52.

mengarah bahwa Ilmu dapat menggantikan kedudukan wahyu Tuhan sebagai petunjuk kehidupan. Untuk mengantisipasi hal tersebut umat Islam khususnya perlu secara tegas dan tidak bias memahami eksistensi sains sesuai dengan kacamata agama, baik dalam konteks *far* 'ayn dan *far* kifāyah, sains dan teknologi ala Barat termasuk kedudukan dan signifikansinya dalam teori maupun dalam praktik.

Sekularisasi sains dan teknologi dengan nilai-nilai agama sudah dibungkus sangat rapi oleh alam pemikiran Barat yang kemudian ditularkan ke berbagai sisi kehidupan manusia termasuk pendidikan. Ilmu sekuler mengaku diri sebagai objektif, bebas nilai, dan bebas dari kepentingan lainnya termasuk Agama.⁵ Agama di satu pihak, sains dan teknologi di lain pihak, masing-masing harus berdiri sendiri secara terpisah, sains adalah sains⁶ juga sains dan teknologi menganut faham kebebasan nilai (*value free*).⁷ Tetapi ternyata dalam alam modern ini bahwa ilmu telah melampaui dirinya sendiri, dimana ilmu yang semula adalah ciptaan manusia akhirnya menjadi penguasa atas manusia itu sendiri. Bahkan ilmu sudah diposisikan sebagai pengganti kedudukan wahyu Tuhan (al-Qur'an) sebagai petunjuk kehidupan modern .

B. Pembahasan

Sains dan teknologi sudah merambah semua lini kehidupan manusia modern tidak terkecuali dunia pendidikan dan alam berpikir umat manusia. Sehingga umat Islam khususnya banyak yang bias dalam memahami sains dan teknologi apakah termasuk pendidikan kategori *far* 'ayn atau *far* kifāyah, baik dalam teori maupun dalam praktik yang terjadi sekarang ini pada humanisme sekuler,⁸ sebuah filsafat yang menjiwai seluruh kurikulum pendidikan dimana agama diberi sedikit penekanan di luar pendidikan agama itu sendiri.

Maksud yang ingin dicapai dalam kajian ini agar pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran sains dan teknologi tidak melepaskan eksistensi kekuasaan Allah Swt. dalam tiap materi sains yang dipelajari dan teknologi yang

⁵*Ibid.*, 54.

⁶ Darwis Soelaiman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Perspektif Barat dan Islam)*, Hand Out Kuliah, 15.

⁷Kontroversi konsepsi antara ajaran Islam dengan sekularisme sains barat dan agama, dimana Islam mempunyai doktrinasi bahwa ilmu pengetahuan (sains dan teknologi) itu tidak bebas nilai, sementara aliran sekularisme barat (moderen) menganut paham bahwa Ilmu pengetahuan/teknologi itu bebas nilai.

⁸Suatu sistem pemikiran dan pemahaman yang menggiring manusia kepada pemisaan antara agama dengan berbagai kehidupan termasuk bidang sains dan teknologi.

diaplikasikan mulai di sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat. Pendidikan Islam sebenarnya mampu menepis idealisme sekuler yang tertanam rapi dan berlaku dalam sistem pendidikan dewasa ini, skaligus menanam nilai-nilai ilahiyah secara komprehensif. Sekularisasi sains dan teknologi dengan nilai-nilai agama sudah dibungkus sangat rapi oleh alam pemikiran dan ilmuwan Barat itu sendiri, mereka beranggapan bahwa agama dapat menghambat kemajuan sains dan teknologi. Agama dengan sains dan teknologi harus berdiri masing-masing secara terpisah, *science is for science*,⁹ dengan menganut paham kebebasan nilai (*value free*).¹⁰

Adapun agama Islam datang tanpa memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Sekularisasi antara agama dengan sains dan teknologi ini sangat ditentang oleh Islam, karena agama Islam berpedoman kepada Firman Allah dalam al-Qur'an tentang alam Semesta ini serta isinya adalah milik Allah Swt., seperti difirmankan Allah Swt. dalam surat *Al Jāthiyah* (45): 3-5. *Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.*

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman tentang fenomena alam semesta dan sains yang sangat besahaja diciptakan-Nya untuk manusia. Firman Allah Swt.: *“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.* (Al-Baqarah: 164)

Al-Qur'an sejak ayat pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw telah

⁹Darwis Soelaiman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan (Perspektif Barat dan Islam)*, Hand Out Kuliah, 15.

¹⁰Kontroversi konsepsi antara ajaran Islam dengan sekularisme sains barat dengan agama, dimana Islam mempunyai doktrinasi bahwa ilmu pengetahuan (sains dan teknologi) itu tidak bebas nilai, sementara aliran sekularisme barat (moderen) menganut paham bahwa Ilmu pengetahuan/teknologi itu bebas nilai (*value free*).

METODE PEMBELAJARAN SAINS

menyiratkan perhatian khusus terhadap eksistensi ilmu pengetahuan, hal ini disemangati dengan turunnya ayat yang mula pertama yaitu surat al-‘Alaq: 1-5. “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*”.

Ayat di atas sangat jelas menerangkan bahwa tidak ada ruang dan celah untuk keluar dari peran dan eksistensi nilai ilahiyah dari setiap titik sains dan teknologi kecuali semuanya dalam petunjuk Allah Swt. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri oleh seorang pun bahwa kebenaran al-Qur’an telah membuka peluang sebesar-besarnya kepada umat manusia, baik muslim, non-muslim bahkan sekalipun kelompok jin, untuk menerawang alam semesta dan alam jagat raya ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang disimpan Allah Swt. Jin dan manusia ditantang oleh Allah Swt. untuk menembus angkasa luar (*outer space*),¹¹ keluar dari planet bumi kealam luar untuk bertamasya ke planet-planet lain atau ke bintang-bintang lain dialam semesta ini.¹² Dalam memahami ayat ini tampaknya manusia baru sanggup melakukan pekerjaan itu apabila ia memiliki keahlian (*skill*) dimana dalam ayat diatas diisyaratkan istilah “*sulṭan*”, banyak para ahli mengatakan yang dimaksud dengan *sulṭan* oleh Allah Swt. mungkin sekali bermakna sains dan teknologi canggih (*science and sophisticated technology*).¹³

Allah memperbolehkan dan mendorong manusia untuk mengadakan eksplorasi, tetapi manusia tidak akan mampu mencapainya tanpa *power* atau ‘*sulṭan*’ atau otoritas (*authority*). Setiap kawasan dan zona di alam ini mempunyai energi, jika ingin melintasinya maka ia harus menggunakan teknologinya masing-masing.

Dunia modern dewasa ini nyaris tidak ada batas-batas antar negara. Prinsip-prinsip universalitas dan globalisasi yang hampir berlaku umum dalam semua bidang kehidupan manusia tak terkecuali bidang pendidikan. Sehingga begitu sulit untuk memisahkan dan memilah antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Manusia sekarang begitu larut dalam kegemilauan sains dan teknologi yang

¹¹The unlimited or indefinitely great expanse of universe in which all material objects are located such as: (earth, sun, moon, stars and other planets). Baca: Jess Stein, *The American Everyday...*, 453.

¹²TH.Thalhas, dkk. *Spektrum ...*, 29.

¹³TH.Thalhas, dkk. *Spektrum ...*, 29.

kunsumeristik merambah kesetiap sisi kehidupan manusia. Arus informasi dengan menggunakan teknologi canggih, audio visual, sarana komunikasi dan transportasi benar-benar telah menghapus batas-batas geografis antar negara. Hal ini tidak bisa dibendung lagi oleh manusia itu sendiri.

Perkembangan modernisasi pada sains dan teknologi ini telah membentuk pola pikir tersendiri dalam masyarakat antara lain membentuk gaya hidup konsumerisme, dan juga merasuki ke dunia pendidikan umum dan tak terkecuali pendidikan Islam. Dalam hal ini dengan gegap gempita pendidikan sains dan teknologi (ilmu kealaman) itu sendiri diterima dengan lapang dada dalam sistem pendidikan kita. Ilmu sekuler mengaku dirinya sebagai *objektif, value free* dan bebas dari kepentingan lainnya. Tetapi ternyata bahwa ilmu telah melampaui dirinya sendiri. Ilmu dan teknologi yang semula adalah ciptaan manusia telah menjadi penguasa atas manusia itu sendiri. Ilmu telah menggantikan kedudukan wahyu Tuhan sebagai petunjuk kehidupan.¹⁴

Tanpa disadari pengaruh nilai sekularisme pun memasuki jiwa sains dan teknologi itu sendiri. sekularisme dimaksudkan sebagai usaha membebaskan umat Islam dari rasa kemestian keterikatan pada ajaran agama yang merupakan tradisi dan sesungguhnya duniawi dan bukan sakral. Oeh karena itu iman dan nilai tidak bisa begitu saja dielakkan dalam pendidikan, kedua aspek tersebut harus diberikan kedudukan sentral dalam sistem pendidikan, karena kita mendasarkan pandangan dan pendapat kita pada iman dan nilai dasar tertentu, baik yang dipegangi secara kuat dan maupun yang dipahami secara samar.¹⁵

Dalam dunia pendidikan sekarang eksistensi ilmu pengetahuan seolah telah dibagi ke dalam dua firqah (bagian), yaitu pendidikan ilmu umum dan pendidikan agama. Hal ini terjadi karena menguatnya pengaruh budaya dan sistem pendidikan barat yang menglobal, sehingga mampu menggeser nilai dan sistem pendidikan suatu bangsa.

Adapun agama Islam datang datang tanpa memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Realita sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah berhasil mengusung kecemerlangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan diantaranya kedokteran (medis), perbintangan (meteorologi), bangunan (arsitek), kimia, filsafat,

¹⁴Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu...*, 52.

¹⁵Nasim Butt, *Sains dan Masyarakat Islam*, Terj. Masdar Hilmy (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 127.

METODE PEMBELAJARAN SAINS

dan ilmu mantiq (ilmu metodologi logika).¹⁶

Sudah sekian lama terjadi pemisahan (sekulerisasi) antara agama dan kehidupan nyata yang terjadi di barat dan terus berlanjut sampai sekarang. Masyarakat barat berpendapat bahwa agama adalah masalah pribadi, dan mempunyai pandangan bahwa teknologi buatan mereka adalah segala-galanya.

Di Indonesia misalnya sekularisme ilmu pengetahuan itu sangat terlihat, dengan berjalannya dua sistem pendidikan formal, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama. Kurikulum pendidikan umum didominasi oleh mata pelajaran umum yang terlepas dari ikatan dan nilai-nilai agama bahkan hampir-hampir tanpa sentuhan nilai Islami. Hal ini merupakan kristalisasi sekularisme ilmu pengetahuan (*science*) dan pengetahuan agama. Sementara mata pelajaran agama mendapat porsi dan persentase yang sangat kecil dalam sistem pembelajaran umum.

Pendidikan agama di Indonesia juga terjadi sekularisasi internal dari kurikulum agama itu sendiri. Dimana mata pelajaran umum berjalan dengan sendiri-sendiri tanpa dibangun khusus dari sumber-sumber agama, dengan kata lain sama dengan pembelajaran pada sekolah umum. Kecuali mata pelajaran tertentu seperti agama Islam, Fiqh, al-Qur'an, Hadis, dan lain-lain, merupakan mata pelajaran kurikulum agama. Mata pelajaran tersebut merupakan inti ajaran Islam yang membahas tentang berbagai aspek keagamaan yang mempunyai hubungan langsung dengan kebutuhan hidup manusia didunia dalam hubungannya dengan Allah Swt. dan manusia dengan lingkungannya.

Iman dan nilai-nilai ilahiyah tidak bisa begitu saja dielakkan dalam pendidikan, dan sudah semestinya tidak boleh diabaikan. Sepatutnya, kedua hal tersebut harus diberikan kedudukan sentral dalam system pendidikan, karena kita wajib mendasarkan pandangan dan pendapat kita pada iman dan nilai dasar tertentu, baik yang dipegangi secara kuat maupun yang dipahami secara samar.¹⁷

Katakanlah air sebagai sumber kehidupan, dalam sains modern yang sekuler dikatakan bahwa air sebagai sumber daya alam yang berasal dari dalam tanah, gunung, sumur, hujan dan lain-lain tanpa lagi menyebutkan pencipta air itu sendiri. Namun dalam sistem internalisasi pembelajaran yang penulis maksudkan adalah seorang pengajar harus mampu mengajarkan lebih jauh tentang eksistensi nilai iman

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 160.

¹⁷Nasim Butt, *Sains ...*, 127.

dan takwa (IMTAK) dalam konteks sumber air tersebut yaitu bersumber dari Allah Swt. Demikian juga di dalam bidang-bidang sains dan teknologi lainnya, agar mampu diejawantahkan ke dalam konteks nilai-nilai ilahiyah yang holistik dalam bentuk iman dan taqwa.

Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pegangan hidup utama sepanjang masa untuk seluruh umat manusia. Tidak ada keraguan di dalamnya sebagaimana telah dinukilkan sendiri oleh Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 2: *"Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa"*.

Di samping sebagai petunjuk, pegangan hidup dan inspirasi, Al-Qur'an yang merupakan samudra ilmu pengetahuan (sains) dan tersirat muatan-muatan teknologi yang tak bertepi. Tak akan pernah habis untuk dikaji dan digali kedalaman kandungan ilmunya dan diimplementasikan dalam realitas kehidupan sains dan teknologi manusia sepanjang masa.

Walaupun sesungguhnya al-Qur'an bukanlah kitab ilmiah yang dapat disetarakan dengan buku-buku ilmiah buatan manusia. Al-Qur'an tergolong bagian dari ilmu Allah Swt. yang maha luas. Pendekatan yang digunakan oleh al-Qur'an untuk mengungkapkan suatu kaedah ilmu pengetahuan amat berbeda dengan sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh para saintis atau ilmuwan.

Al-Qur'an senantiasa memadukan antara potensi hati dan akal. Hati berfungsi memahami, menghayati dan merasakan keagungan dan kekuasaan Allah Swt., sedangkan akal berfungsi memikirkan, merenungi dan menganalisis ayat-ayat Allah Swt. yang ada di alam ini, maka ayat-ayat Allah Swt. pada dasarnya tidak terbatas pada teks al-Qur'an saja, tetapi juga terdapat di jagat raya.

Salah satu rahasia kebenaran al-Qur'an adalah pengungkapan isyarat-isyarat ilmiahnya yang membuat kagum ilmuwan masa kini terlebih yang menyampaikannya adalah seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis dan hidup di lingkungan masyarakat terbelakang, yaitu Rasulullah Muhammad Saw.

Sementara itu buku ilmiah karangan manusia disusun berdasarkan sistematika tertentu dan teori-teori tertentu pula. Teori sains ini berpeluang untuk digugat keabsahannya. Maka teori-teori ilmiah itu sewaktu-waktu dapat dirubah, berkembang dan bahkan tidak berlaku lagi ketika suatu teori baru ditemukan, karena ini hasil eksperimen dan penelitian ilmiah manusia. Kriteria ilmiah meliputi metode, sistematika, objektifitas dan konsistensi dalam mengungkapkan suatu ide atau

METODE PEMBELAJARAN SAINS

pemikiran, sedangkan al-Qur'an tidak mengikuti aturan-aturan ini karena ia (al-Qur'an) bukan buku ilmiah.

Konsep sains masa kini adalah suatu konsepsi yang memerlukan bukti empirik. Artinya apabila ada seorang mengutarakan suatu teori, maka pakar sains tidak akan menghiraukannya, kecuali apabila ia sanggup menghadirkan bukti empirik melalui beberapa tahapan ujian ilmiah (*scientific experiment*)¹⁸ Maka jelaslah bahwa posisi al-Qur'an sebagai kalam suci ilahi dalam proporsi sains dan teknologi, demikian juga posisi buku-buku ilmiah karangan manusia. Islam dengan petunjuk al-Qur'an tidak pernah memisahkan antara sains dan teknologi dengan agama. Sejarah telah mencatat bahwa Islam menjadi pancaran mentari sains dalam bidang Ilmu kedokteran, Falaq, Teknik, Alam, Filsafat, Logika dan lain-lain.

Merujuk pada pemikiran Al-Attas, islamisasi sains dan ilmu pengetahuan ditandai dengan kelompok ilmu yang musti dituntut dan dimiliki oleh setiap muslim. Ilmu-ilmu yang wajib tersebut diantaranya tentang dasar keislaman (Tauhid, Fikih dan Akhlak). Ilmu dasar ini menjadi pilar pengembangan cabang-cabangnya dalam sains, psikologi, sosiologi dan lain sebagainya sebagai penjabaran dan pengejawantahan serta wahana penginternalisasian nilai-nilai transendental. Keseimbangan fisik dan psikis, iman dan amal, fikir dan zikir adalah tujuan esensi dari pendidikan Islam. Ilmu yang berhubungan erat dengan kewajiban maka menuntutnya adalah wajib, demikian juga untuk dapat melaksanakan sesuatu yang sunah dan atau mubah maka menuntutnya demikian juga. Pengimplementasian ibadah yang *ghairu mahdah* seperti pengembangan keilmuan yang berbasis rasional seperti sains, ilmu-ilmu alam, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan termasuk dalam kategori *farā kifāyah*.

Pada tataran konsep Al-Attas telah mengembangkan metodologi pengislaman sains dan ilmu pengetahuan diantaranya dengan sosialisasi dalam berbagai kesempatan (seminar, workshop, diskusi) dan menuangkan dalam tulisan baik buku maupun artikel-artikel. Usaha Al-Attas untuk mengislamisasikan ditandai dengan mendirikan lembaga pengajaran dan penelitian yang khusus pada pemikiran Islam terutama filsafat sebagai jantung proses Islamisasi. Gagasan tersebut disambut positif oleh pemerintah Malaysia sehingga pada 22 November 1978 berdirilah ISTAC (*International Institute of Islamic Thought and Civilization*) dengan Al-Attas sebagai

¹⁸Hasan Basri, *Spektrum Saintifika Al-Qur'an* (Jakarta: Balai Kajian Tafsir Al-Qur'an, 2001), 79.

ketuanya. Ia juga menganjurkan setiap pendidik sains muslim tidak boleh memisahkan antara IPTEK dengan IMTAK sebagai dasar pengkaderan generasi Muslim. Konsep filosofisnya ialah pemilihan kata *ta'dib* (bukan yang lainnya) untuk membentuk manusia yang beradab baik kepada diri, alam maupun kepada Tuhannya.

Pembelajaran sains sebaiknya dilaksanakan melalui penelitian ilmiah (*scientific inquiry*) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran sains menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah.

Sains bisa disebut juga Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sains berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga sains bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan sains diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan sains diarahkan untuk *inquiry* dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar.¹⁹

Umumnya metode yang digunakan dalam sains digunakan pula dalam bidang studi lain, seperti ilmu sosial atau yang lainnya. Pemilihan metode tentu saja disesuaikan dengan karakteristik materi, situasi dan kondisi peserta didik serta sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Perlu diketahui tidak ada metode yang cocok untuk semua materi, dan di dalam pembelajaran suatu materi tertentu dapat saja menggunakan lebih dari satu metode. Adapun ragam metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran sains antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Metode pembelajaran sains antara lain meliputi:

1) Metode eksperimen

Metode eksperimen banyak digunakan dalam pengajaran sains dan jarang sekali diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam metode ini mengajar dikembangkan

¹⁹Depdiknas, *CD ROM KTSP 2006*.

METODE PEMBELAJARAN SAINS

melalui pengembangan suatu percobaan tentang sesuatu aspek pengetahuan yang perlu diverifikasi atau diuji. Langkah-langkah umum metode eksperimen meliputi sebagai berikut: a) Memilih suatu masalah dan merumuskannya; b) Mengumpulkan dan menyusun materi dan informasi sebagai bahan eksperimen; c) Membuat hipotesis; d) Melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis; e) Membuat kesimpulan. Metode eksperimen ini memiliki manfaat sebagai berikut: a) Menumbuhkan kesanggupan menguasai data atau faktor-faktor tertentu dalam ikatan proses tertentu; b) Membina kesanggupan untuk membuktikan sesuatu pendapat atau hipotesis; c) Terhindar dari situasi yang bersifat verbalistik.

Beberapa pedoman pelaksanaan metode eksperimen adalah sebagai berikut: a) Menumbuhkan minat akan topik yang akan dibuat eksperimennya; b) Mengusahakan supaya setiap langkah yang dibuat dapat dimengerti dengan jelas oleh mahasiswa; c) Mengusahakan supaya waktu untuk penyelenggaraan eksperimen tidak terlampaui lama hingga menimbulkan kebosanan; d) Mengadakan suatu diskusi pendek tentang eksperimen yang baru dilakukan sebelum mengambil sesuatu kesimpulan.²⁰

2) Metode Diskusi

Metode diskusi merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh mahasiswa dan dosennya. Dalam metode ini dibahas suatu masalah dan diungkap berbagai kemungkinan pemecahan atau jalan keluarnya. Metode diskusi biasanya dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a) Memilih dan menetapkan suatu materi atau masalah yang pantas untuk didiskusikan. Masalah yang dipilih harus memungkinkan timbulnya beberapa pendapat, harus ada dalam batas-batas kemampuan mahasiswa pemecahannya; b) Pengajar sebagai fasilitator atau pembimbing diskusi memberikan penjelasan-penjelasan tentang masalah yang dijadikan pokok diskusi, sebab-sebab perlunya didiskusikan, dan tujuan yang ingin dicapai dari diskusi tersebut; c) Setelah peserta diskusi memahami duduknya masalah, maka para mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing; d) Pemimpin diskusi (Pengajar atau kelompok mahasiswa) harus mampu mengatur giliran mengemukakan pendapat dari peserta dengan tertib dan

²⁰Rahman, T., *Pendekatan dan metode dalam Program Pembelajaran Praktikum* (Bandung: Jurusan Pendidikan Biologi UPI, 2006), 78.

mengarahkan pembicaraan; e) Pimpinan diskusi harus menghimpun persamaan-persamaan pendapat dari para peserta diskusi, titik-titik perbedaannya dan akhirnya membuat suatu kesimpulan sebagai akhir dari diskusi.

Metode diskusi merupakan metode yang baik untuk mencapai tujuan tujuan yaitu: a) Untuk melatih kemampuan mengeluarkan pendapat tentang suatu masalah, mempertahankan pendapat, dan mengadakan penyesuaian-penyesuaian pendapat dengan yang lain atas dasar tukar pikiran yang sehat; b) Melatih kemampuan berpikir bersama, membina kesanggupan memberikan pendapat, dan menerima serta menghargai pendapat orang lain; c) Melatih menggunakan pengetahuan guna memecahkan suatu masalah. Metode diskusi dapat dilaksanakan secara efektif antara lain melalui hal sebagai berikut: a) Mengusahakan agar masalah yang didiskusikan menarik bagi semua peserta dan mengundang berbagai jawaban; b) Mengusahakan semua peserta dapat secara aktif mengemukakan dan mempertahankan pendapatnya secara obyektif; c) Mempersiapkan tempat diskusi yang memungkinkan setiap peserta dapat berhadapan dan peserta merasa sama kedudukan dan hak-haknya. d) Mengusahakan kesimpulan yang diambil tepat dan menghargai pendapat semua peserta.²¹

3) Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang berusaha untuk mengkombinasikan cara-cara penjelasan lisan seperti metode ceramah dengan perbuatan yang berusaha membuktikan atau memperagakan dengan alat apa yang dijelaskan secara lisan. Dalam metode demonstrasi ada tiga hal yang ditonjolkan, yaitu jenis pekerjaan atau keterampilan, cara pengerjaan, dan alat alat untuk pengerjaannya. Hal-hal yang perlu ditempuh dalam demonstrasi antara lain: a) Menentukan program demonstrasi yang akan dilakukan, dan memahami serta mencoba program tersebut sematang mungkin; b) Menyampaikan pokok-pokok dari kegiatan demonstrasi tersebut, dan apa tujuannya; c) Mempersiapkan peralatan yang akan diperlukan sebaik dan semenarik mungkin; d) Melakukan demonstrasi sebaik mungkin sesuai dengan daya tangkap dan daya ingat peserta; e) Mengadakan evaluasi pada hasil demonstrasi melalui suatu diskusi pendek.

Manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran dengan metode diskusi antara lain sebagai berikut: a) Menghindari verbalistik; b) Memberikan kesempatan kepada

²¹Alpandie, I., *Didaktik Metodik Pendidikan Umum* (Surabaya: Usaha Nasional, 1999), 84.

METODE PEMBELAJARAN SAINS

peserta untuk mengamati sendiri atau melakukan sendiri sehingga dapat meningkatkan keterampilan; c) Lebih meningkatkan daya ingat, karena dalam demonstrasi ada unsur ceramah, eksperimen, dan diskusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan demonstrasi antara lain: a) Menciptakan demonstrasi sejelas dan semenarik mungkin; b) Mengupayakan dengan demonstrasi tersebut peserta dapat mengikutinya; c) Menggunakan waktu demonstrasi tersebut seefisien mungkin sehingga tidak membuat peserta bosan; d) Melakukan diskusi pendek sehingga dapat mengevaluasi keberhasilan dari demonstrasi tersebut.

4) Metode Inquiry dan Discovery

Metode mengajar *inquiry* mengandung proses mental yang tingkatannya cukup tinggi. Proses mental yang ada pada *inquiry* di antaranya: merumuskan masalah, membuat hipotesis, mendesain eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Dalam pembelajaran *inquiry*, kegiatan belajar mengajar harus direncanakan agar siswa memperoleh pengalaman, sehingga berkesempatan untuk mengalami proses *inquiry*.

Inquiry dan *discovery* dapat dipandang sebagai pola mengajar yang memiliki makna yang sama, namun dapat berbeda sisi tinjauannya. *Inquiry* lebih mengarahkan pada proses penyelidikan, penggalian, pencarian, dan penelaahan sesuatu objek yang harus dipelajari. Sedangkan *discovery* mengutamakan hasil dari penyelidikan, penggalian, pencarian, dan penelaahannya. Dengan demikian metode *Inquiry* atau *discovery* dapat diartikan sebagai pola mengajar yang membina pemahaman atas pengetahuan, sikap atau keterampilan tertentu melalui penyelidikan, penggalian, pencarian dan penelaahan suatu objek yang harus dipelajari. Kedua metode tersebut memiliki kadar Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang tinggi dan selaras dengan pandangan pembelajaran modern.

Inquiry atau *discovery* berdasarkan banyak sedikitnya keterlibatan pembimbing atau dosen/guru atas mahasiswa/siswa dapat dibedakan atas *inquiry* / *discovery* terbimbing dan bebas. *Inquiry* atau *discovery* berdasarkan sifat objeknya dapat dibedakan atas *inquiry/discovery* dokumenter, *inquiry* kepustakaan, *inquiry* nilai, dan *inquiry* lapangan.

Metode *inquiry* dan *discovery* dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Merumuskan aspek kognitif atau afektif, atau psikomotor yang akan dibina, dan juga tujuannya; b) Menentukan sumber-sumber belajar yang harus

diamati, digali, dicari, dan ditelaah secara spesifik dan rinci; c) Menyampaikan rumusan sasaran/tujuan dan sumber-sumber belajar yang telah dirumuskan kepada peserta didik untuk dilaksanakan; d) Memberikan pengarahan tentang apa yang harus dilakukan peserta didik; e) Pengajar bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator atas kegiatan peserta didik; f) Menyusun dan merumuskan hasil kegiatan; g) Membahas hasil kegiatan atau penelitian dan mendiskusikannya dalam kelas; h) Perumusan kesimpulan; i) Pengajar harus menutup kegiatan *inquiry /discovery* dan memantapkan pemahaman atas konsep-konsep dan generalisasigeneralisasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan metode *inquiry* adalah sebagai berikut: a) Pemahaman peserta didik akan lebih mantap karena diberi pengalaman langsung untuk mencari dan menemukan sendiri fakta, konsep atau generalisasi; b) Membina kemampuan belajar sendiri sesuai kemampuan, minat, dan kebutuhannya; c) Membina tumbuhnya sikap dan kepercayaan diri serta upaya belajar sepanjang hayat (*life long education*); d) Mengembangkan kemampuan menggali dan menyadari masalah serta memecahkannya.

Syaiful Hijrah mengemukakan beberapa keuntungan menggunakan metode mengajar *inquiry* adalah: Perkembangan cara berpikir ilmiah, seperti menggali pertanyaan, mencari jawaban, dan mengumpulkan/memproses keterangan dengan *inquiry approach* dapat dikembangkan seluas-luasnya. Selain itu dapat melatih siswa untuk belajar sendiri dengan positif sehingga dapat mengembangkan pendidikan demokrasi.²²

Hal-hal yang perlu diperhatikan demi efektifnya pembelajaran dengan menggunakan metode *inquiry/discovery* antara lain sebagai berikut: a) Pengajar harus membuat perencanaan tentang apa yang harus digali, dicari, diamati, dan ditemukan oleh mahasiswa; b) Pengajar harus memberi motivasi dan semangat yang memadai kepada mahasiswa agar *inquiry* berjalan dengan baik; c) Pengajar harus memberikan kejelasan yang optimal tentang sasaran, langkah, dan caracara berinquiry kepada seluruh mahasiswa; d) Pengajar harus dapat bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang memadai dan dapat bertindak objektif.²³

²²Syaiful Hijrah, "Penerapan Metode Mengajar Inquiry Dalam Pembelajaran Sains Di Sekolah Dasar", <http://www.pembelajaran.com>, diakses 20 Agustus 2010.

²³Pachrudin, E. K. *Proses Belajar Mengajar: Asas, Strategi dan Metode* (Bandung: Jurusan Pendidikan Dunia Usaha IKIP Bandung, 1989), 78.

METODE PEMBELAJARAN SAINS

Kegiatan *inquiry* pada pelajaran sains diantara hambatan yang dapat muncul dalam aplikasinya sebagai berikut :

1. Kemungkinan sebagian siswa tidak berperan serta aktif dalam metode *inquiry* ini sehingga justru menghambat jalannya pengajaran melalui metode ini.
2. Tingkat kedewasaan siswa kurang mencukupi untuk metode *inquiry* ini. Tuntutan peran terlalu tinggi sehingga siswa tidak mampu menjalankan peran ini dengan baik.
3. Persiapan dan penjelasan yang kurang dari guru bisa membuat metode *inquiry* ini terhambat. Siswa harus diberi penjelasan yang cukup sebelum acara dimulai. Guru harus membantu persiapan sematang mungkin supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar.
4. Adanya keengganan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam metode *inquiry* ini. Siswa seringkali tidak bersedia untuk ikut serta dalam metode *inquiry* ini yang telah dirancang, walaupun guru menganggap siswa tersebut mampu berperan serta.
5. Kurang kompetennya guru dalam merancang dan mengendalikan metode *inquiry* ini dapat menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran
6. *Inquiry approach* kurang cocok pada siswa yang usianya terlalu muda, misalnya Sekolah Dasar (SD) kelas 1, 2, dan 3.

5). Metode Team Teaching

Team teaching merupakan suatu metode mengajar dimana pelajaran disajikan oleh lebih dari satu orang guru atau Pengajar secara bersama-sama dalam satu waktu pada kelas yang sama. Mungkin juga ada beberapa pengajar untuk satu mata pelajaran dimana waktu pemberiannya bergiliran pada kelas yang sama.

Team teaching dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menetapkan anggota tim pengajar yang memiliki keahlian masing-masing sehingga pada saat kerja sama dapat saling melengkapi;
- b) Merumuskan tujuan pembelajaran dan pedoman penilaian serta membagi tugas di antara anggota tim;
- c) Pengaturan giliran pelaksanaan pengajaran dan bagi yang tidak kebagian giliran setidaknya dapat bertindak sebagai fasilitator.

Manfaat dari *team teaching* antara lain sebagai berikut: a) Bila Pengajar satu berhalangan dapat diganti oleh Pengajar lain sehingga pembatalan pembelajaran dapat dihindari; b) Kerja Pengajar dapat lebih ringan; c) Proses pembelajaran dapat

lebih mantap dan lengkap karena adanya bantuan Pengajar lain; d) Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dari beberapa sumber karena tidak hanya dari seorang dosen; e) Team teaching memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperdalam keahliannya sesuai dengan bidang yang diminatinya.

Untuk mengefektifkan team teaching antara lain diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Upayakan anggota tim kompak, saling membantu, tidak saling menjelekan dan memiliki pandangan yang searah untuk tercapainya tujuan pembelajaran; b) Upayakan fasilitas pembelajaran dapat memadai; c) Setiap anggota tim hendaknya memperoleh bagian sesuai dengan kemampuan dan minatnya; d) Dapat menyajikan pembelajaran yang membangkitkan semangat belajar siswa.²⁴

Pembelajaran melebihi fakta merupakan salah satu dari konsep pembelajaran dalam *Concept Based Curriculum*. Menurut Wina Sanjaya,²⁵ *Concept Based Curriculum* memuat 3 konsep belajar yaitu belajar melebihi fakta (*learning beyond the facts*), belajar bagaimana berpikir (*learning how to think*), belajar bagaimana menemukan dan mengonstruksi fakta baru (*learning how to find and construct new facts*).

Berpikir konseptual merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi/mengenal pola-pola atau hubungan/keterkaitan-keterkaitan antara situasi-situasi yang tidak terkait secara jelas, dan mengidentifikasi isu-isu utama atau mendasar dalam situasi-situasi yang kompleks. Berpikir konseptual termasuk menggunakan pertimbangan yang kreatif, konseptual atau induktif (atas dasar fakta yang diketahui). Pengembangan pembelajaran dengan *concept based curriculum* merujuk pada struktur pengetahuan di mana fakta dielaborasi menjadi konsep, prinsip dan teori. Konsep tersebut juga mengacu pada revisi taksonomi Bloom oleh Lorin Anderson yang mengklasifikasikan enam tingkatan berpikir dalam belajar meliputi mengingat (*Remembering*), memahami (*understanding*), mengaplikasikan (*applying*), menganalisa (*analysing*), mengevaluasi (*evaluating*) dan mencipta (*creating*).

Pembelajaran sains meliputi tiga hal utama yaitu fakta, konsep, dan nilai (*value*). Di mana fakta-fakta dieksplorasi dan selanjutnya dikonseptualisasi untuk melahirkan nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Dengan demikian, pembelajaran akan mengembangkan kemampuan berpikir anak dalam memahami,

²⁴Rahman, T., *Pendekatan ...*, 82.

²⁵Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, cet. 6 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 97.

METODE PEMBELAJARAN SAINS

menganalisa dan mengevaluasi fakta-fakta untuk mencari solusi dari masalah yang ditemukan dan mengonstruksi fakta baru sebagai pengembangan daya cipta (*creating*).

Dalam pembelajaran melebihi fakta, terdapat 5 aspek pengalaman belajar yang dikembangkan menjadi siklus belajar yaitu:

1. *Exploring*, merespon informasi baru, mengeksplorasi fakta-fakta dengan petunjuk sederhana, melakukan sharing pengetahuan dengan siswa lain, atau menggali informasi dari guru, ahli/pakar atau sumber-sumber yang lain.
2. *Planning*, menyusun rencana kerja, mengidentifikasi alat dan bahan yang diperlukan, menentukan langkah-langkah, desain karya dan rencana lainnya.
3. *Doing/acting*, melakukan percobaan, pengamatan, menemukan, membuat karya dan melaporkan hasilnya, menyelesaikan masalah.
4. *Communicating*, mengkomunikasikan/mempresentasikan hasil percobaan, pengamatan, penemuan, atau hasil karyanya, sharing dan diskusi.
5. *Reflecting*, mengevaluasi proses dan hasil yang telah dicapai, mencari kelemahan-kekurangan guna meningkatkan efektivitas perencanaan.

6. Mengembangkan Program Pembelajaran Melebihi Fakta

Salah satu model pengembangan program pembelajaran melebihi fakta dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar: mengidentifikasi kompetensi dasar yang memungkinkan untuk dipadukan dalam sebuah topik pembelajaran.
2. Menentukan fokus belajar siswa: mengidentifikasi kata kunci dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, menentukan hubungan kerangka konsep untuk menetapkan fokus belajar.
3. Menentukan hasil belajar dan indikator: dirumuskan berdasarkan hubungan kerangka konsep yang telah ditetapkan, dijabarkan secara spesifik dan terukur. Hasil belajar hendaknya dapat mengembangkan keterampilan berpikir (*High Order of Thinking*) khususnya daya cipta.
4. Merencanakan penilaian: menentukan aspek yang dinilai dan cara menilainya, meliputi tiga ranah dalam pencapaian kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan (*skill*), dan sikap. Penilaian terhadap siswa dilakukan secara otentik (*authentic assessment*).

5. Membuat siklus belajar: Menyusun tahapan aktivitas belajar, yang secara implisit meliputi lima aspek yakni *exploring, planning, doing, communicating* dan *reflecting*.

Berdasarkan uraian tersebut dapat di pahami bahwa pembelajaran sains dapat menggunakan berbagai model dan metode. Penggunaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor unsur komponen pendidikan itu sendiri, diantaranya kompetensi guru, lingkungan, fasilitas, lingkungan, peserta didik dll. Berbagai alternatif metode yang dapat digunakan sebagaimana dipaparkan di atas merupakan khazanah sebagai alternatif sesuai dengan kondisi dan situasi dimana proses pembelajaran dilaksanakan.

C. Penutup

Sains dan ilmu pengetahuan adalah kebutuhan manusia yang dirumus kembangkan untuk memudahkan hidup manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai hamba (*'ābid*) sekaligus sebagai pemimpin (*kh`alifah*). Al-Attas berpandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah bersumber atau datangnya dari Allah dan tidak ada dikotomi pemisahan ilmu umum dan ilmu agama.

Tumbuh kembangnya paham sekularisme dan ateisme di Barat dan membawa perkembangan negara Barat namun kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat manusianya terpisah dengan nilai-nilai agama. Pendidikan Islam dan cendekiawan harus berupaya mengembalikan kepada dasarnya, yakni tidak ada pemisahan ilmu agama dan ilmu umum. sains dalam pandangan Al-Attas adalah salah satu metodologi pemahaman ayat Allah yang tersirat, pemahaman tersebut wajib dilakukan guna mendapatkan makna hakiki kalam Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpandie, I., *Didaktik Metodik Pendidikan Umum*. Surabaya: Usaha Nasional, 1999.
- Butt, Nasim. *Sains dan Masyarakat Islam*, Terj. Masdar Hilmy. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Depdiknas, *CD ROM KTSP 2006*.
- Echols, John M. dan Hasan Shadly. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1976.

METODE PEMBELAJARAN SAINS

- Hijrah, Syaiful. "Penerapan Metode Mengajar Inquiry Dalam Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar", <http://www.pembelajaran.com>, diakses 20 Agustus 2010.
- Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Pachrudin, E. K. *Proses Belajar Mengajar: Asas, Strategi dan Metode*. Bandung: Jurusan Pendidikan Dunia Usaha IKIP Bandung, 1989.
- Rahman, T., *Pendekatan dan metode dalam Program Pembelajaran Praktikum*. Bandung: Jurusan Pendidikan Biologi UPI, 2006.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, cet. 6. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Soelaiman, Darwis. "Filsafat Ilmu Pengetahuan (Perspektif Barat dan Islam)". *Hand Out Kuliah*.
- Stein, Jess. *The American Everyday Dictionary*. New York: Random House, 1955.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Mustaqim, 2002.

**KETENTUAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH ISLAM FUTURA
PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

E-mail: islamfutura@ar-raniry.ac.id

<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura>

A. Ketentuan Umum

- ❖ Jadwal penerbitan *Jurnal Ilmiah Islam Futura* adalah dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan **Agustus** dan bulan **Februari**.
- ❖ Naskah yang diserahkan untuk dimuat di *Jurnal Ilmiah Islam Futura* harus bersifat ilmiah dan terkait dengan studi keislaman (*Islamic studies*), orisinal dan belum pernah dipublikasikan dan atau sedang dikirimkan ke media apapun lainnya. Penulis harus menandatangani **Surat Pernyataan** yang menegaskan hal ini.
- ❖ Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa Inggris yang memenuhi kaidah penulisan dengan baik dan benar.
- ❖ Panjang naskah antara 5000-7000 kata termasuk teks naskah, gambar, tabel, catatan, referensi, dan lampiran.
- ❖ Naskah dikirim ke <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura> atau via email ke: islamfutura@ar-raniry.ac.id dengan melampirkan naskah (*attachment file*).

B. Ketentuan Khusus

- ❖ Kerangka tulisan meliputi: *Judul, Nama Penulis, Lembaga/institusi penulis, Alamat Email, Abstrak (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab), Kata Kunci (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab), Pendahuluan, Pembahasan, Penutup dan Daftar Pustaka*.
- ❖ *Judul* harus ringkas dan lugas serta mencerminkan fokus permasalahan yang dibahas dalam tulisan. Boleh menyertakan sub judul dengan total maksimal terdiri atas 14 suku kata.
- ❖ *Nama penulis* ditulis tanpa titel atau gelar keesarjaan.
- ❖ *Lembaga* afiliasi penulis adalah lembaga tempat penulis bekerja.
- ❖ *Abstrak* ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Abstrak memuat latar belakang permasalahan secara singkat, serta hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan tersebut. Panjang tulisan abstrak antara 150-200 kata.
- ❖ *Kata kunci* merupakan tema sentral tulisan maksimal 5 kata.
- ❖ *Pendahuluan* harus secara eksplisit merumuskan masalah dan dasar berpikir yang dikembangkan atau fenomena yang diamati sehingga memperjelas posisi tulisan yang diangkat dibanding tulisan lain yang pernah dipublikasikan (*state of the art*).
- ❖ *Pembahasan* harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
- ❖ *Penutup* harus menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam bagian *pendahuluan*. Di samping itu, pada bagian ini dapat juga ditambahkan beberapa saran penulis bagi pihak-pihak yang berkorelasi erat dengan isi tulisan.
- ❖ Naskah ditulis dengan menggunakan catatan kaki (*footnote*), bukan *in note* ataupun *endnote*.
- ❖ Sangat disarankan menggunakan *reference manager* (mendeley, zotero, endnote dsb)
- ❖ Sangat disarankan mengutip tulisan yang pernah dimuat di *Jurnal Ilmiah Islam Futura*:

Buku:

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1985), 34.

Bila **mengutip ulang** referensi yang sama secara berurutan, maka cukup tulis: *Ibid.* (dengan titik) jika sama halaman yang dikutip. Jika berbeda halamannya, cukup tambahkan nomor halamannya. Contoh: *Ibid.*, 14. (dengan titik dan koma setelah *Ibid*).

Buku dengan Beberapa Penulis

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 23.

Jabbar Sabil dkk., *Syariat Islam di Aceh: Problematika Implementasi Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), 21.

Buku dengan beberapa Terbitan (edisi)

Atho Mudhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 40.

Buku Terjemahan:

C. Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan (Jakarta: Bhatara Aksara, 1983), 34.

Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi:

Abdus Subhan, "Social and Religious Reform Movements in the 19th Century Among the Muslims," dalam *Social and Religious Movements*, ed. S. P. Sen (Calcutta: Institute of Historical Studies, 1979), 34.

Fazlur Rahman, "Revival and Reform in Islam," dalam *The Cambridge History of Islam*, vol. 2, ed. P. M. Holt et. al. (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 34.

Artikel dalam Jurnal:

George Makdisi, "The Hanbali School and Sufism," *Humaniora Islamica*, 2 (Januari, 1974), 61.

Artikel dalam Surat Kabar:

Sritua Arief, "Perilaku Golongan Menengah di Indonesia," *Jawa Pos*, 2 Januari 2000, 4.

Artikel dari Website

Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, "Wali Naggroe, Bendera dan Migas", *Serambi Indonesia*, 17 September 2013, <http://www.aceh.tribunnews.com> (diakses pada tanggal 05 Oktober 2013).

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Anton Widyanto, "Kontekstualisasi Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Zina di Aceh", *Disertasi* (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2013), 25.

Untuk referensi yang diulang setelah referensi lain (sudah diselang oleh referensi yang berbeda) ditulis: **Nama Penulis, Dua Atau Tiga Kata Dari Judul, menggunakan tiga titik kemudian koma(...).**

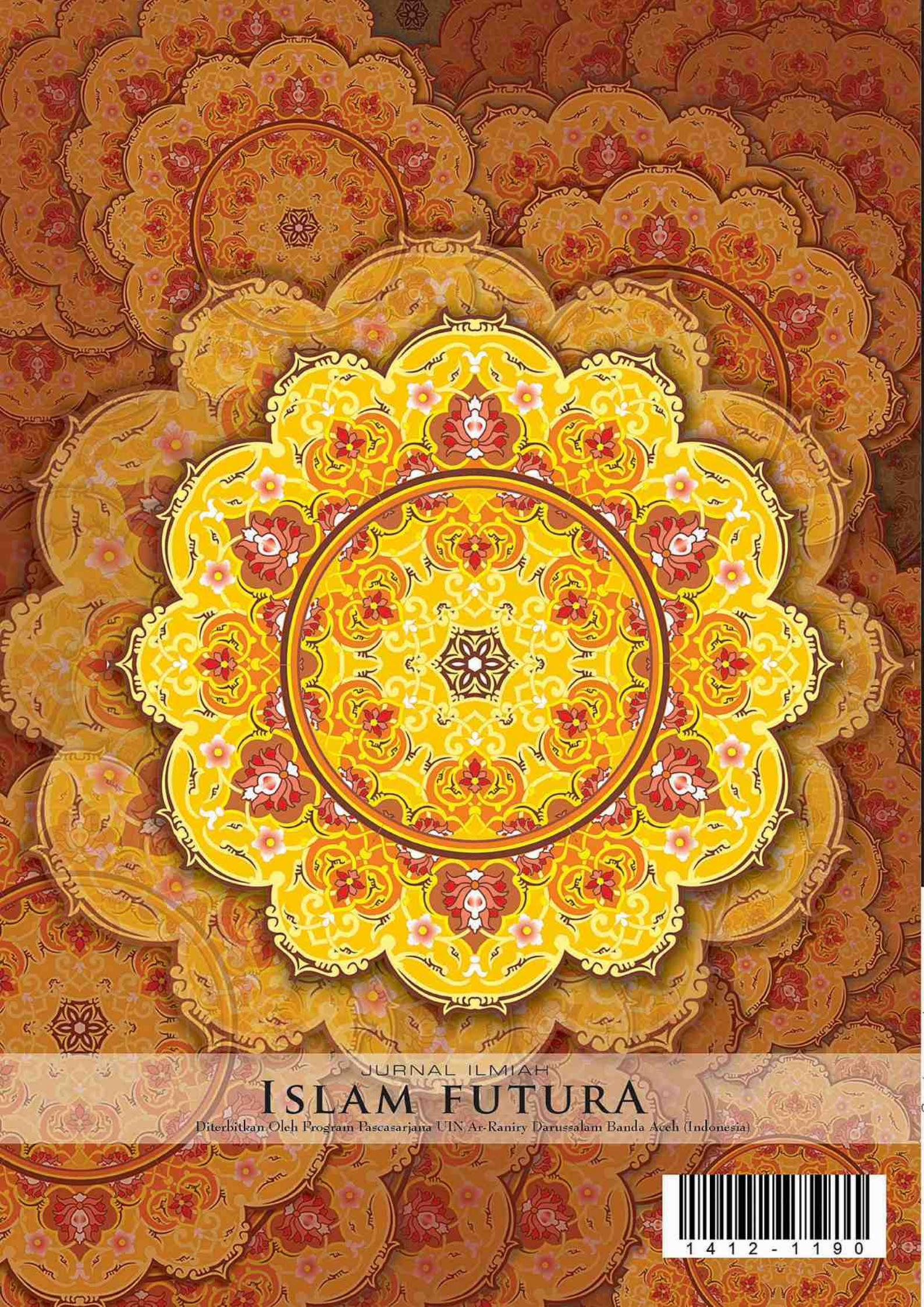
¹Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1985), 34.

²C. Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan (Jakarta: Bhatara Aksara, 1983), 34.

³Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas...*, 38.

Menggunakan istilah untuk:

- Tanpa tahun : **t.th**
 - Tanpa penerbit: **t.p**
 - Tanpa tempat penerbit: **t.tp**
- ❖ Naskah harus menyertakan **Daftar Pustaka** dengan ketentuan:
 1. Judul Daftar Pustaka ditulis dengan **huruf kapital** dan diletakkan di tengah: **DAFTAR PUSTAKA**.
 2. Daftar Pustaka **hanya memuat referensi yang dikutip** di dalam tulisan.
 3. Daftar Pustaka ditulis **secara alfabetis** dengan memuat: nama penulis, judul referensi, kota tempat penerbitan, penerbit, dan tahun penerbitan.
 4. Daftar pustaka ditulis dengan menyebut terlebih dahulu nama akhir penulis, nama depan, judul, kota, penerbit, dan tahun, (menggunakan tanda baca titik), kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut:
 - Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. 2. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.
 - Al-Zuhayli, Wabwah. *Usul al-Fiqh al-Islami*, jilid. II, cet. XIV. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
 - Siregar, A. Rivaly. *Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
 5. Untuk referensi yang ditulis oleh penulis yang sama, dibuat tanda garis bawah _____. Penulis yang sama didahulukan tahun yang lama terlebih dahulu.
 - ❖ Naskah yang diterima redaksi dikategorikan:
 1. Diterima tanpa revisi;
 2. Diterima dengan revisi;
 3. Ditolak.
 - ❖ Naskah yang dimuat akan diberi bukti terbit Jurnal Ilmiah Islam Futura dan *off printnya* masing-masing 2 eksemplar.



JURNAL ILMIAH
ISLAM FUTURA

Diterbitkan Oleh Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Indonesia)



1 4 1 2 - 1 1 9 0